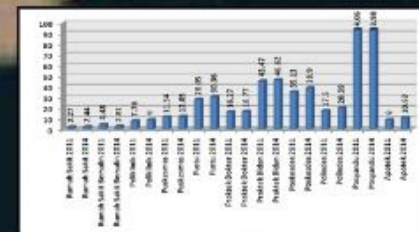
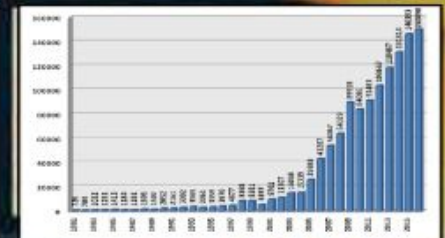
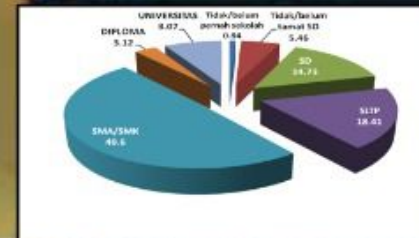


HUBUNGAN KAUSALITAS TODA-YAMAMOTO ANGGARAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN GROSS DOMESTIC PRODUCT DI INDONESIA



Null Hypothesis: D(GDP__TRILLION_RP_) has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-5.410285	0.0001
Test critical values:		
1% level	-3.639407	
5% level	-2.951125	
10% level	-2.614300	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Phillips-Perron dengan 1st difference

ISBN 978-602-85691-59-0



Penerbit Cahaya Abadi

HUBUNGAN KAUSALITAS TODA-YAMAMOTO ANGGARAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN *GROSS DOMESTIC PRODUCT* DI INDONESIA



Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,MM

PENERBIT CAHAYA ABADI
TULUNGAGUNG
TAHUN 2018

HUBUNGAN KAUSALITAS TODA-YAMAMOTO ANGGARAN
PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN *GROSS DOMESTIC PRODUCT* DI
INDONESIA

Oleh:

Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,MM

*Hak Cipta Dilindungi dengan Undang-Undang, dilarang keras mengutip,
menjiplak, memfotokopi sbagian atau seluruh isi buku ini serta
memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit CAHAYA ABADI.*

Diterbitkan oleh:

Penerbit CAHAYA ABADI

Email: penerbitcahayaabadi@yahoo.co.id

Telp. 085234635471

Editor: Timbul

Drs. AGUS EKO SUJANTO, SE.,MM

Hubungan Kausalitas Toda-Yamamoto Anggaran Pendidikan, Kesehatan Dan
Gross Domestic Product Di Indonesia; Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,MM : editor,
Timbul – Tulungagung : Cahaya Abadi, 2018.

101 hlm. ; 23 cm

ISBN: 978-602-8569-59-0

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia No. 121/JTI/2010
--

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penelitian yang berjudul “Hubungan Kausalitas Toda-Yamamoto Anggaran Pendidikan, Kesehatan dan *Gross Domestic Product* di Indonesia” ini terselesaikan sesuai dengan rencana. Penelitian ini secara umum mengkaji tentang pengeluaran pemerintah yang diproxy dalam bentuk pengeluaran pendidikan dan pengeluaran di sektor kesehatan. Pengeluaran baik untuk sektor pendidikan dan sector kesehatan ini secara teoretis dan empiris mendorong GDP yang menjadi indikator utama dari kinerja ekonomi suatu Negara.

Secara umum penelitian ini penulis dedikasikan kepada insan-insan akademik yang membantu terselesaikannya penelitian ini yaitu: IAIN Tulungagung dan Pascasarjana IAIN Tulungagung, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu keluargaku (isteri dan anak-anak tercinta) yang selalu mendoakan dan mendorong terselesaikannya penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat dan berkah. Aamiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Tulungagung, 2 Oktober 2018

Dr. Agus Eko Sujianto, SE.,MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vii
 BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	15
C. TUJUAN PENELITIAN	16
D. MANFAAT PENELITIAN	16
E. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	18
 BAB II: KAJIAN PUSTAKA	21
A. LANDASAN TEORI	21
1. Hakekat Ekonomi.....	21
2. Permasalahan Ekonomi	22
3. Ekonomi Mikro v.s Ekonomi Makro	25
4. Aliran Melingkar Pendapatan	31
5. Hakekat Gross Domestic Product (GDP).....	37
6. Cara Menghitung GDP	39
7. Hakekat Pengeluaran Pemerintah	43
8. Anggaran Pendidikan.....	45
9. Anggaran Kesehatan.....	47
B. LANDASAN EMPIRIS.....	48
1. Pendidikan dan GDP	48
2. Kesehatan dan GDP	53
3. Pendidikan dan Kesehatan	54
C. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN	56
D. HIPOTESIS	56
 BAB III: METODE PENELITIAN	59
A. RANCANGAN PENELITIAN	59
1. Pendekatan Penelitian	59
2. Jenis Penelitian.....	61
B. POPULASI DAN SAMPEL.....	62
C. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN SKALA PENGUKURAN	63
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	64
F. ANALISIS DATA	64

1. Statistik Deskriptif.....	64
2. Uji Stasioneritas	64
3. Pemilihan Lag Optimal.....	66
4. Uji Kointegrasi	67
5. Uji Kausalitas Toda-Yamamoto.....	68
 BAB IV: HASIL PENELITIAN.....	71
A. STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN	71
B. ASPEK PENDIDIKAN INDONESIA	72
C. ASPEK KESEHATAN INDONESIA.....	79
D. ASPEK EKONOMI DAN GDP INDONESIA	82
E. UJI STASIONERITAS	85
F. PEMILIHAN LAG OPTIMAL.....	87
G. UJI KOINTEGRASI	88
H. UJI KAUSALITAS TODA-YAMAMOTO.....	88
 BAB V: PEMBAHASAN	91
A. HUBUNGAN KAUSALITAS ANGGARAN PENDIDIKAN DENGAN ANGGARAN KESEHATAN DI INDONESIA	91
C. HUBUNGAN KAUSALITAS ANGGARAN PENDIDIKAN DENGAN GDP DI INDONESIA.....	92
E. HUBUNGAN KAUSALITAS ANGGARAN KESEHATAN DENGAN GDP DI INDONESIA.....	94
 BAB VI: PENUTUP	95
A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN	96
 DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi suatu bangsa tidak saja terkait dengan pembangunan dalam arti fisik (gedung, jalan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain) tetapi juga terkait dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaku ekonomi. Bahkan SDM ini merupakan asset penting yang sangat berharga atau sebuah investasi besar yang akan menjadi faktor utama yang menentukan suatu keberhasilan sebuah negara ataupun sebuah organisasi.

Pengelolaan SDM yang tepat bagi suatu negara dan sebuah organisasi menjadi faktor penting dan membawa kesuksesan yang maksimal. Bahkan suatu negara yang unggul yaitu suatu bangsa yang memiliki SDM-SDM tangguh sehingga mampu membawa negara tersebut menuju kesuksesan dan mendapat nilai lebih dibanding negara lainnya (keunggulan kompetitif).

Pentingnya SDM yang berkualitas ini sebagaimana dijelaskan oleh Rosidah bahwa SDM merupakan faktor kunci dalam pengembangan organisasi untuk organisasi publik dan bisnis. Orientasi pengembangan organisasi tidak berhubungan langsung dengan manusia. Namun, implikasinya mengacu pada sumber daya manusia¹. Demikian halnya dengan Febriana yang mengemukakan bahwa SDM adalah partikel atau bagian penting dari sebuah organisasi², karena itu penguatan SDM harus menjadi konsentrasi pemerintah-pemerintah otonomi baik

¹ Rosidah, Dimensi Budaya dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Implementasi Total Quality, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEP)*, Vol. 2; No. 1, Agustus 2004, hlmn. 52-58.

² Deri Febriana, Pengembangan Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, *Jejaring Administrasi Publik*, Th VI. Nomor 1, Januari-Juni 2014, hlmn. 428-438.

kabupaten maupun provinsi, terutama sebagai basis penguatan pembangunan daya saing daerah³.

Namun demikian, untuk mewujudkan SDM yang kompetitif dan pada waktu yang bersamaan memiliki kompetensi yang mampu bersaing ditingkat nasional maupun internasional, diperlukan keberpihakan dari pemerintah dalam bentuk anggaran pendidikan dan kesehatan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia secara berkelanjutan yang benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Secara makro ekonomi, anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan ini termasuk dalam komponen pengeluaran pemerintah (*Government Expenditur*). Komponen lainnya dalam ekonomi makro khususnya dalam penghitungan pendapatan nasional (Y) yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi swasta (I), ekspor (X) dan impor (M). Sementara pengeluaran pemerintah dinotasikan dengan G. Sedangkan cara untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan dua sector, tiga sector dan empat sector.

Metode yang umum digunakan untuk menghitung pendapatan nasional yaitu pendekatan permintaan aggregate = penawaran aggregate serta metode suntikan = bocoran. Namun demikian penelitian difokuskan pada analisis hubungan kausalitas

anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan *Gross Domestic Product* (GDP), maka sudah barang tentu tidak membahas lebih jauh tentang teknik penghitungan pendapatan nasional.

Peningkatan konsumsi rumah tangga akan meningkatkan pendapatan nasional, demikian halnya dengan investasi. Dimana peningkatan dalam hal investasi sektor swasta akan mendorong terjadinya peningkatan pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah juga akan mendorong peningkatan pendapatan nasional, ekspor akan meningkatkan pendapatan nasional, sementara peningkatan impor akan mendorong pada penurunan pendapatan nasional. Argumentasi ini didasarkan pada persamaan sebagaimana dikemukakan oleh Sloman dan Norris berikut ini.

$$AD = C + I + G + X - M$$

³ Samsul Huda, Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kompeten sebagai Basis Pembangunan Daerah, *Media Akademika*, Vol. 26, No. 3, Juli 2011, hlmn. 431-450.

Aggregate Demand (AD) atau permintaan agregat adalah pengeluaran total untuk produk negara. terdiri dari empat elemen: belanja konsumen (C), investasi swasta (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G), dan pengeluaran untuk ekspor (X) dikurangi pengeluaran untuk impor (M)⁴. Menurut pemikiran Sloman dan Norris tersebut dapat diperluas bahwa permintaan agregat merupakan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam perekonomian. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat sama dengan output riil agregat atau secara ekuivalen adalah pendapatan riil agregat yang donotasikan dengan Y.

Sedangkan Mankiw berpendapat bahwa para ekonom dan pembuat kebijakan tidak hanya peduli dengan output total barang dan jasa ekonomi tetapi juga tentang alokasi output ini di antara berbagai penggunaan alternatif. Penghitungan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Product* (GDP) dibagi menjadi empat kategori belanja yaitu: konsumsi (C), investasi (I), pembelian pemerintah (G) dan ekspor bersih (NX)⁵.

$$Y = C + I + G + NX$$

Selanjutnya Mankiw menjelaskan bahwa Y berarti GDP, dimana GDP adalah jumlah konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi terdiri dari barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Ini dibagi menjadi tiga sub kategori: barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan layanan. Barang yang tidak tahan lama adalah barang yang hanya bertahan dalam waktu singkat, seperti makanan dan pakaian. Barang tahan lama adalah barang yang bertahan lama, seperti mobil dan TV. Layanan termasuk pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan, seperti potongan rambut dan kunjungan dokter. Investasi terdiri dari barang yang dibeli untuk digunakan di masa depan. Investasi juga dibagi menjadi tiga subkategori: investasi tetap bisnis, investasi tetap perumahan, dan investasi persediaan. Investasi tetap bisnis adalah

⁴ John Sloman and Keith Norris, *Principles of Economics*, Pearson Education Australia, 2005, pp. 296.

⁵ N. Gregory Mankiw, *Principles of Microeconomics*, South-Western, a part of Cengage Learning, 2008, pp. 27.

pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan. Investasi residensial adalah pembelian rumah baru oleh rumah tangga dan tuan tanah. Investasi persediaan adalah peningkatan inventaris barang perusahaan (jika persediaan menurun, investasi persediaan negatif). Pembelian pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah. Kategori ini mencakup barang-barang seperti peralatan militer, jalan raya, dan layanan yang disediakan oleh pekerja pemerintah. Ini tidak termasuk pembayaran transfer ke individu, seperti jaminan sosial dan kesejahteraan. Karena pembayaran transfer mengalokasikan kembali pendapatan yang ada dan tidak dibuat sebagai pertukaran untuk barang dan jasa, mereka bukan bagian dari GDP. Kategori terakhir, ekspor neto, menyumbang perdagangan dengan negara lain. Ekspor bersih adalah nilai barang dan jasa yang dijual ke negara lain (ekspor) dikurangi nilai barang dan jasa yang dijual orang asing kepada kita (impor). Ekspor neto positif ketika nilai ekspor kita lebih besar dari nilai impor kita dan negatif ketika nilai impor kita lebih besar dari nilai ekspor kita. Ekspor bersih mewakili pengeluaran bersih dari luar negeri pada barang dan jasa kami, yang memberikan penghasilan bagi produsen domestik⁶.

Dengan demikian secara umum terdapat persamaan antara Sloman dan Norris dengan Mankiw dalam mempersepsi pendapatan nasional, bahwa konsumsi rumah tangga, investasi sektor publik, pengeluaran pemerintah dan ekspor akan mendorong peningkatan pendapatan nasional. Sementara impor akan mendorong terhadap penurunan nilai pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan pendapatan nasional yang diproyeksi oleh GDP.

Menurut Mankiw di atas, pengeluaran pemerintah merupakan komponen ketiga dari permintaan barang dan jasa. Pemerintah federal membeli senjata, rudal, dan layanan pegawai pemerintah. Pemerintah daerah membeli buku perpustakaan, membangun sekolah, dan mempekerjakan guru. Pemerintah di semua tingkatan membangun jalan dan pekerjaan umum lainnya. Semua transaksi ini merupakan pembelian barang dan jasa pemerintah, yang mencakup sekitar 20% GDP di Amerika Serikat⁷.

Baik pemerintah federal maupun pemerintah daerah di Amerika Serikat memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri dalam menciptakan permintaan barang dan jasa. Namun demikian walaupun

⁶ N. Gregory Mankiw, *Principles of*, pp. 4.

⁷ N. Gregory Mankiw, *Principles of*, pp. 64.

terdapat perbedaan dalam jenis pengeluaran pemerintah, masing-masing tingkatan pemerintahan di Amerika Serikat mempunyai tugas yang sama yaitu membelanjakan sekitar 20% GDP-nya.

Samuelson dan Nordhaus dalam menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah mengemukakan bahwa beberapa output nasional masyarakat dibeli oleh pemerintah federal, negara bagian, dan lokal, dan pembelian ini jelas merupakan bagian dari GDP mereka. Beberapa pembelian pemerintah adalah barang-barang jenis konsumsi (seperti makanan untuk militer) dan beberapa barang jenis investasi (seperti sekolah atau jalan). Dalam mengukur kontribusi pemerintah terhadap GDP, cukup dengan menambahkan semua pembelian pemerintah ini ke aliran konsumsi pribadi, investasi swasta, dan ekspor neto. Oleh karena itu, semua pengeluaran gaji pemerintah pada karyawannya ditambah biaya barang yang dibeli dari industri swasta (laser, jalan, dan pesawat) dimasukkan dalam kategori ketiga produk ini, yang disebut "pengeluaran konsumsi"⁸.

Penjelasan Samuelson dan Nordhaus di atas lebih rinci dibandingkan Mankiw dalam mendeskripsikan pengeluaran pemerintah. Samuelson dan Nordhaus mendeskripsikan pengeluaran pemerintah baik federal, Negara bagian, dan lokal. Bentuk konkrit pengeluaran pemerintah menurut Samuelson dan Nordhaus yaitu untuk keperluan militer (pertahanan dan keamanan negara), untuk kepentingan pendidikan serta prasarana dan sarana penunjang lainnya misalnya transportasi. Penjelasan Samuelson dan Nordhaus serta Mankiw tentang pengeluaran pemerintah di atas terjadi di Amerika Serikat. Bagaimana dengan di Indonesia?.

Pengeluaran pemerintah dalam konteks ke Indonesiaan didasarkan pada pernyataan Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Direktorat Jenderal Anggaran, bahwa belanja menurut fungsi terdiri dari: (1) fungsi pelayanan umum antara lain terdiri atas pembinaan, pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan (anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (Jamkes)), pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya, penyediaan dan pengelolaan air baku dan seluruh belanja non kementerian/lembaga (subsidi, pembayaran bunga utang, belanja lain-lain); (2) fungsi pertahanan antara lain terdiri atas pengadaan barang dan jasa militer,

⁸ Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics*, The McGraw-Hill Irwin, 2010, pp. 395.

produksi alutsista industri dalam negeri dan pengembangan pinak industri pertahanan, penyelenggaraan perawatan personel matra darat, laut dan udara; (3) fungsi ketertiban dan keamanan antara lain terdiri atas penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah, pengembangan peralatan Kepolisian Republik Indonesia, peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lalu lintas; (4) fungsi ekonomi antara lain terdiri atas perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api, pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional; (5) fungsi lingkungan hidup antara lain terdiri atas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan, dan pengelolaan pertanahan provinsi; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum antara lain terdiri atas fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum; (7) fungsi kesehatan antara lain terdiri atas pembinaan upaya kesehatan rujukan, peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; (8) fungsi pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain terdiri atas pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata luar negeri; (9) fungsi agama antara lain terdiri atas pengelolaan urusan agama islam dan pembinaan syariah, pengelolaan dan pembinaan urusan agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha; (10) fungsi pendidikan antara lain terdiri atas penjaminan kepastian layanan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan peningkatan penjaminan mutu pendidikan serta (11) fungsi perlindungan sosial antara lain terdiri atas jaminan kesejahteraan sosial (bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan)⁹.

Mengingat luasnya cakupan pengeluaran atau belanja pemerintah yang berkontribusi pada GDP di Indonesia, maka penelitian ini difokuskan pada jenis belanja pemerintah yang terkait langsung dengan kualitas SDM sebagaimana dikemukakan di awal bab ini yaitu belanja pemerintah, berdasar fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan. Sedangkan belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah itu sendiri

⁹ Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2018 Pemanjapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018, pp. 39

merupakan komponen penting permintaan agregat yang sangat terkait dengan GDP.

Menurut Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, kebutuhan anggaran pada jenjang pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); jenjang pendidikan Vokasi dan jenjang Pendidikan Tinggi. Pada jenjang PAUD akses sudah sekitar 72% tetapi kualitasnya harus segera ditingkatkan apabila Indonesia ingin memperbaiki kualitas pendidikannya (dasar, menengah, atas, dan vokasi) 20-30 tahun kedepan. Estimasi sebesar Rp 14 Triliun per tahun untuk perbaikan kualitas. Pada jenjang pendidikan vokasi sudah tercukupi untuk kapasitas penyerapan saat ini dan kapasitas sektor pendidikan saat ini. Pada jenjang pendidikan tinggi sudah tercukupi untuk kualitas pendidikan dasar menengah saat ini¹⁰.

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut¹¹. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan¹².

Pendidikan tinggi merupakan salah satu jenjang pada sistem pendidikan tingkat menengah yang terdiri dari program atau tingkat diploma, program strata 1 atau disingkat sarjana, program strata 2 yang biasa disebut dengan magister, strata 3 atau doktoral, program atau jalur profesi serta program atau jalur spesialis yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Agama dan lain sebagainya¹³.

Pentingnya pendidikan di Indonesia ini sangatlah dimaklumi, karena Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan, bahwa untuk membangun suatu bangsa dan negara yaitu Indonesia yang seutuhnya, yaitu negara atau pemerintah yang mampu melindungi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai dari warga negaranya sampai dengan sumber daya alamnya baik di darat, laut

¹⁰ Anonymous, *Kajian Anggaran Pendidikan*, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 28 November 2017.

¹¹ Sekneg RI, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 14.

¹² Kemekumham RI, Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 16 ayat 1.

¹³ Kemenkumham RI, Undang-Undang RI, Pasal 1 ayat 2.

maupun udara maka diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi warga negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pondasai yang menjadi titik awal lahirnya peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan umum yang meningkat, kehidupan bangsa yang cerdas, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Kata mencerdaskan ini menunjukkan tentang komitmen pemerintah dalam memberikan pendidikan kepada warga negara, karena pendidikan ini merupakan salah satu syarat mutlak terselenggaranya suatu pemerintah negara Indonesia.

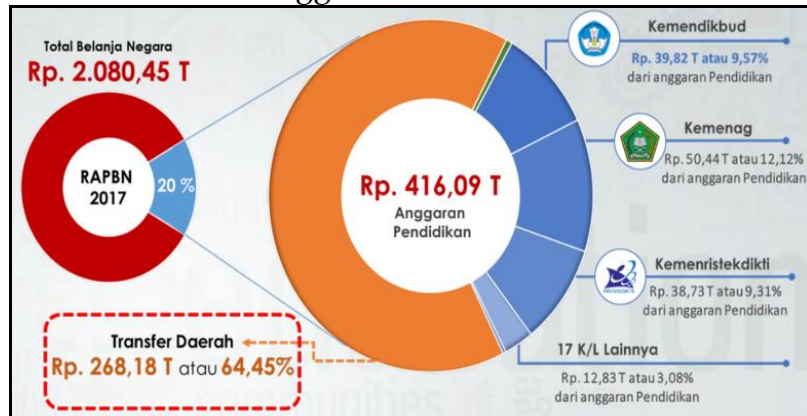
Landasan hukum lainnya yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁴. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹⁵.

Gambar berikut ini menjelaskan pendistribusian anggaran pendidikan di Indonesia pada tahun 2017, khususnya yang dialokasikan untuk sektor pendidikan pada kementerian dan lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Kementerian dan lembaga ini merupakan institusi pusat yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang dimaksud dapat berupa pendidikan formal misalnya tingkat pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar dan pendidikan usia dini. Selain pendidikan formal juga ada pendidikan non formal dalam bentuk lembaga-lembaga kursus yang menawarkan pendidikan keterampilan untuk memberikan kompetensi kepada peserta didik. Kompetensi yang dimaksud misalnya kompetensi menjahit, montir, pertukangan, akuntansi dan lain sebagainya, yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki kesiapan dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin kompetitif.

¹⁴ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 46 ayat 2.

¹⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Pasal 49 ayat 1.

Gambar 1: Distribusi Anggaran Pendidikan Indonesia tahun 2017



Sumber: Anonymous (2017)¹⁶

Gambar di atas merupakan paparan ringkas tentang pendistribusian anggaran pendidikan Indonesia pada tahun 2017, dimana total belanja negara pada tahun tersebut sebesar Rp 2.080,45 Triliun. Kemudian berdasar amanat Undang-Undang Sisdiknas Pasal 49 ayat 1, bahwa sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan pada sektor pendidikan. Sehingga besaran dana untuk sektor pendidikan pada tahun 2017 sebesar Rp 416,09 Triliun, dan dana ini kemudian dilakokasikan lagi untuk transfer ke daerah sebesar 64,45% (Rp 268,18 Triliun), sisanya yaitu sebesar 35,55% dialokasikan untuk sektor pendidikan. Jadi kalau amanat Undang-Undang Sisdiknas sebesar minimal 20% untuk sektor pendidikan maka pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan dana lebih besar dari 20% sehingga pemerintah sudah menjalankan Undang-Undang Sisdiknas.

Di sektor kesehatan, berdasar amanat konstitusi, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup yang sejahtera baik lahir maupun batin, berdomisi, dan memperoleh lingkungan dalam hidupnya secara sehat dan baik (layak) serta memiliki hak mendapatkan pelayanan yang baik khususnya di bidang kesehatan¹⁷. Kemudian, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana prasarana kesehatan, demikian juga sarana prasarana lainnya yaitu pelayanan pada bidang-bidang umum secara baik dan layak¹⁸.

Selanjutnya Undang-Undang Tentang Kesehatan memberikan penjelasan bahwa pembangunan di bidang kesehatan memiliki tujuan

¹⁶ Anonymous, *Kajian Anggaran*, 28 November 2017.

¹⁷ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat 1.

¹⁸ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat 3.

untuk meningkatkan kemauan, kesadaran dan tentunya aspek kemampuan hidup yang sehat terutama bagi setiap warga negara Indonesia, sehingga derajat atau tingkat kesehatan masyarakat Indonesia dapat terwujud yang diharapkan dapat menjadi implementasi dari terwujudnya iklim investasi bagi pembangunan insan warga negara yang memiliki produktivitas yang tinggi serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi¹⁹. Tujuan tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk mendukung terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Selanjutnya anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan ini dalam rangka untuk mewujudkan tujuan yaitu menyediakan alokasi biaya kesehatan secara berkelanjutan dan terus menerus dengan nilai yang relevan dengan kebutuhan, dapat didistribusikan secara jujur dan adil, dan memiliki kemanfaatan yang tinggi baik itu kemanfaatan ditinjau dari aspek berdaya guna, berhasil guna dan bernilai guna untuk mewujudkan terselenggaranya proses pembangunan kesehatan nasional yang tinggi supaya derajat kesehatan warga negara dapat meraih kinerja yang maksimal²⁰. Unsur-unsur biaya yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) yaitu terdiri atas sumber pembiayaan kesehatan, alokasi pembiayaan kesehatan sampai dengan pemanfaatan kesehatan²¹. Sedangkan sumber-sumber yang dialokasikan untuk pembiayaan di bidang kesehatan yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, kepedulian masyarakat, sektor swasta serta sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan²². Kemudian, nilai anggaran pembiayaan kesehatan oleh pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% yang dialokasikan pada mata anggaran pemerintah pusat dan daerah selain gaji rutin²³. Menurut undang-undang nilai anggaran sector kesehatan khususnya pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dialokasikan besarnya paling tidak sebesar 10% yang berasal dari alokasi anggaran penerimaan atau pendapatan belanja daerah provinsi, kabupaten, kota selain dari gaji²⁴.

Gambar di bawah ini menjelaskan mengenai keberpihakan pemerintah terhadap sektor-sektor prioritas khususnya sektor kesehatan

¹⁹ UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 3.

²⁰ UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 170 ayat 1.

²¹ UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 170 ayat 2.

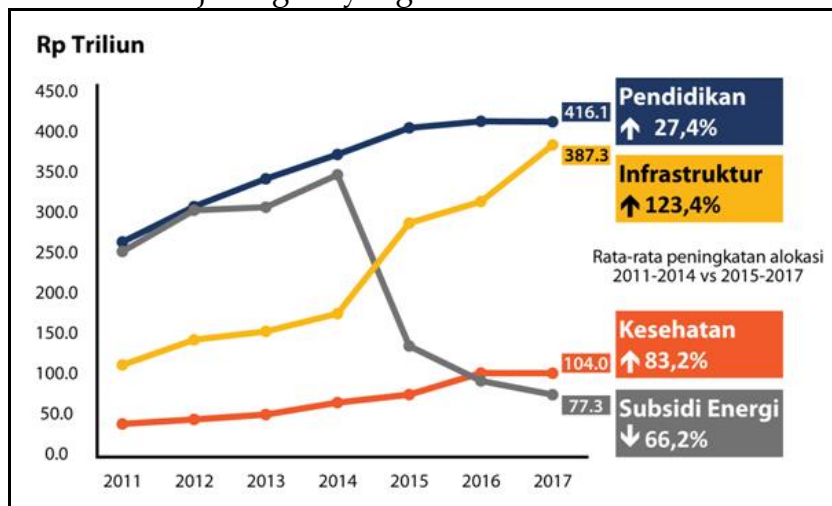
²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 170 ayat 3.

²³ UU RI Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 171 ayat 1.

²⁴ UU Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 171 ayat 2.

yang secara rata-rata mengalami peningkatan. Pentingnya sektor kesehatan sehingga mendapat porsi yang tinggi dalam APBN.

Gambar 2: Belanja Negara yang Bersifat Prioritas dan Mandatory



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia²⁵

Berdasar gambar 2, anggaran untuk kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2017 sebesar Rp 104 Triliun meningkat Rp 500 miliar dari RAPBN 2017. Kenaikan ini untuk mempertahankan anggaran sektor kesehatan sebesar 5% dari total belanja pemerintah Rp 2.080,45 triliun. Sumber anggaran kesehatan pada 2017 berasal dari belanja pemerintah pusat mencapai 72,3% dan diikuti dari transfer ke daerah dan Dana Desa 24,2%, dan sisanya dari pembiayaan. Sasaran pembangunan sektor kesehatan antara lain: imunisasi dasar yang lengkap bagi anak usia 0-11 bulan hingga 92%, prevalensi stunting (pendek) pada anak umur di bawah 2 tahun 29,6%, serta kecamatan dengan puskesmas terakreditasi sebanyak 700 kecamatan²⁶.

Berdasar pengamatan tentang perkembangan belanja pemerintah untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan di atas jelas, bahwa pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan jumlah anggaran yang dialokasikan pada dua sektor prioritas di atas. Komitmen tidak hanya ditunjukkan oleh besarnya anggaran, tetapi juga diperkuat dengan payung hukum yang konkrit, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan

²⁵ Anonymous, *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*, Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

²⁶ Anonymous, *Anggaran Kesehatan Tetap 5 Persen di APBN 2017*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/31/anggaran-kesehatan-tetap-5-persen-di-apbn-2017>

produk hukum lainnya. Perhatian serius terhadap pendidikan dan kesehatan ini sekaligus menandakan bahwa pemerintah memiliki tujuan jangka panjang yaitu terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, yang digerakkan oleh sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan kuat.

Tingginya komitmen pemerintah terhadap sumber daya insani inilah yang memotivasi peneliti untuk melakukan kajian serius dalam kaitannya dengan pengeluaran atau belanja pemerintah dalam bentuk anggaran pendidikan dan kesehatan. Satu hal yang perlu dicatat bahwa besar kecilnya pengeluaran pemerintah ini sangat bergantung pada pendapatan nasional atau oleh GDP yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Umumnya GDP dianggap sebagai ukuran terbaik dari seberapa baik kinerja perekonomian. Sedangkan salah satu cara untuk melihat besarnya GDP yaitu dengan mengukur total pendapatan semua orang dalam perekonomian. Cara lainnya untuk mengukur GDP yaitu melalui total pengeluaran pada output barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tahun tertentu²⁷. GDP juga merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu²⁸. Pentingnya peningkatan GDP bagi suatu negara, karena memang GDP ini menjadi salah satu indikator ekonomi makro untuk mengukur pendapatan nasional suatu negara pada tahun tertentu.

Studi yang mengkaji dampak guncangan pengeluaran pemerintah terhadap GDP, konsumsi perorangan, neraca perdagangan, dan nilai tukar yang efektif yang menggunakan data *time series* variabel makroekonomi Iran sejak tahun 1976 hingga 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guncangan positif pengeluaran pemerintah dapat mendorong peningkatan GDP dan konsumsi pribadi, tetapi menurunkan neraca perdagangan²⁹. Menurut penelitian tersebut bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong peningkatan GDP. Sementara bentuk pengeluaran pemerintah antara pengeluaran untuk pendidikan dan pengeluaran untuk kesehatan.

²⁷ N. Gregory Mankiw, *Principles of Microeconomics*, South-Western, a part of Cengage Learning, 2008, pp. 18.

²⁸ Anonymous, *Pengertian Pendapatan Nasional*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.

²⁹ Ahmad Assadzadeh; Javad Pourqoly; Amin Taslimi Baboli; Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan, Studying The Impact of Government Expenditures Shocks on Macroeconomic Variables of The Iranian Economy, *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*. 2013;5(2).

Temuan Kurniawan menyebutkan bahwa pembangunan SDM secara signifikan berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi bergerak searah dengan tingkat kemiskinan; tingkat kemiskinan Indonesia yang dipengaruhi oleh pembangunan SDM dan pertumbuhan ekonomi tidak berbeda secara signifikan antara Jawa dengan luar Jawa; pengaruh pembangunan SDM dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia berbeda antara wilayah Jawa dengan luar Jawa; perbedaan struktur perekonomian suatu wilayah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia³⁰. Hasil tersebut menjelaskan bahwa pembangunan SDM baik di sektor pendidikan maupun kesehatan akan mendorong peningkatan ekonomi suatu negara, dan peningkatan ekonomi ini salah satu diantaranya diukur oleh pendapatan nasional atau GDP.

Notoatmodjo menjelaskan bahwa untuk mewujudkan pembangunan versi paradigma baru, pembangunan dititikberatkan pada tiga pilar atau sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan wajib mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya insani dimana sektor pendidikan memiliki andil yang besar, maka pemerintah secara hukum menaruh perhatian tentang masalah ini yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang, yaitu misalnya dengan mendistribusikan alokasi anggaran sektor pendidikan dengan nilai 20% yang berasal dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara, walaupun realitasnya membutuhkan proses dengan pengawasan melakat. Kemudian, dalam rangka untuk mengoptimalkan peran serta di sektor kesehatan untuk mewujudkan pembangunan nasional selanjutnya dilakukan peningkatan mutu layanan kesehatan yang terintegrasi mulai dari preventif, promotif, dan memperhatikan pelayanan kesehatan kuratif rehabilitatif yang berkesinambungan. Disamping itu, dalam kaitannya dengan sumber daya insani, pendidikan untuk tenaga struktural dan fungsional kesehatan memiliki kontribusi yang tidak bisa dipandang remeh, sehingga kualitas tenaga kerja meningkat, mengingat pendidikan

³⁰ Wawan Kurniawan, Pengaruh Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Dengan Kewilayahan Sebagai Variabel Moderasi), http://bappeda.sragenkab.go.id/masuk/gambar/5._SDM_PERTUMBUHAN_EKONOMI_KEMISKINAN.PDF

merupakan faktor kunci dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi warga negara secara paripurna³¹.

Studi pada negara Iran dari tahun 1981 – 2012 yang menganalisis tentang hubungan antara pengeluaran pemerintah riil (belanja pendidikan pemerintah) dan GDP riil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP riil berdampak positif terhadap total pengeluaran pemerintah serta memiliki hubungan jangka panjang³². Hasil penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, berarti terdapat upaya jangka panjang untuk mencerdaskan warga negara suatu negara. Tujuan jangka panjangnya, jika kualitas SDM suatu negara atau seseorang meningkat maka tingkat skill dan kompetensi juga meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian.

Studi Teker, et al menjelaskan, selama beberapa tahun tingkat perkembangan negara diukur dengan menggunakan variabel ekonomi. Saat ini, harapan hidup dianggap sebagai indikator penting yang menyoroti kecanggihan ekonomi, sosial dan lingkungan suatu negara. Di negara-negara maju, setiap bayi yang baru lahir diharapkan untuk hidup lebih dari 70 tahun sementara di negara-negara berkembang bayi yang baru lahir diharapkan untuk hidup kurang dari 50 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan jangka panjang antara rasio pengeluaran kesehatan terhadap GDP dan harapan hidup pria dan wanita serta semua variabel lain dalam arah yang sama³³. Sedangkan di Iran, sebanyak 1% pengurangan kematian anak-anak di bawah 5 tahun dapat meningkatkan GDP Iran sebanyak 1,9%. Selain itu, peningkatan 1% dalam jumlah dokter, tempat tidur rumah sakit atau pengeluaran kesehatan akan meningkatkan GDP masing-masing sebesar 0,37%, 0,27% dan 0,29%³⁴.

Teori-teori tentang pengeluaran pemerintah, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan GDP, serta penelitian-penelitian terdahulu tentang hubungan variabel-variabel penelitian dikemukakan pada bab 2

³¹ Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Volume 2, Nomor 5, bulan April 2008, hlmn. 196.

³² Fozieh Jeyhoon Tabar, Zahra Najafi, Yaser Sistani Badooei, The Impact of Educational Expenditures of Government on Economic Growth of Iran, *AD-minister*, No.30 Medellin Jan./June 2017.

³³ Dilek Teker, Suat Teker, Mine Sönmez, The Effect of Economic Variables on Life Expectancy of Males and Females, *Journal of Business Research –Türk*, 4/3, 2012.

³⁴ Marziyeh Sadat Safe, Mohsen Barouni, Seyed Mojtaba Saif, Safashar Branch, Health impact on Economy by Artificial Neural Network and Dynamic Ordinary Least Squares, *Journal of Health Management & Informatics*, 4(4), 2017.

(Kajian Pustaka) yang selanjutnya akan dikembangkan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.

Berdasar pemikiran singkat di atas, penelitian ini menganalisis secara mendalam mengenai pembangunan di Indonesia baik di sektor pendidikan, kesehatan maupun ekonomi sehingga akan terwujud negara Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat umum, kehidupan anak bangsa yang cerdas, dan secara aktif ikut serta mewujudkan ketertiban di dunia berdasar pada nilai-nilai kemerdekaan, keadilan di bidang sosial dan terwujudnya perdamaian masyarakat. Sehingga judul penelitian yang dipilih yaitu: "HUBUNGAN KAUSALITAS TODA-YAMAMOTO ANGGARAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN GROSS DOMESTIC PRODUCT DI INDONESIA".

B. PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang di atas, potret ekonomi makro Indonesia dalam kurun waktu mulai tahun 1981 sampai dengan 2016 penuh dengan dinamika, terutama jika dikaitkan dengan pengeluaran pemerintah yaitu alokasi dana untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Kedua sektor ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan perlu dukungan pembiayaan dari pemerintah yang tentunya bersumber dari penerimaan negara. Sedangkan penerimaan negara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu GDP, yang menggambarkan output nasional yang dihasilkan oleh entitas ekonomi pada periode tertentu biasanya satu tahun.

Mengingat variabel anggaran pendidikan, kesehatan dan GDP ini saling mendukung atau mempengaruhi, maka penelitian ini perlu difokuskan pada kajian yang mendalam dalam bentuk rumusan masalah. Sugiyono mendefinisikan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data³⁵. Sedangkan rumusan masalah penelitian ini diformulasikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan anggaran kesehatan di Indonesia?;
2. Bagaimana hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan GDP di Indonesia?;
3. Bagaimana hubungan kausalitas anggaran kesehatan dengan GDP di Indonesia?.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: ALFABETA, 2014, pp. 58.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian tidak bisa dilepaskan dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya, sedangkan tujuan penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang cara untuk memecahkan rumusan masalah berbasis pada data penelitian. Tujuan penelitian sekaligus merupakan arah sistematis suatu penelitian. Berdasar penjelasan di atas, maka arah atau tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menguji hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan anggaran kesehatan di Indonesia;
2. Menguji hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan GDP di Indonesia;
3. Menguji hubungan kausalitas anggaran kesehatan dengan GDP di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada beberapa kalangan yaitu:

1. Bagi dunia teoretis.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa komponen-komponen ekonomi makro seperti pengeluaran pemerintah dan GDP saling mendukung bahkan mempunyai hubungan baik satu arah maupun dua arah secara statistik. Komponen ekonomi makro dalam studi ini meliputi pengeluaran pemerintah (*Government Expenditures*) atau juga disebut dengan *Government Spending*.

Pengeluaran pemerintah ini mencakup semua konsumsi pemerintah, investasi, dan pembayaran transfer, serta termasuk juga untuk belanja pendidikan dan kesehatan yang akan diuji dengan GDP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia teoretis bahwa terdapat hubungan kausalitas terhadap komponen ekonomi makro yaitu ketersediaan anggaran pendidikan, kesehatan dan GDP Indonesia;

2. Bagi dunia praktik.

Masyarakat pelaku ekonomi yang terkait dengan dunia pendidikan dan dunia kesehatan diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Ketersediaan anggaran untuk kesehatan dan pendidikan ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warganya baik ditinjau dari aspek kesehatan jasmani maupun kualitas pendidikan sehingga diharapkan dapat terwujud sumberdaya manusia yang berkualitas secara paripurna.

Dengan demikian diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang nyata berdasar hasil penelitian yang serius untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasinya untuk membangun bangsa melalui bidang kesehatan dan pendidikan;

3. Bagi pemerintah.

Pemerintah telah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, baik pada amandemen 1, 2, 3 dan 4. Pada amandemen tersebut pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan. Misalnya pada pasal 31 ayat 2 bahwa pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan bernegara, oleh karenanya pemerintah berkewajiban penuh dalam penyelenggaraan pendidikan terutama dalam kaitannya dengan pembiayaan pendidikan untuk tingkat dasar yang dikenal dengan istilah wajib belajar 9 tahun; pasal 31 terutama pada ayat 3 dimana pemerintah melalui undang-undang menyelenggarakan dan mengatur sistem pembelajaran dan pendidikan di Indonesia dalam rangka untuk mencerdaskan bangsa, mewujudkan akhlak mulia dan untuk memperkuat ketakwaan dan keimanan warga negara kehadirat Tuhan YME; pasal 31 dimana ayat 4 menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan system pendidikan nasional maka pemerintah mengalokasikan minimal sebesar 20% dari dana APBN dan APBD yang diprioritaskan untuk mewujudkan tercapainya system pendidikan nasional yang berkualitas serta pasal 31, dijelaskan dalam ayat 5 bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya ingin mewujudkan suatu warga negara yang memiliki pengetahuan akademik atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja tetapi juga warga Negara yang memiliki kedalaman pengetahuan di bidang ilmu-ilmu agama atau nilai-nilai spiritual keagamaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa, memiliki keberadaban budaya dan secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah untuk mengevaluasi penggunaan dana di sektor pendidikan dan kesehatan menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Disamping itu pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dalam kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional.

4. Bagi peneliti yang akan datang.

“Tiada gading yang tak retak, setiap manusia mempunyai kelemahan atau pernah melakukan kesalahan”. Demikian halnya dengan penelitian ini, tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Inilah

yang sekaligus menjadikan bahwa ilmu itu dinamis dan diperlukan kajian atau perluasan penelitian untuk memperkaya khazanah ilmu ekonomi makro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pijakan awal bagi peneliti selanjutnya, untuk mengembangkan penelitian baik dari segi periodisasi penelitian maupun wilayah kajian.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan format sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Sistematika Penelitian

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

- A. Landasan Teori
 - 1. Hakekat Ekonomi
 - 2. Permasalahan Ekonomi
 - 3. Ekonomi Mikro v.s Ekonomi Makro
 - 4. Aliran Melingkar Pendapatan
 - 5. Hakekat GDP
 - 6. Cara Menghitung GDP
 - 7. GDP v.s GNP
 - 8. GDP Indonesia dari Masa ke Masa
 - 9. Hakekat Pengeluaran Pemerintah
 - 10. Pendidikan di Indonesia
 - 11. Kesehatan di Indonesia
 - 12. Pengeluaran Pemerintah Idnonesia dari Masa ke Masa
- B. Landasan Empiris
 - 1. Pendidikan dan GDP
 - 2. Kesehatan dan GDP
 - 3. Pendidikan dan Kesehatan
- C. Kerangka Berfikir Penelitian
- D. Hipotesis

BAB III: METODE PENELITIAN

- A. Rancangan Penelitian
 - 1. Pendekatan Penelitian
 - 2. Jenis Penelitian
- B. Populasi dan Sampel
- C. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Analisis Data

BAB IV: HASIL PENELITIAN

- A. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
- B. Aspek Pendidikan di Indonesia
- C. Aspek Kesehatan di Indonesia
- D. Aspek Ekonomi dan GDP di Indonesia
- E. Uji Stasioneritas
- F. Pemilihan Lag Optimal
- G. Uji Kointegrasi
- H. Uji Kausalitas Toda-Yamamoto

BAB V: PEMBAHASAN

- A. Hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan anggaran kesehatan di Indonesia
- B. Hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan GDP di Indonesia
- C. Hubungan kausalitas anggaran kesehatan dengan GDP di Indonesia

BAB VI: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Hakekat Ekonomi

Banyak orang berpikir bahwa ekonomi adalah tentang uang. Sampai taraf tertentu pemikiran ini benar. Ekonomi memiliki banyak kaitan dengan uang: dengan berapa banyak uang yang dibayar orang; berapa banyak yang mereka habiskan untuk dibelanjakan; berapa biaya untuk membeli berbagai barang kebutuhan hidup; berapa banyak uang yang diperoleh perusahaan; serta berapa banyak uang yang ada secara total dalam perekonomian. Tetapi meskipun banyak kajian dimana kehidupan kita berkaitan dengan uang, ekonomi lebih dari sekadar mempelajari tentang uang³⁶.

Selanjutnya Mankiw mendefinisikan bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Di sebagian besar masyarakat, sumber daya dialokasikan bukan oleh diktator yang berkuasa tetapi melalui aksi gabungan jutaan rumah tangga dan perusahaan. Oleh karena itu, para ekonom mempelajari bagaimana orang membuat keputusan: seberapa banyak mereka bekerja, apa yang mereka beli, berapa banyak yang mereka tabung, dan bagaimana mereka menginvestasikan simpanan mereka. Para ekonom juga mempelajari bagaimana orang berinteraksi satu sama lain. Misalnya, mereka memeriksa bagaimana banyak pembeli dan penjual barang bersama menentukan harga barang yang dijual dan jumlah yang dijual. Akhirnya, para ekonom menganalisis kekuatan dan tren yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan

³⁶ John Sloman and Keith Norris, *Principles of Economics*, Pearson Education Australia, 2005, pp. 4.

pendapatan rata-rata, bagian kecil dari populasi yang tidak dapat menemukan pekerjaan, dan tingkat di mana harga naik³⁷.

Samuelson dan Nordhaus mendefinisikan bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa berharga dan mendistribusikannya di antara individu yang berbeda. Definisi tersebut memberikan makna bahwa:

- a. Ekonomi mengeksplorasi perilaku pasar keuangan, termasuk suku bunga, nilai tukar, dan harga saham.
- b. Subyek memeriksa alasan mengapa sebagian orang atau negara memiliki pendapatan tinggi sementara yang lain miskin; ini melanjutkan dengan menganalisis cara-cara mengurangi kemiskinan tanpa merusak ekonomi.
- c. Ini mempelajari siklus bisnis fluktuasi dalam kredit, pengangguran, dan inflasi bersama dengan kebijakan untuk memoderasinya.
- d. Ekonomi mempelajari perdagangan dan keuangan internasional dan dampak globalisasi, dan secara khusus mengkaji isu-isu pelik yang terlibat dalam membuka perbatasan untuk perdagangan bebas.
- e. Ini menanyakan bagaimana kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk mengejar tujuan-tujuan penting seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat, penggunaan sumber daya yang efisien, pekerjaan penuh, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan yang adil³⁸.

Menurut Sukirno, ilmu ekonomi menganalisa biaya dan keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya (sumber daya: Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia)³⁹.

2. Permasalahan Ekonomi

Masalah ekonomi terkait dengan masalah kelangkaan. Kelangkaan ini tidak hanya terjadi di Ethiopia, Sudan, dan negara-negara terbelakang lainnya, tetapi juga pada negara-negara berkembang serta Negara-negara maju seperti Australia, Inggris, Jepang, Perancis, Singapura dan semua negara lain di dunia ini. Bagi seorang ekonom, kelangkaan memiliki definisi yang sangat spesifik, yaitu kelebihan keinginan manusia atas apa yang sebenarnya bisa dihasilkan dalam memenuhi keinginan ini.

³⁷ N. Gregory Mankiw, *Principles of Microeconomics*, South-Western, a part of Cengage Learning, 2008, pp. 4.

³⁸ Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics*, The McGraw-Hill Irwin, 2010, pp. 4.

³⁹ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Kelangkaan ini selanjutnya menjadi masalah utama perekonomian yang dihadapi oleh setiap masyarakat dan negara, disebabkan oleh:

- a. Keinginan manusia tanpa batas;
- b. Keterbatasan sumber daya untuk memenuhi keinginan tersebut, dan
- c. Pemenuhan keinginan tak terbatas dengan sumber daya terbatas.

Dalam masyarakat manapun, keinginan manusia tidak terbatas. Jika seseorang ingin puas, yang lain akan segera muncul. Misalnya, jika kebutuhan dasar manusia (misalnya, makanan, pakaian dan tempat tinggal) terpenuhi maka beberapa kebutuhan sekunder lainnya akan segera muncul. Kebutuhan sekunder ini mungkin kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk mencapai fungsi sosial, kebutuhan untuk memenuhi beberapa kewajiban sosial, dan lain sebagainya. Namun demikian, dibandingkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas ini, sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan tersebut tetap mengalami keterbatasan.

Dengan demikian, masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah untuk memuaskan keinginan tanpa batas dengan sumber daya terbatas. Disini muncul masalah pilihan atau seleksi. Ini mengisyaratkan bahwa setiap masyarakat harus mengatur kebutuhan dan keinginannya berdasarkan skala prioritas. Kemudian, dengan sumber dayanya yang terbatas, masyarakat harus memenuhi keinginannya dalam urutan prioritas.

Berdasar pengamatan, penyebab utama terjadinya masalah ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Keinginan manusia tidak terbatas.

Setiap manusia membutuhkan beragam barang dan jasa untuk mempertahankan dan meningkatkan standar kehidupannya. Setiap kali kebutuhan dasar makanan, pakaian dan tempat tinggal terpenuhi maka orang-orang merasa bahwa mereka ingin dan membutuhkan pendidikan, buku, pena dan pensil, penghapus, kursi, meja, televisi, tape-recorder, CD-player, komputer, perjalanan, olahraga, pakaian yang lebih halus, mesin cuci, dan ribuan barang semacam itu. Dalam masyarakat modern, keinginan terhadap produk primer dan sekunder ini terus mengalami peningkatan sebagai tanggapan terhadap tekanan mode dan periklanan. Keinginan ini muncul satu demi satu seperti gelombang laut yang tak kenal lelah.

- b. Keterbatasan sumber daya untuk memenuhi keinginan.

Produksi berbagai barang dan jasa memerlukan sumber daya seperti sumber daya lahan, sumber daya mineral, sumber daya hutan, modal fisik (misalnya mesin, gudang pabrik, dan lain-lain) dan modal uang, sumber daya manusia (misalnya, terampil tenaga manusia), dan lain

sebagainya. Namun demikian, dibandingkan dengan keinginannya untuk berbagai barang dan jasa, sumber daya ini tampaknya tidak mencukupi. Ini menyiratkan bahwa jika semua sumber daya yang tersedia ini dipekerjakan sepenuhnya untuk memproduksi berbagai barang dan jasa, hanya sebagian kecil dari keinginan manusia yang dapat dipenuhi. Jadi, kelangkaan sumber daya adalah alasan penting di balik masalah ekonomi di masyarakat manapun dan di negara manapun juga.

Pada dekade terakhir, para ekonom telah menganalisis sistem ekonomi dari perspektif yang luas. Para ekonom modern ini berbicara tentang tiga masalah utama perekonomian yaitu: (1) Apa yang diproduksi; (2) Bagaimana cara menghasilkan dan (3) Untuk siapa memproduksi. Singkatnya, ini disebut pertanyaan “Apa, Bagaimana, dan untuk Siapa”.

Pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh sistem ekonomi yaitu: Barang dan jasa apa yang harus diproduksi oleh masyarakat dan berapa jumlahnya? Pertanyaan ini muncul dari fakta bahwa keinginan manusia tidak terbatas, sementara sumber daya terbatas. Kepuasan keinginan manusia membutuhkan konsumsi barang dan jasa sementara manusia ingin mengkonsumsi barang dan jasa. Tetapi karena sumber daya terbatas sistem ekonomi tidak dapat menghasilkan semua jenis barang dan jasa.

Bahkan barang atau jasa tertentu pun tidak dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Hanya jumlah terbatas dari jumlah barang dan jasa yang dapat diproduksi. Oleh karena itu, muncullah masalah keputusan ini. Perekonomian harus memutuskan barang dan jasa mana yang akan diproduksi dan barang dan jasa mana yang harus dikeluarkan dari produksi. Perekonomian harus memilih rencana produksinya dengan hati-hati, mengingat segala sesuatu tidak dapat diproduksi dan bahkan hal-hal yang dihasilkan tidak dapat diproduksi dalam jumlah yang tidak terbatas.

Masalah kedua yang harus dipecahkan oleh setiap ekonomi adalah memutuskan bagaimana menghasilkan barang dan jasa (bahwa ekonomi memutuskan untuk memproduksi barang dan jasa). Sejumlah barang atau jasa tertentu dapat diproduksi dengan berbagai cara. Ekonomi harus memilih cara terbaik untuk menghasilkan jumlah barang yang ditentukan. Selain itu, ini harus dilakukan untuk masing-masing barang dan jasa yang berbeda yang ingin diproduksi oleh ekonomi.

Dalam bahasa para ekonom, cara tertentu menghasilkan barang atau jasa tertentu (atau sekumpulan barang dan jasa) disebut teknik

produksi. Misalnya dalam beberapa kasus, jumlah tertentu dari barang tertentu dapat diproduksi oleh kombinasi input produksi yang berbeda.

Misalnya untuk menghasilkan 10 ton gandum menggunakan 2 pilihan teknik produksi yaitu menggunakan 2 hektar lahan dengan jumlah pekerja sebanyak 5 orang atau menggunakan lahan seluas 4 hektar dengan pekerja sebanyak 2 orang. Di sini, ada dua teknik untuk memproduksi 10 ton gandum: (2 hektar lahan, 5 pekerja) dan (4 hektar lahan, 2 pekerja). Ekonomi yang telah memutuskan untuk memproduksi 10 ton gandum harus memilih antara dua teknik ini. Oleh karenanya, pertanyaan “bagaimana menghasilkan” juga dikenal sebagai masalah teknik pilihan.

Studi berikutnya, anggaplah sekarang bahwa dua masalah dasar pertama telah dipecahkan, yaitu ekonomi telah memutuskan jumlah produksi berbagai barang dan jasa dan juga telah memilih teknik yang tepat untuk memproduksinya. Masih ada masalah dalam memutuskan cara dimana barang dan jasa yang dihasilkan akan digunakan untuk memuaskan keinginan manusia.

Masalahnya yaitu, di antara anggota masyarakat, siapa yang akan menerima komoditas yang dihasilkan? Dengan kata lain, setelah komoditi diproduksi, masih ada tugas untuk memutuskan bagaimana produk atau komoditas tersebut didistribusikan. Siapa yang akan mengkonsumsi komoditas yang diproduksi? Ini dikenal sebagai pertanyaan: “Untuk siapa produk atau komoditas dihasilkan? Ini juga dikenal sebagai masalah distribusi atau pasar.

3. Ekonomi Mikro v.s Ekonomi Makro

Ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari satu unit sistem ekonomi. Bagaimana seorang individu (atau keluarga) memutuskan berapa banyak dari berbagai komoditas dan jasa untuk dikonsumsi? Bagaimana sebuah perusahaan bisnis memutuskan berapa banyak produk (atau produk) yang dihasilkannya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang dibahas dalam mikroekonomi. Penentuan pendapatan, pekerjaan, dll. Dalam sistem ekonomi secara keseluruhan bukanlah perhatian ekonomi mikro. Dengan demikian, mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai studi pengambilan keputusan ekonomi oleh unit mikro.

Kegunaan ekonomi mikro yaitu:

a. Penentuan pola permintaan:

Studi tentang ekonomi mikro memiliki beberapa kegunaan. Ini menentukan pola permintaan dalam ekonomi, yaitu, jumlah permintaan untuk barang dan jasa yang berbeda dalam ekonomi,

karena permintaan total untuk barang atau jasa adalah jumlah total dari tuntutan semua individu. Dengan demikian, dengan menentukan pola permintaan setiap individu atau keluarga, ekonomi mikro menentukan pola permintaan di negara secara keseluruhan.

b. Penentuan pola pasokan:

Dengan cara yang sama, pola pasokan di negara secara keseluruhan, dapat diperoleh dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam perekonomian. Ekonomi mikro, oleh karena itu, menentukan pola pasokan juga.

c. Harga:

Mungkin pertanyaan ekonomi yang paling penting adalah penentuan harga. Harga berbagai barang dan jasa menentukan pola alokasi sumber daya dalam perekonomian. Harga, pada gilirannya, ditentukan oleh interaksi kekuatan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Dengan menentukan permintaan dan penawaran, ekonomi mikro membantu kita dalam memahami proses penentuan harga dan, karenanya, proses penentuan alokasi sumber daya dalam masyarakat.

d. Kebijakan untuk peningkatan alokasi sumber daya:

Seperti yang sudah diketahui, pembangunan ekonomi menekankan perlunya meningkatkan pola alokasi sumber daya di negara tersebut. Dengan demikian, kebijakan pembangunan hanya dapat dirumuskan jika kita memahami bagaimana pola alokasi sumber daya ditentukan. Misalnya, jika kita ingin menganalisis bagaimana pajak atau subsidi akan mempengaruhi penggunaan sumber daya yang langka dalam perekonomian, kita harus tahu bagaimana ini akan mempengaruhi harga mereka. Dengan menjelaskan harga dan, karenanya, pola alokasi sumber daya, ekonomi mikro membantu kita untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat untuk ekonomi yang kurang berkembang.

e. Solusi untuk masalah unit mikro:

Akhirnya, tidak perlu dikatakan lagi, karena studi mikroekonomi dimulai dengan konsumen dan produsen individu, kebijakan untuk koreksi keputusan salah di tingkat mikro juga difasilitasi oleh ekonomi mikro.

Sebagai contoh, jika suatu perusahaan harus tahu persis apa yang harus dilakukan agar dapat berjalan secara efisien, ia harus mengetahui jumlah output optimal yang dihasilkan dan dari input yang dibeli. Hanya dengan demikian, setiap penyimpangan dari tingkat optimal ini dapat diperbaiki. Dalam pengertian ini, ekonomi mikro membantu perumusan kebijakan di tingkat mikro.

Di setiap masyarakat, masalah ekonomi yang dihadapi oleh agen ekonomi yang berbeda (seperti konsumen perorangan, produsen, dll.) Dapat dianalisis dengan bantuan teori mikroekonomi. Ini menunjukkan bahwa ekonomi adalah ilmu sosial yang bertujuan menganalisis perilaku ekonomi individu dalam lingkungan sosial.

Namun demikian, ekonomi mikro memiliki keterbatasan juga yaitu:

a. Kebijakan moneter dan fiskal:

meskipun permintaan total dan total pasokan dalam perekonomian adalah jumlah dari permintaan individu dan persediaan masing-masing, gambaran ekonomi total negara tidak dapat selalu dipahami dengan cara yang sederhana ini. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi total, yang berada di luar lingkup ekonomi mikro. Misalnya, peran kebijakan moneter dan fiskal dalam penentuan variabel ekonomi tidak dapat dianalisis sepenuhnya tanpa melampaui ekonomi mikro.

b. Penentuan pendapatan:

ekonomi mikro juga tidak memberi tahu kita apa pun tentang bagaimana pendapatan suatu negara (yaitu, pendapatan nasional) ditentukan.

c. Siklus bisnis:

Poin yang terkait adalah bahwa hal itu tidak menganalisis penyebab fluktuasi dalam pendapatan nasional. Naik-turunnya pendapatan nasional dari waktu ke waktu dikenal sebagai siklus bisnis. Ekonomi mikro tidak membantu kita memahami mengapa siklus ini terjadi dan apa pengobatannya.

d. Pengangguran:

Salah satu masalah ekonomi utama yang dihadapi oleh ekonomi seperti India adalah masalah pengangguran. Ini, sekali lagi, adalah salah satu bidang di mana ekonomi mikro tidak memberikan banyak cahaya. Karena, jika kita menemukan solusi untuk masalah pengangguran, kita harus terlebih dahulu memahami penyebab masalah ini. Untuk itu, pada gilirannya, kita harus mengerti bagaimana tingkat pekerjaan total dalam ekonomi ditentukan. Ini sulit dipahami dari dalam batas-batas ekonomi mikro.

Ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang berkaitan dengan besaran ekonomi yang berkaitan dengan sistem ekonomi secara keseluruhan, daripada unit mikroekonomi seperti individu atau perusahaan. Oleh karena itu, ini disebut 'ekonomi agregat'. Ekonomi makro merupakan studi yang sangat penting karena berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang tak tersentuh oleh ekonomi mikro. Oleh

karena itu, studi tentang ekonomi tidak lengkap, jika tidak mempelajari ekonomi makro. Beberapa isu penting yang dianalisis dalam ekonomi makro yaitu:

a. Penghasilan dan penentuan pekerjaan:

Dimana penentuan pendapatan nasional dan total lapangan kerja di negara merupakan keprihatinan penting ekonomi makro. Karena volume pengangguran hanyalah populasi dikurangi jumlah orang yang dipekerjakan, pengangguran ditentukan segera setelah tingkat ketenagakerjaan diketahui.

b. Tingkat harga:

Penentuan tingkat harga umum dibahas dalam teori ekonomi makro. Pergerakan ke atas dari tingkat harga umum dikenal sebagai inflasi. Jadi, jika kita ingin memahami proses inflasi dan menemukan cara untuk mengendalikannya, kita harus menggunakan studi ekonomi makro.

c. Siklus bisnis:

Ledakan ekonomi dan depresi di tingkat pendapatan dan pekerjaan mengikuti satu sama lain secara siklus. Sementara pendapatan naik dan pekerjaan meluas selama periode *boom*, mereka menyusut selama depresi. Karena depresi membawa kegagalan bisnis dan pengangguran di belakang mereka, para ekonom telah mencari solusi untuk depresi. Diskusi siklus bisnis pada umumnya dan kebijakan anti-depresi khususnya, termasuk dalam lingkup ekonomi makro.

d. Neraca pembayaran:

Teori neraca pembayaran juga merupakan bagian dari ekonomi makro. Perbedaan antara total aliran masuk dan total arus keluar valuta asing dikenal sebagai neraca pembayaran suatu negara. Ketika keseimbangan ini negatif (yaitu, arus keluar melebihi arus masuk), negara ini menghadapi banyak kesulitan ekonomi. Penyebab dan solusi masalah neraca pembayaran tersebut dibahas dalam ekonomi makro.

e. Kebijakan pemerintah:

Efek dari berbagai kebijakan pemerintah pada variabel ekonomi seperti pendapatan nasional atau tingkat harga umum juga dipelajari dalam ekonomi makro. Perlu dicatat bahwa, kita berbicara tentang dampak ekonomi makro dari kebijakan pemerintah. Efek dari kebijakan ini pada unit mikro (misalnya, efek pajak pada output dari sebuah perusahaan individual), adalah subyek ekonomi mikro. Karena, pemerintah menempati posisi penting dalam setiap sistem ekonomi modern, analisis efek ini sangat penting.

f. Keterkaitan antar pasar:

Mungkin, kontribusi yang paling penting dari teori ekonomi makro adalah untuk menunjukkan bahwa pasar yang berbeda dari sistem ekonomi (misalnya, pasar komoditas, pasar tenaga kerja, pasar obligasi, pasar uang, dll.) Saling terkait. Setiap gangguan di salah satu pasar ini memengaruhi semua yang lain. (Sekali lagi, perlu dicatat bahwa ini adalah hubungan timbal balik antara pasar ekonomi makro yang sedang kita bicarakan di sini.

Hubungan antara pasar komoditas individual adalah subyek 'teori kesetimbangan umum', yang merupakan bagian dari ekonomi mikro). Dengan demikian, kita melihat bahwa studi ekonomi mikro dan ekonomi makro saling melengkapi satu sama lain. Keterbatasan ekonomi mikro ditutupi oleh ekonomi makro. Di sisi lain, ekonomi makro tidak membuat studi rinci tentang konsumen atau produsen individual. Ini diurus oleh ekonomi mikro. Seseorang dapat berharap untuk membentuk gagasan komprehensif tentang apa ekonomi hanya tentang ketika seseorang mengenal baik ekonomi mikro dan ekonomi makro.

Sedangkan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro dapat ditunjukkan pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.1: Perbedaan Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

EKONOMI MIKRO	EKONOMI MAKRO
Merupakan cabang ekonomi yang berurusan dengan pengambilan keputusan ekonomi dari pelaku ekonomi individu seperti produsen dan konsumen.	Merupakan cabang ekonomi yang berurusan dengan agregat dan rata-rata dari seluruh ekonomi, misalnya, output agregat, pendapatan nasional, tabungan agregat dan investasi.
Memperhitungkan komponen kecil dari keseluruhan ekonomi.	Mempertimbangkan ekonomi negara manapun secara keseluruhan.
Terkait dengan proses penentuan harga produk secara individual dan faktor produksi.	Berhubungan dengan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian.
Dikenal sebagai teori harga (karena menjelaskan proses alokasi sumber daya ekonomi atau faktor produksi di sepanjang garis alternatif produksi atas dasar harga relatif	Dikenal dengan teori pendapatan (karena menjelaskan perubahan tingkat pendapatan nasional dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu).

berbagai barang dan jasa).	
Berkaitan dengan sasaran pengoptimalan konsumen dan produsen secara individual (misalnya, konsumen perorangan adalah pemaksimalan utilitas, sementara produsen individual adalah pencari keuntungan).	Berkaitan dengan optimalisasi proses pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada suatu negara tertentu.
Mempelajari aliran sumber daya ekonomi atau faktor produksi dari pemilik individu sumber daya tersebut untuk setiap pengguna individu sumber daya ini dalam suatu perekonomian.	Mempelajari aliran pendapatan dan pengeluaran sirkular antara berbagai sektor ekonomi (misalnya, antara sektor perusahaan dalam bentuk investasi dan sektor rumah tangga dalam bentuk konsumsi).

Sumber: Dikembangkan dari berbagai sumber

Tabel di atas menjelaskan bahwa ditinjau dari aspek pelaku ekonomi, pada ekonomi mikro pelaku ekonominya yaitu individu perusahaan atau produsen dan individu konsumen. Produsen dan konsumen ini kemudian berinteraksi di pasar sehingga akan terbentuklah kuantitas dan harga keseimbangan, yaitu harga dan kuantitas yang disepakati oleh kedua belah pihak konsumen dan produsen. Sedangkan pelaku ekonomi makro yaitu agregatif yang mempertimbangkan kepentingan secara nasional. Di ekonomi makro, pelaku ekonomi tidak saja produsen dan konsumen, tetapi disana ada unsur pemerintah dengan berbagai macam kebijakannya, unsur perbankan serta unsur luar negeri dengan perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor.

Komponen yang dibahas pada ekonomi mikro dalam skala kecil yaitu penentuan harga dan kuantitas keseimbangan, sedangkan di ekonomi makro mempertimbangkan ekonomi negara khususnya terkait pendapatan nasional keseimbangan. Penghitungan pendapatan nasional dapat menggunakan pendekatan dua sektor, tiga sektor dan empat sektor bergantung pada pelaku ekonomi yang dilibatkan.

Di ekonomi mikro hanya membahas tentang keseimbangan harga atas suatu produk tertentu, sedangkan ekonomi makro membahas tentang harga produk secara menyeluruh, sehingga di ekonomi mikro dikenal istilah inflasi, indeks harga konsumen dan indeks harga produsen. Karena tujuan ekonomi mikro yaitu untuk menghitung harga dan kuantitas keseimbangan, maka ekonomi mikro identik dengan teori

harga. Sedangkan ekonomi makro berorientasi pada pendapatan nasional keseimbangan, maka lebih dikenal dengan istilah teori pendapatan nasional.

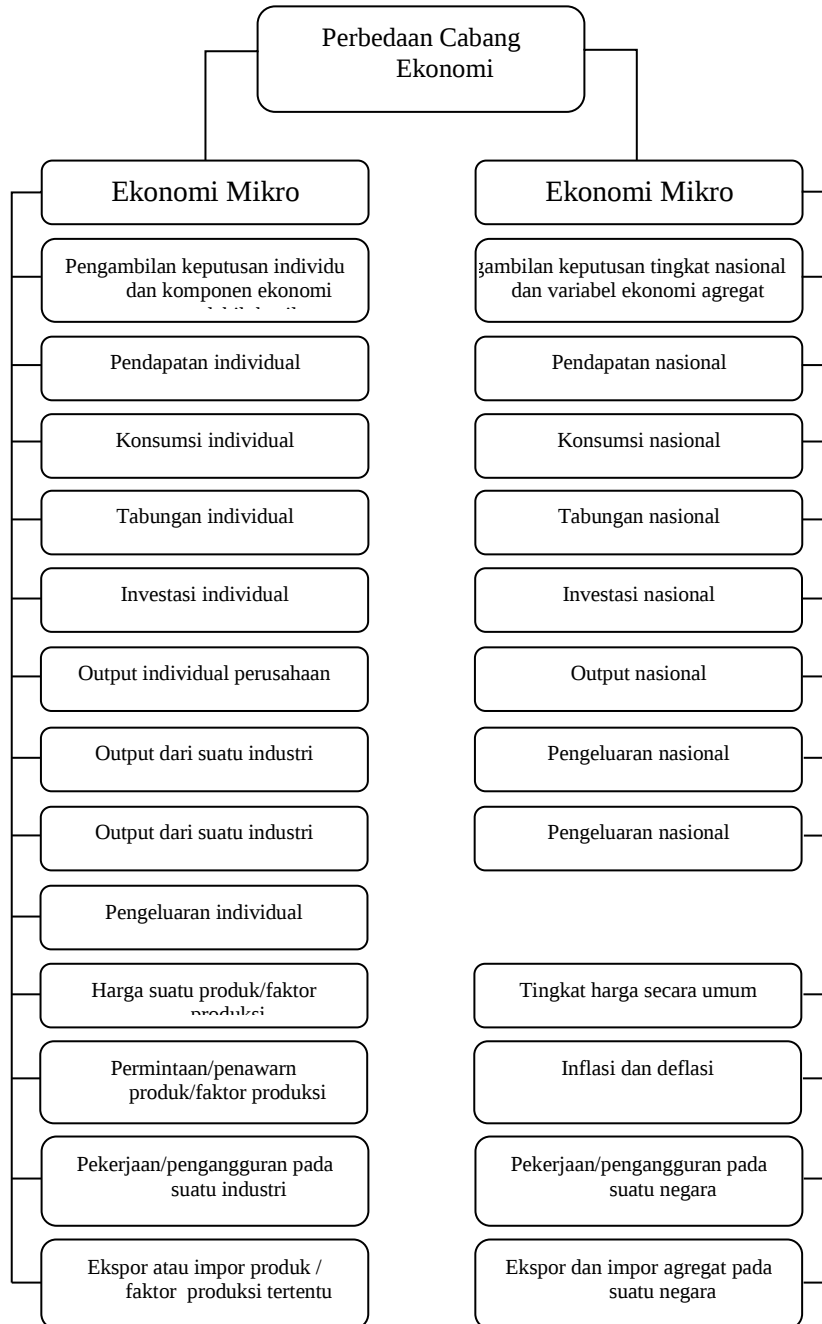
Ekonomi mikro mengkaji tentang optimalisasi pelaku-pelaku ekonomi secara individu misalnya optimalisasi nilai guna bagi konsumen, dan bagi produsen dalam rangka mencapai optimalisasi keuntungan usaha. Ekonomi makro berorientasi pada optimalisasi pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan suatu negara dalam satu tahun tertentu (perhatikan gambar 2.1).

Aliran penggunaan sumberdaya atau sumber ekonomi atau faktor produksi atau faktor-faktor ekonomi masih sangat sederhana untuk ekonomi mikro, yaitu terbatas pada penggunaan faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja, uang, modal, sumberdaya alam dalam rangka menghasilkan produk untuk ditransaksikan atau dijual di pasar. Sedangkan ekonomi makro membahas tentang aliran atau sirkulasi input dan output produksi yang dikenak dengan istilah aliran melingkar pendapatan nasional. Pembahasan tentang aliran melingkar pendapatan nasional ini dibuat dalam bentuk grafik dan disajikan pada gambar 2.2.

4. Aliran Melingkar Pendapatan

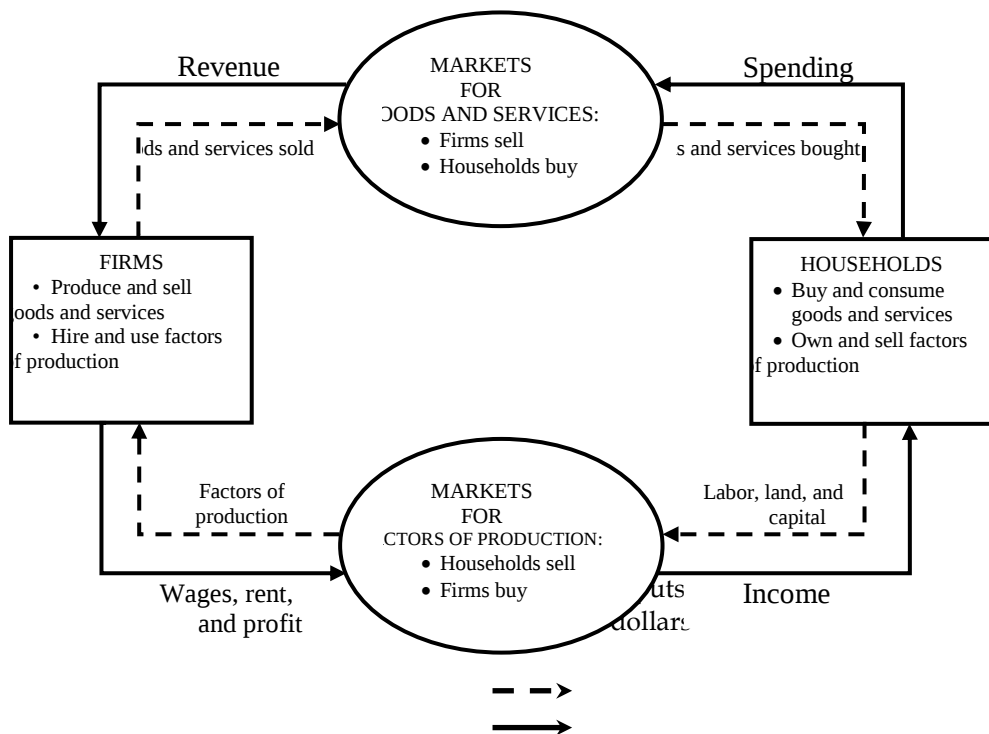
Paradigma tentang aliran melingkar pendapatan sebenarnya terkait dengan dua hal yaitu penerimaan (*revenue*) dan pembayaran (*spending*). Terhadap aktivitas pelaku ekonomi misalnya, jika sektor rumah tangga mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli kebutuhan hidupnya di pasar, maka rumah tangga tentu akan mendapatkan barang atau jasa yang dibelinya. Namun demikian hakekatnya, pengeluaran sector rumah tangga ini menjadi pendapatan atau penerimaan bagi perusahaan (*firms*), begitu seterusnya.

Gambar 2.1: Perbedaan Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro



Sumber: Dikembangkan dari berbagai sumber

Gambar 2.2: Aliran Melingkar Pendapatan



Sumber: Dikembangkan dari berbagai sumber

Seperti dijelaskan di awal sub bab ini bahwa pembayaran bagi individu menjadi pendapatan bagi individu lainnya dalam suatu perekonomian. Individu yang dimaksud bisa individu rumah tangga maupun individu pelaku ekonomi lainnya. Gambar 2.2 di atas juga menjelaskan bahwa suatu perusahaan (*firms*) memerlukan sumberdaya atau faktor-faktor produksi atau input produksi untuk menghasilkan output produksi (barang dan jasa).

Input produksi ini yaitu tenaga kerja (*man*), uang (*money*), mesin (*mechine*), sumberdaya alam (*material*) dan kewirausahaan (*managerial*). Tenaga kerja, merupakan orang yang bekerja untuk bisnis, dari manajer sampai supervisor, wiraniaga, buruh pabrik, dan karyawan lainnya yang menjadi input produksi. Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bekerja di entitasnya ini disediakan oleh sektor rumah tangga, sehingga balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja ini disebut upah. Jadi perusahaan menerima tenaga kerja dan implikasinya perusahaan diharuskan untuk membayar sejumlah uang sebagai upahnya.

Uang merupakan dana yang diperlukan untuk membiayai operasi bisnis. Investasi oleh pemilik atau pemegang saham, pinjaman bank atau

keuntungan yang ditahan perusahaan digunakan untuk membeli bahan baku, bahan pembantu, menggaji pegawai, membeli mesin dan membangun pabrik baru yang juga menjadi input produksi. Terkait dengan penerbitan saham perusahaan, hal ini terjadi ketika perusahaan membutuhkan dana segar untuk membiayai operasional perusahaannya, misalnya untuk perluasan usaha. Saham ini dijual atau ditawarkan di pasar saham (di Indonesia Bursa Efek Indonesia) kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat yang membeli saham (pemegang saham) tersebut mendapatkan keuntungan per lembar saham (*earning per share*). Keuntungan inilah merupakan balas jasa perusahaan kepada pemegang saham.

Sumberdaya alam merupakan bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi. Sumberdaya alam, seperti tanah pertanian atau dalam konteks industri seperti bahan mentah dan komponen lain yang langsung diolah dalam proses manufaktur dan menjadi input produksi perusahaan. Pada kasus-kasus tertentu, perusahaan menyewa sumberdaya alam yang dimiliki oleh rumah tangga, bahkan sumberdaya alam yang dimiliki oleh pemerintah (misalnya pegunungan di wilayah Timika Papua). Pegunungan di wilayah tersebut dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat Freeport, dan kompensasi yang diberikan oleh Freeport kepada pemerintah Indonesia dalam bentuk uang sewa atau dikenal dengan istilah Royalty.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait⁴⁰. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2003, royalti ini disebut juga dengan iuran eksplorasi/iuran eksploitasi⁴¹. Pengertian royalti ini dalam praktiknya tidak saja terkait dengan Ciptaan, tetapi juga terkait dengan penggunaan property dan lain-lain. Sehingga definisi Royalty dapat diperluas yaitu jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, atau sumberdaya alam misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual, penulis memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisnya dijual, pemilik tanah menyewakan tanahnya ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan akan memperoleh royalti atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan dan tanah tersebut.

⁴⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, UU RI Nomor 28/2014 Tentang Hak Cipta.

⁴¹ Kesekretariatan Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 45/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Mesin hakekatnya merupakan material namun disebut material tidak langsung karena tidak diolah namun digunakan untuk mengolah sumberdaya alam. Misalnya bangunan pabrik, perlengkapan produksi dan mesin manufakturing. Sedangkan managerial merupakan kemampuan entrepreneurship yang dikembangkan oleh pemilik perusahaan, seperti pengambilan keputusan yang meminimalisir risiko dan cara pengelolaan bisnis lainnya. Entrepreneur atau orang yang memiliki jiwa wirausaha dapat mengelola perusahaan langsung secara langsung atau bisa mempekerjakan manajer-manajer untuk mengoperasikan bisnis atas namanya.

Managerial atau entrepreneurship ini juga digolongkan dalam input produksi, dan balas jasa yang diterima oleh entrepreneur jika mereka sekaligus sebagai pemilik perusahaan yaitu keuntungan. Namun jika mereka bekerja pada suatu perusahaan, balas jasa yang diberikan perusahaan kepada seorang entrepreneur disebut upah. Aliran melingkar pendapatan ini tidak saja didasarkan pada grafik 2.2, namun demikian bisa diperluas berdasar kajian makroekonominya. Jika sudah membahas tentang perdagangan luar negeri serta masuknya perbankan sebagai sumber pendanaan, aliran melingkar pendapatan tentunya mengalami adaptasi sebagaimana dijelaskan dalam grafik 2.3 berikut ini.

Aliran melingkar pendapatan yang lebih luas sebagaimana dikemukakan oleh Sukirno dalam grafik 2.3 dan terbagi dalam 10 aliran, dengan pendekatan pendapatan dan pengeluaran atau pembayaran. Menurut pendekatan pendapatan, pada aliran 1 rumah tangga memperoleh pendapatan atas penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan dalam bentuk gaji atau upah, sewa, bunga dan keuntungan. Menurut Sukirno, pembayaran oleh sektor perusahaan dibedakan menjadi dua jenis, pertama pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Kedua pendapatan yang diterima sektor rumah tangga berasal dari dua sumber yaitu: dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah⁴².

Aliran 2, pemerintah menerima pajak dari perusahaan, baik pajak yang bersifat otonom maupun pajak yang bersifat tetap dan biasanya disebut dengan pajak korporasi. Aliran 3, pemerintah menerima pajak individu dari sektor rumah tangga. Aliran 4, sektor perusahaan menerima pendapatan atas produk yang dihasilkan dan dibeli oleh

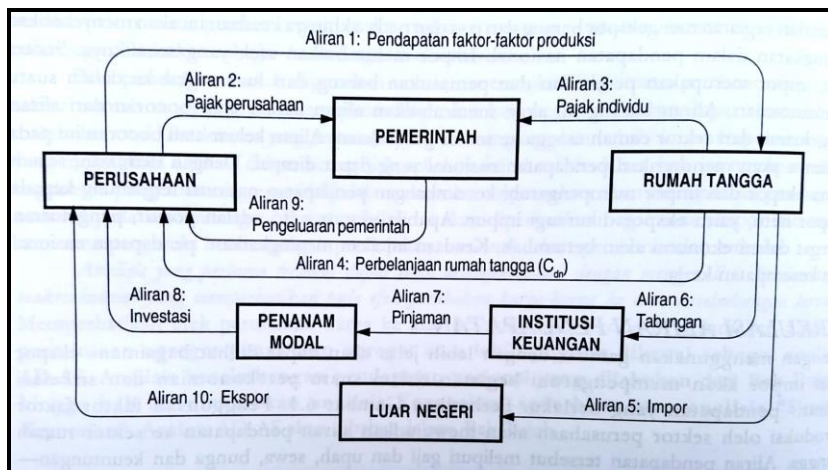
⁴² Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, pp. 151.

sektor rumah tangga. Aliran 5, sektor luar negeri yaitu perusahaan-perusahaan di luar negeri memperoleh pendapatan karena sektor rumah tangga membeli produknya. Aliran 6, institusi keuangan baik dalam bentuk bank maupun non bank seperti pegadaian, asuransi dan lain sebagainya menerima pendapatan dari sektor rumah tangga karena sektor ini memanfaatkan fasilitas jasa dari lembaga keuangan.

Aliran 7, penanam modal atau investor memperoleh pendapatan dari institusi keuangan yang meminjamkan sejumlah uang kepada penanam modal. Aliran 8, perusahaan memperoleh pendapatan dari penanam modal, bisa melalui aktivitas jual beli saham perusahaan. Aliran 9, perusahaan memperoleh pendapatan dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung khususnya terkait perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah karena memang pemilim saham mayoritas perusahaan-perusahaan ini yaitu pemerintah. Secara tidak langsung perusahaan menerima pendapatan dari pemerintah karena pemerintah memberi fasilitas sarana prasarana seperti jalan, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya. Aliran 10, perusahaan menerima pendapatan dari sektor luar negeri sebagai implikasi terjadinya perdagangan luar negeri dalam bentuk ekspor.

Sedangkan menurut pendekatan pengeluaran atau pembayaran, untuk aliran 1 berangkat dari perusahaan, dimana perusahaan membayarkan sejumlah uang kepada rumah tangga dalam bentuk gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan. Aliran 2, perusahaan membayar kewajibannya kepada pemerintah dalam bentuk pajak perseroan. Aliran 3, rumah tangga membayar pajak individu kepada pemerintah. Aliran 4, rumah tangga membayar sejumlah uang dalam bentuk pembelian barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan. Aliran 5, rumah tangga membayar sejumlah uang untuk mengimpor barang dan jasa dari luar negeri. Aliran 6, rumah tangga membayar sejumlah uang kepada institusi keuangan dalam bentuk tabungan kalau bank, polis kalau perusahaan asuransi dan lain sebagainya.

Gambar 2.3: Aliran Melingkar Pendapatan Empat Sektor



Sumber: Sadono Sukirno⁴³

Aliran 7, institusi keuangan meminjamkan uang kepada investor untuk perluasan usaha. Aliran 8, penanam modal atau investor membayar sejumlah uang kepada perusahaan dalam bentuk pembelian saham. Aliran 9, pemerintah memberikan modal dan sarana prasarana kepada perusahaan, serta aliran 10, sektor luar negeri membayar sejumlah uang kepada perusahaan karena perusahaan melakukan perdagangan luar negeri dalam bentuk ekspor.

5. Hakekat *Gross Domestic Product* (GDP)

GDP adalah total nilai pasar barang serta jasa akhir yang dihasilkan negara selama tahun berjalan. GDP sama dengan total konsumsi dan barang investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. GDP adalah ukuran paling komprehensif dari total output barang dan jasa suatu negara. Ini adalah jumlah nilai konsumsi (C), investasi bruto (I), pembelian barang dan jasa pemerintah (G), dan ekspor neto (X) yang diproduksi dalam suatu negara selama satu tahun tertentu. GDP digunakan untuk banyak tujuan, tetapi yang paling penting adalah mengukur keseluruhan kinerja ekonomi⁴⁴. GDP adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah geografis tertentu

⁴³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi*, 2010, pp. 204.

⁴⁴ Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics*, The McGraw-Hill Irwin, 2010, pp. 386-387.

(biasanya suatu negara) dalam interval waktu tertentu (seringkali setahun)⁴⁵.

Menurut pemikiran di atas, GDP memiliki dua makna yaitu makna bahwa GDP merupakan total produk yang meliputi barang serta jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tahun tertentu. Makna lainnya bahwa GDP merupakan total barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian dari hasil konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X) dan impor (M). Semakin banyak konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor akan mendorong peningkatan dalam hal GDP. Semakin tinggi impor maka GDP akan semakin berkurang karena impor merupakan belanja luar negeri yang dapat mengurangi GDP suatu negara.

GDP sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari seberapa baik kinerja perekonomian. Tujuan dari GDP adalah untuk meringkas semua data ini dengan satu angka yang mewakili nilai dolar dari kegiatan ekonomi dalam suatu periode waktu tertentu⁴⁶. Benar atau salah, GDP telah menjadi standar untuk mengukur tingkat kesehatan suatu negara walaupun terbatas pada domain material⁴⁷.

GDP merupakan ukuran moneter dari nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu (triwulanan atau tahunan). Sebagai ukuran keseluruhan produksi, GDP sama dengan jumlah nilai bruto yang ditambahkan dari semua unit penduduk dan institusi yang terlibat dalam produksi (ditambah pajak, dan dikurangi subsidi apapun).

Menurut Moyer, GDP adalah salah satu statistik ekonomi yang paling komprehensif dan teramati serta digunakan oleh Gedung Putih dan Kongres untuk menyiapkan anggaran Federal, oleh Federal Reserve untuk merumuskan kebijakan moneter, oleh Wall Street sebagai indikator kegiatan ekonomi, dan oleh masyarakat bisnis untuk menyusun prakiraan kinerja ekonomi itu memberikan dasar untuk perencanaan produksi, investasi, dan ketenagakerjaan. Dengan demikian GDP merupakan ukuran utama output ekonomi⁴⁸.

⁴⁵ Edward E. Leamer, *Macroeconomic Patterns and Stories: a Guide for MBAs*, New York: Springer, 2009.

⁴⁶ N . Gregory Mankiw, *Macroeconomics*, New York: Worth Publishers, 2010, pp. 18.

⁴⁷ Edward E. Leamer, *Macroeconomic Patterns and Stories: a Guide for MBAs*, New York: Springer, 2009.

⁴⁸ Brian C. Moyer, *Measuring the Economy A Primer on GDP and the National Income and Product Accounts*, Bureau Of Economic Analysis U.S. Department Of Commerce, December 2015, pp. 1.

GDP mengukur total pendapatan setiap orang dalam perekonomian. GDP juga mengukur total pengeluaran untuk output barang dan jasa ekonomi⁴⁹. GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Definisi ini memiliki empat bagian yaitu: (1) nilai pasar; (2) barang dan jasa akhir; (3) diproduksi dalam suatu Negara dan (4) dalam jangka waktu tertentu. *Pertama*, Nilai pasar. Bahwa GDP adalah nilai pasar-barang dan jasa dinilai dengan harga pasarnya. Untuk menambahkan apel dan jeruk, komputer dan popcorn, kita menambahkan nilai pasar sehingga kita memiliki nilai total output dalam dolar. *Kedua*, GDP adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan, bahwa barang dan jasa akhir yaitu barang yang dibeli oleh pengguna terakhir selama jangka waktu tertentu. Sebuah barang bagus kontras dengan barang antara, yang merupakan barang yang diproduksi oleh satu perusahaan, dibeli oleh perusahaan lain, dan digunakan sebagai komponen dari barang atau jasa akhir. Tidak termasuk barang dan jasa perantara menghindari penghitungan ganda. *Ketiga*, diproduksi dalam suatu negara, bahwa GDP mengukur produksi dalam produksi dalam suatu negara. *Keempat*, dalam periode waktu tertentu, bahwa GDP mengukur produksi selama periode waktu tertentu, biasanya setahun atau seperempat tahun.

6. Cara Menghitung GDP

Sebelum membahas tentang teknik penghitungan GDP, terlebih dahulu akan diulas mengenai komponen-komponen dari GDP. Menurut Leamer komponen GDP yaitu jumlah nilai konsumsi (C), investasi bruto (I), pembelian barang dan jasa pemerintah (G), dan ekspor neto (X) yang diproduksi dalam suatu negara selama satu tahun tertentu⁵⁰. Waluyo menjelaskan bahwa komponen GDP meliputi: barang dan jasa yang dikonsumsi yang dihasilkan guna pembelian pihak swasta (C), barang-barang investasi yang dihasilkan guna pembelian pihak swasta (I), konsumsi kedua jenis tersebut yang dihasilkan guna pembelian pemerintah dalam perekonomian yang bersangkutan (G)⁵¹.

Konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang mencakup pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama, seperti kendaraan dan perlengkapan, dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Jasa mencakup barang yang

⁴⁹ Wyatt Brooks, *Lecture 1: Gross Domestic Product*, <https://www3.nd.edu/~wbrooks/SyllabusS14.pdf>, 2014, pp. 3.

⁵⁰ Edward E. Leamer, *Macroeconomic Patterns*, 2009.

⁵¹ Dwi Eko Waluyo, *Ekonomika Makro*, Malang: UMM Press, 2009, pp. 16.

tidak berwujud konkrit, seperti poting rambut dan perawatan kesehatan. Pembelanjaan rumah tangga atas pendidikan juga dimasukkan sebagai konsumsi jasa (walaupun seseorang dapat saja berpendapat bahwa hal tersebut lebih cocok berada di komponen selanjutnya)⁵².

Secara matematis, konsumsi terkait dengan tabungan yang dapat dijelaskan menggunakan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Sukirno menjelaskan bahwa fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (atau pendapatan disposebel) perekonomian tersebut. Sedangkan fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan diantara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (atau pendapatan disposebel) perekonomian tersebut⁵³. Berikut ini dikemukakan tentang persamaan konsumsi dan tabungan.

Fungsi konsumsi: $C = a + bY$

Fungsi tabungan: $S = -a + (1-b)Y$

keterangan:

C adalah konsumsi rumah tangga dalam satuan unit uang;

S adalah tabungan rumah tangga dalam satuan unit uang;

a adalah besarnya konsumsi ketika $Y = 0$ dalam satuan unit uang;

-a adalah besarnya tabungan ketika $Y = 0$ dalam satuan unit uang;

b adalah kecenderungan mengkonsumsi rumah tangga dalam satuan unit %;

1-b adalah kecenderungan menabung rumah tangga dalam satuan unit %

Y adalah pendapatan nasional dalam satuan unit uang.

Selanjutnya Sukirno menjelaskan, kecenderungan mengkonsumsi (b) = MPC (*marginal propensity to consume*) adalah perbandingan diantara pertambahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposebel (ΔY_d). MPC diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y_d}$$

⁵² N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics Pengantar Ekonomi Makro*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, pp. 12.

⁵³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, pp. 101-102.

Kecenderungan menabung $(1-b) = \text{MPS}$ (*marginal propensity to save*) adalah perbandingan diantara pertambahan tabungan (ΔS) yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposebel (ΔY_d). MPS diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$\text{MPS} = \frac{\Delta S}{\Delta Y_d}$$

Sedangkan pendapatan disposebel (Y_d) adalah konsumsi rumah tangga ditambah dengan tabungan rumah tangga. $Y_d = C + S$ ⁵⁴

Investasi adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Investasi adalah jumlah dari pembelian peralatan modal, persediaan, dan bangunan atau struktur. Investasi pada bangunan mencakup pengeluaran untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Menurut kesepakatan bersama, pembelian tempat tinggal baru merupakan satu bentuk pembelanjaan rumah tangga yang dikategorikan sebagai investasi dan bukan sebagai konsumsi⁵⁵.

Secara matematis, untuk menjelaskan investasi dibedakan menjadi dua yaitu investasi otonom dan investasi terpengaruh. Disebut investasi otonom karena pembentukan modal yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, yang biasanya dinotasikan dengan I_0 . Sedangkan investasi terpengaruh yaitu meningkatnya investasi sebagai akibat dari penambahan nilai pendapatan nasional.

Sedangkan faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi yaitu: (1) tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh; (2) tingkat bunga; (3) ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan; (4) kemajuan teknologi; (5) tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya serta (6) keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan⁵⁶.

Aspek belanja negara terdiri dari pembelanjaan dalam bentuk barang maupun jasa oleh negara baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu kabupaten kota yang meliputi gaji pegawai negeri dan pembelanjaan untuk kepentingan umum lainnya. Akhir-akhir ini, akuntan pendapatan nasional Amerika Serikat telah mengganti istilah belanja pemerintah dengan istilah yang lebih panjang, yaitu "pengeluaran pemerintah untuk konsumsi dan investasi bruto"⁵⁷. Khusus untuk komponen GDP yaitu belanja pemerintah ini selanjutnya

⁵⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori*, 1995, pp. 94-98.

⁵⁵ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, 2006, pp. 12.

⁵⁶ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori*, 1995, pp. 109.

⁵⁷ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, 2006, pp. 12.

akan diurai lebih mendalam di bagian hakekat pengeluaran pemerintah pada pembahasan berikutnya.

Ekspor netto dihasilkan dari pengurangan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara pada suatu tahun penghitungan. Negara selalu berorientasi untuk meningkatkan nilai ekspor nettonya, karena dengan ekspor netto yang tinggi maka suatu negara memiliki kelaluasaan dalam mengalokasikan APBN. Ekspor netto yang positif ini menjadi kekuatan negara dalam bidang ekonomi. Jadi ketika rumah tangga, perusahaan dalam negeri, atau pemerintah membeli sebuah barang atau jasa dari luar negeri, pembelian tersebut mengurangi ekspor netto. Namun karena pembelian ini juga meningkatkan konsumsi, investasi atau belanja pemerintah, pembelian ini tidak mempengaruhi GDP⁵⁸.

Sederhananya, ekspor netto (X_n) sama dengan nilai ekspor (X) dikurangi nilai impor (M). Hal ini relevan dengan teori Samuelson dan Nordhaus yang menjelaskan bahwa ekspor netto merupakan perbedaan antara ekspor dan impor barang dan jasa⁵⁹. Sukirno mendefinisikan, ekspor netto adalah nilai ekspor yang dilakukan sesuatu Negara dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama. Ekspor sesuatu negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Oleh sebab itu nilainya harus dihitung ke dalam pendapatan nasional. Barang impor merupakan produksi dari negara lain, oleh sebab itu sebenarnya tidak perlu dihitung ke dalam pendapatan nasional⁶⁰.

Pentingnya ekspor bagi suatu negara, karena memang nilai ekspor ini akan menambah devisa bagi negara. Peningkatan nilai devisa⁶¹ ini dapat mendorong kinerja ekonomi suatu negara, dan akan memperkuat nilai tukar mata uang terhadap nilai mata uang negara lainnya. Banyak upaya yang ditempuh untuk meningkatkan nilai ekspor antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan promosi perdagangan di luar negeri. Sedangkan impor yang tinggi berarti banyak devisa yang ke luar negeri, karena suatu negara melakukan kegiatan belanja ke luar negeri.

Pembahasan tentang *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) cakupan kajiannya pada tingkat nasional secara menyeluruh. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB atau GDRP) pada tingkat daerah atau regional (kota/kabupaten/provinsi).

⁵⁸ N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, 2006, pp. 13.

⁵⁹ Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, *Economics*, 2010, pp. 396.

⁶⁰ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori*, 1995, pp. 39.

⁶¹ Devisa merupakan semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi jual beli dengan luar negeri yang diterima dan diakui secara uas oleh dunia internasional. Yang biasanya banyak dijadikan devisa saat ini adalah dollar Amerika Serikat (US\$).

Namun demikian GDP maupun GDRP ini sama-sama menginterpretasikan tentang kemampuan suatu Negara atau wilayah regional tertentu dalam menghasilkan nilai tambah dari aktivitas produksi sector-sektor ekonominya. Secara umum untuk menghitung PDB dan PDRB atau GDP dan GDRP ini menggunakan 2 cara yaitu pengeluaran dan lapangan usaha⁶².

7. Hakekat Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government spending* atau *expenditure*) mencakup semua konsumsi pemerintah, investasi, dan pembayaran transfer yang dapat dibiayai oleh pinjaman pemerintah, *seigniorage*, atau pajak. Perubahan pengeluaran pemerintah merupakan komponen utama kebijakan fiskal yang digunakan untuk menstabilkan siklus bisnis ekonomi makro⁶³.

Lebih lanjut Hasan, mendefinisikan bahwa Seigniorage mengacu pada setiap keuntungan yang dihasilkan dari pengeluaran mata uang tertentu. Seigniorage pada dasarnya adalah keuntungan yang dibuat oleh suatu negara dari penggunaan awal uang fiat. Sebagai penerbit mata uang, suatu negara mendapat keuntungan yang dihasilkan dari perbedaan nilai biaya produksi dan nilai nominal yang tertera pada uang.

Disisi lain, untuk mendapatkan uang, warga harus bekerja keras dan menghabiskan waktu. Akibatnya, tampaknya ada kesenjangan antara apa yang didapatkan oleh warga dan keuntungan yang dihasilkan pemerintah. Berdasar fenomena ini, Islam menuntut keseimbangan dan keadilan dalam segala bentuk fenomena ekonomi, termasuk produksi mata uang⁶⁴.

Menurut Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Sementara belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian atau lembaga (K/L) serta belanja non K/L antara lain dalam bentuk pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja lain-lain. Sementara transfer ke daerah diwujudkan dalam bentuk bagi hasil dan

⁶² Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2017, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017, hlm. 601.

⁶³ Roberto Barro and Vittorio Grilli, *European Macroeconomics*, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1994.

⁶⁴ Asyari Hasan, Seigniorage dalam Perspektif Moneter Islam, *JURIS*, Volume 14, Nomor 1, 2015, pp. 86.

dana alokasi umum⁶⁵. Sebagai gambaran, berikut ini potret Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2018.

Gambar 2.4: Postur APBN Indonesia 2018

Uraian (triliun Rupiah)	2017 Outlook	2018 APBN	% thd Outlook 2017	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736,1	1.894,7	109,1	158,7
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.733,0	1.893,5	109,3	160,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472,7	1.618,1	109,9	145,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,2	275,4	105,8	15,2
II. PENERIMAAN HIBAH	3,1	1,2	38,5	(1,9)
B. BELANJA NEGARA	2.098,9	2.220,7	105,8	121,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.343,1	1.454,5	108,3	111,4
1. Belanja K/L	769,2	847,4	110,2	78,2
2. Belanja Non K/L	573,9	607,1	105,8	33,2
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	218,6	238,6	109,2	20,0
b. Subsidi	168,9	156,2	92,5	(12,6)
c. Belanja Lain-lain	56,0	67,2	120,1	11,2
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	755,9	766,2	101,4	10,3
1. Transfer ke Daerah	697,7	706,2	101,2	8,5
a.l. a. Dana Bagi Hasil	95,4	89,2	93,5	(6,2)
b. Dana Alokasi Umum	398,6	401,5	100,7	2,9
2. Dana Desa	58,2	60,0	103,1	1,8
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(144,3)	(87,3)	60,5	57,0

Sumber: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (2018)

Berdasar gambar di atas dapat dikemukakan bahwa secara umum belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Hal ini relevan dengan penelitian Rojanica bahwa di bidang keuangan publik, masalah hubungan potensial antara pendapatan pemerintah dan pengeluaran pemerintah telah sangat menarik perhatian para pembuat kebijakan. Di satu sisi, kebutuhan untuk investasi pemerintah terus meningkat, terutama di negara-negara berkembang, sementara, di sisi lain, akses ke pendapatan pemerintah yang tinggi melalui pengumpulan pajak menghadirkan kesulitan konstan karena rendahnya pendapatan per kapita di negara-negara ini. Karakteristik utama dari studi empiris yang dilakukan pada topik ini adalah bahwa mereka telah dilakukan baik di negara maju dan berkembang dan hasilnya berbeda. Salah satu alasan inkonsistensi hasil penelitian bahwa pendekatan yang berbeda telah diterapkan dalam pemeriksaan hubungan ini. Ketidakeimbangan ekonomi makro utama di Republik Serbia sebagian besar dikondisikan oleh peningkatan pangsa defisit fiskal dalam GDP. Defisit fiskal adalah hasil dari belanja publik yang tinggi dan hubungan yang tidak harmonis

⁶⁵ Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2018: Pemantapan pengelolaan fiskal untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan*, Jakarta: kementerian Keuangan RI, 2018, pp. 6.

antara pertumbuhan upah riil dan produk domestik bruto. Efek dari defisit anggaran yang telah hadir untuk jangka waktu yang panjang memuncak pada tahun 2009, ketika mencapai 3,4% dan melebihi nilai yang ditentukan oleh kriteria Maastricht. Yakni, pertumbuhan defisit anggaran yang terus-menerus merupakan sumber ketidakstabilan dan secara serius membahayakan fungsi keuangan publik dalam perekonomian Serbia. Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa ketika pengeluaran pemerintah meningkat, pendapatan pemerintah juga harus mengikuti tren itu, yang berarti peningkatan tarif pajak. Hal ini akan menyebabkan memburuknya suasana ekonomi makro dengan mempertimbangkan bahwa sangat sulit untuk mengumpulkan pajak di Serbia, sehingga rekomendasi dasar bagi pembuat kebijakan adalah untuk mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran⁶⁶.

8. Anggaran Pendidikan

Anggaran merupakan serangkaian rencana keuangan yang disusun secara rutin baik oleh pemerintah maupun perusahaan-perusahaan untuk membiayai agenda kegiatan yang disahkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang. Anggaran yang disusun dalam satuan unit uang, besarnya sangat bergantung pada tingkat kepentingan suatu komponen yang menjadi objek pembiayaan. Semakin penting suatu komponen bagi masyarakat luas, maka semakin besar anggaran yang dibutuhkannya.

Dalam konteks kenegaraan, anggaran ini biasanya disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disingkat APBN, yang disusun oleh pemerintah (eksekutif) kemudian disyahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Komponen-komponen APBN ini misalnya anggaran untuk pendidikan dan anggaran untuk kesehatan. Pentingnya sector pendidikan dan kesehatan ini, sehingga pemerintah memberikan jatah anggaran untuk pendidikan sebesar 20%.

Porsi yang besar untuk dana pendidikan di Indonesia ini dalam rangka mengejar ketertinggalannya dengan Malaysia dan Singapura dalam kaitannya dengan kualitas pendidikan⁶⁷. Pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk membekali peserta didik dengan kecakapan

⁶⁶ Nemanja Lojanica, Government Expenditure and Government Revenue – The Causality on the Example of the Republic of Serbia, *Management International Conference*, Portoroz, Slovenia, 28 – 30 May 2015.

⁶⁷ Ahmad Arifi, Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan (Respon Kebijakan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN Bagi Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.V No.1 2008, pp. 111-127.

hidup dan menambah keimanan dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Anggaran pendidikan merupakan sejumlah uang yang digunakan pemerintah untuk belanja di sektor pendidikan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia membagi anggaran pendidikan dalam bentuk komponen anggaran pendidikan yaitu: (1) anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat; (2) anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa dan (3) anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan.

Pertama, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat. Pada komponen ini diturunkan menjadi 2 yaitu: anggaran pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga serta anggaran pendidikan pada Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN). Anggaran pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga diturunkan menjadi 4 yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama dan Kementerian Negara/Lembaga lainnya.

Kedua, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa. Komponen ini dibedakan menjadi 4 yaitu: (1) dana bagi hasil (DBH) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan; (2) dana alokasi umum (DAU) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan; (3) dana transfer khusus (dana alokasi khusus fisik, dana alokasi non fisik yang meliputi tunjangan profesi guru dan bantuan operasional sekolah, dana insentif daerah) dan (4) otonomi khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan. Sedangkan postur komponen anggaran pendidikan sebagaimana dipaparkan dalam gambar berikut ini.

Gambar 2.5: Komponen Anggaran Pendidikan

Komponen Anggaran Pendidikan	
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	
A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
c. Kementerian Agama	
d. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN	
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	
a. DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	
b. DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	
c. Dana Transfer Khusus	
1. DAK Fisik	
2. DAK Non Fisik	
a. i. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	
ii. Bantuan Operasional Sekolah	
3. Dana Insentif Daerah	
d. Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	
4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3)	
5. Total Belanja Negara	
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (4 : 5) x 100 (%)	

Sumber: Dihimpun dari Berbagai Sumber

Berdasar laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat peningkatan anggaran pendidikan sebesar Rp 24,3 Triliun yaitu dari sebesar Rp 419,8 Triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 444,1 Triliun pada tahun 2018⁶⁸.

9. Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan merupakan sejumlah uang yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga medis atau kesehatan. Disamping itu, anggaran pendidikan ini digunakan untuk melakukan penguatan kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif serta preventif yang difokuskan pada penyakit-penyakit yang tidak menular dan untuk

⁶⁸ Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, iInformasi APBN 2018 Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, Kementerian Keuangan RI, 2018, p. 16

meningkatkan program kesehatan bagi ibu hamil serta ibu yang menyusui⁶⁹.

B. LANDASAN EMPIRIS

Landasan empiris/penelitian terdahulu dan hasil pengamatan relevan dalam penelitian ini yaitu: Tsaurai; Szeles; Ariautama dan Syahrul; Asiah; Maratade, *et al*; Saraswati dan Cahyono; Subroto; Febrianto.

1. Pendidikan dan GDP

Studi Tsaurai dimana fokus utama dari penelitiannya adalah untuk menguji relevansi teori Keynesian dalam menjelaskan pengeluaran pendidikan pada ekonomi Austria menggunakan pendekatan studi kasus. Wagner (1890) dan Keynes (1936) telah lama menjadi dua teoretisi utama tentang hubungan antara pengeluaran pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Baik tinjauan literatur teoritis maupun empiris menyimpulkan bahwa kedua variabel tersebut berhubungan satu sama lain dalam dua cara yang berbeda, yang populer adalah bahwa pendidikan meningkatkan ekonomi (pandangan Keynes) diikuti oleh pandangan Wagner yang mengatakan itu adalah ekonomi yang melakukan dengan baik yang mendorong investasi dalam pendidikan. Tinjauan studi kasus untuk Austria dengan jelas menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan tidak hanya merupakan bagian signifikan dari PDB per kapita di Austria tetapi juga memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Penulis merekomendasikan kepada pembuat kebijakan di Austria dan pihak yang bertanggung jawab untuk meningkatkan program dan anggaran pengembangan pendidikan mereka untuk meletakkan dasar yang kuat bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan⁷⁰.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Tsaurai, karena Tsaurai hanya mendeskripsikan data-data statistik yang bersumber dari Bank Dunia. Sedangkan penelitian ini tidak sekedar mendeskripsikan data tetapi juga menguji data statistik Bank Dunia dengan alat uji statistik yang relevan dengan tujuan penelitian. Tsaurai hanya mendeskripsikan variabel pendidikan dan GDP di Austria, sedangkan penelitian ini lebih

⁶⁹ Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal, 2018, p. 17

⁷⁰ Kunofiwa Tsaurai, Education-Growth Dynamics For Austria: A Case Study Approach, *Journal of Governance and Regulation*, Volume 4, Issue 1, 2015, Pp. 239.

fokus menguji hubungan kausal pendidikan, kesehatan dan GDP di Indonesia.

Berdasar penelitian di atas jelas bahwa pandangan Keynes sangat dominan bahkan hasil penelitian mengemukakan pengeluaran pendidikan memberikan landasan bagi kemakmuran ekonomi. Tinjauan studi kasus untuk Austria juga jelas menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan tidak hanya merupakan bagian signifikan dari PDB per kapita di Austria tetapi juga memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara Austria.

Pengamatan Szeles yang menganalisis dinamika perkembangan ekonomi di Rumania, yang mendasari langkah-langkah yang sudah dibuat oleh Rumania dalam perjalanan pembangunan ekonomi, serta penyebab kelambatan proses jangka panjang ini. Empat dimensi pembangunan ekonomi secara khusus dianalisis di sini, yaitu GDP, kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan pendapatan, dengan penekanan besar pada dinamika GDP per kapita. Makalah ini juga melihat dua tantangan kontemporer Rumania dengan dampak yang cukup besar pada pembangunan ekonomi dan kemajuan yang dibuat dalam proses penyerapan dana Uni Eropa (UE) dan polarisasi pendapatan, yang saat ini menjadi keprihatinan bagi seluruh UE⁷¹.

Pemikiran Szeles di atas secara nyata mendeskripsikan, meskipun Rumania adalah salah satu negara Uni Eropa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2000 dan seterusnya, ketimpangan sosial terus meningkat dan standar hidup telah sedikit memburuk. Bukti ini adalah indikasi untuk kebijakan ekonomi dan sosial yang lemah yang diadopsi oleh pemerintah Rumania pada dekade terakhir ini. Ketika mendefinisikan pembangunan ekonomi pada IPM, sektor kesehatan tampaknya terutama bertanggung jawab atas rendahnya kemajuan dalam pencapaian pembangunan ekonomi. Ini merekomendasikan dana tambahan dalam kesehatan, karena akses ke layanan kesehatan merupakan dimensi fundamental dari standar hidup.

Studi Ariautama dan Syahrul yang bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas ketimpangan pendapatan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan di Indonesia. Uji Kausalitas dari Granger digunakan untuk analisis data penelitian yang menggunakan 33 provinsi di Indonesia. Periodisasi penelitian yaitu tahun 2009 sampai dengan 2013. Hasil studi kuantitatif dapat ditunjukkan bahwa tingkat kesehatan dan

⁷¹ Monica Răileanu Szeles, What Lies beyond the Romania's Economic Development, *Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution*, Volume 3, Issue 3, 2012, pp. 54.

ketimpangan pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan mempunyai hubungan dua arah menggunakan lag satu sebagai model statistik dengan Panel model VAR yang terbaik pada studi ini⁷².

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada alat analisisnya, dimana Ariautama dan Syahrul menggunakan uji Kausalitas Granger sedangkan penelitian ini menggunakan uji Kausalitas Toda-Yamamoto. Disamping itu, variabel penelitian ini diukur dalam satuan unit uang sedangkan menurut Ariautama dan Syahrul menggunakan rata-rata lama atau tiudaknya dalam menempuh studi (RLS), angka harapan hidup (AHH), dan ketimpangan pendapatan dihitung dari rasio gini (GR).

Asiah dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan reproduksi kesehatan ibu rumah tangga. Populasi dalam penelitian ini adalah 409 ibu rumah tangga di usia produktif di Desa Rukoh. *Sampling Purposive* digunakan untuk mendapatkan 35% sampel dari populasi (144 ibu rumah tangga). Parameter penelitian ini adalah pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap reproduksi kesehatan. Data diperoleh dari kuesioner. Korelasi *Product-moment* digunakan untuk menganalisa data. Hasilnya menunjukkan $r = 0,533 > r \text{ tabel} = 0,159$ ($N = 144$) pada tingkat signifikan 5%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan sangat berhubungan dengan tingkat pengetahuan tentang kesehatan khususnya reproduksi perempuan yaitu Ibu di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan dan kesadaran Ibu rumah tangga terhadap reproduksi yang sehat, serta kesadaran untuk mencari informasi yang lebih banyak untuk menambah pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya⁷³.

Perbedaannya dengan penelitian ini didasarkan pada alat analisis, teknik pengumpulan data dan alat ukur variabel penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan alat analisis Korelasi *Product-moment*, teknik pengumpulan data menggunakan angket dan alat ukur variabel penelitian menggunakan skala likert. Sedangkan penelitian ini menggunakan uji Kausalitas Toda-Yamamoto, teknik pengumpulan data

⁷² I Gede Agus Ariautama dan Syahrul, Analisis Panel Var: Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, *INFO ARTHA: Journal of Financial and Accounting Information*, Vol. 1 Edisi Januari (2016), hlm. 1-16.

⁷³ Asiah M.D., Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Ibu Rumah Tangga di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, *Jurnal Biologi Edukasi*, Vol 1, No 2 (2009), hlm. 1-4.

menggunakan dokumentasi dan variabel penelitian diukur dengan satuan unit uang.

Studi Maratade, *et al*, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam kurun waktu 2002-2013 dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Dengan kesimpulan dari hasil uji kausalitas kedua variabel tersebut adalah H_0 ditolak artinya kedua variabel tersebut mempunyai hubungan dua arah, Pertumbuhan Ekonomi mempunyai hubungan kausalitas dengan Indeks Pembangunan Manusia dan sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia mempunyai hubungan kausalitas dengan Pertumbuhan Ekonomi⁷⁴.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada variabel penelitian, sumber data dan alat analisisnya. Dimana penelitian ini menggunakan variabel penelitian yaitu anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan GDP sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Indeks Pembangunan Nasional dan pertumbuhan ekonomi. Sumber data penelitian ini berasal dari *Asian Development Bank*, sedangkan penelitian terdahulu berasal dari BPS, serta alat analisis penelitian ini menggunakan uji kausalitas Toda-Yamamoto dan penelitian terdahulu menggunakan uji kausalitas granger.

Saraswati dan Cahyono dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap PDRB per kapita di kota Surabaya pada tahun 2000 hingga tahun 2012. Selain mengetahui pengaruh keduanya terhadap PDRB per kapita, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui proyeksi keduanya di masa mendatang yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Untuk membuktikan hipotesis penelitian digunakan model ekonometrika dengan metode Vector Auto Regression (VAR). Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Surabaya pada tahun 2000 hingga tahun 2012, dengan probabilitas sebesar 0,0379 dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Sedangkan, ramalan pada masa mendatang yakni tahun 2015 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan akan

⁷⁴ Siske Yanti Maratade, Debby Ch. Rotinsulu, Audie O. Niode, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Tahun 2002-2013), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 01 Tahun 2016, hlm. 328-338.

mengalami penurunan, sedangkan tingkat kesehatan dan PDRB per kapita akan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya⁷⁵.

Sudah jelas bahwa perbedaan utama penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data penelitian dan alat analisisnya. Dimana variabel penelitian ini menggunakan data sekunder serta penelitian ini menggunakan uji kausalitas atau uji hubungan dua arah. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan uji satu arah atau uji pengaruh menggunakan metode Vector Auto Regression (VAR).

Subroto dalam studinya mengemukakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, dan sector pendidikan merupakan salah satu penggerak perekonomian. Sedangkan pengeluaran negara atau pemerintah khususnya terkait dengan program pendidikan-program peningkatan aspek pendidikan ini memiliki kontribusi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga direkomendasikan untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran supaya cita-cita Pembukaan UUD 1956 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat segera diwujudkan yang dalam waktu bersamaan dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat⁷⁶.

Tan, Mert dan Özdemir dalam studinya yang bertujuan untuk menguji Hukum Wagner, yaitu pendapatan nasional menyebabkan pengeluaran publik, dan Hipotesis Keynes, yaitu pengeluaran publik menyebabkan pendapatan nasional, baik untuk ekonomi Turki selama periode 1969-2003. Untuk tujuan ini, makalah ini menggunakan tes MWald yang diusulkan oleh Toda-Yamamoto dalam kerangka model VAR lag-extended untuk menguji langsung dari kausalitas. Dalam studi ini, pengeluaran publik telah diambil dalam bentuk investasi publik sebagai infrastruktur (energi dan transportasi), pendidikan dan pengeluaran kesehatan. Selain itu, ditemukan bahwa ada; hubungan kausal dari pengeluaran infrastruktur untuk produk domestik bruto, suatu sebab-akibat langsung antara pengeluaran pendidikan dan produk

⁷⁵ Sulistyaningrum Werdi Saraswati dan Hendry Cahyono, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap PDRB Per Kapita Di Kota Surabaya, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/12588/53/article.pdf, 2014.

⁷⁶ Gatot Subroto, Hubungan Pendidikan dan Ekonomi: Perspektif Teori dan Empiris, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 20, Nomor 3, September 2014, hlmn. 390-400.

domestik bruto, dan tidak ada hubungan kausal antara pengeluaran kesehatan dan produk domestik bruto⁷⁷.

2. Kesehatan dan GDP

Studi Saraswati dan Cahyono dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh tingkat kesehatan terhadap PDRB per kapita di kota Surabaya pada tahun 2000 hingga tahun 2012. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan model ekonometrika dengan metode Vector Auto Regression (VAR). Sedangkan variabel tingkat kesehatan berpengaruh terhadap PDRB per kapita di kota Surabaya pada tahun 2000 hingga tahun 2012, dengan probabilitas sebesar 0,0234⁷⁸.

Febrianto dalam kajiannya yang bertujuan untuk mengetahui hubungan penghasilan, pendidikan serta pengetahuan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan subyek penelitian yaitu orang tua dan siswa sebanyak 38 orang. Instrumen penelitian untuk mengukur tingkat pendapatan atau penghasilan, pendidikan serta pengetahuan orang tua tentang makanan yang berkualitas menggunakan angket sedangkan status kualitas makanan siswa dengan menggunakan perhitungan BMI. Teknik analisis data menggunakan korelasi *product moment* dan analisis regresi tiga prediktor. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan bermakna tingkat penghasilan orang tua dengan status gizi siswa⁷⁹.

Perbedaan utama dengan penelitian ini, menurut Febrianto untuk menguji hubungan variabel penelitian yaitu tingkat penghasilan dan tingkat pengetahuan orang tua menggunakan korelasi *product moment* dan analisis regresi tiga prediktor. Pendekatan ini berbeda jauh dengan penelitian ini yang menggunakan uji Kausalitas Toda-Yamamoto untuk menguji hubungan kausalitas variabel penelitian yaitu anggaran kesehatan dan GDP.

Penelitian Tan, Mert dan Özdemir yang bertujuan untuk menguji Hukum Wagner, yaitu pendapatan nasional menyebabkan pengeluaran publik, dan Hipotesis Keynes, yaitu pengeluaran publik menyebabkan

⁷⁷ Bilge Köksel Tan; Merter Mert; Zeynel Abidin Özdemir, *A Look At On The*, 2013.

⁷⁸ Sulistyaningrum Werdi Saraswati dan Hendry Cahyono, *Pengaruh Tingkat Pendidikan*, 2014.

⁷⁹ Irwan Dwi Febrianto, *Hubungan Tingkat Penghasilan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang Makanan Bergizi dengan Status Gizi Siswa TK Islam Zahrotul Uloom Karangampel Indramayu*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

pendapatan nasional, baik untuk ekonomi Turki selama periode 1969-2003. Untuk tujuan ini, makalah ini menggunakan tes MWald yang diusulkan oleh Toda-Yamamoto dalam kerangka model VAR lag-extended untuk menguji langsung dari kausalitas. Dalam studi ini, pengeluaran publik telah diambil dalam bentuk investasi publik sebagai infrastruktur (energi dan transportasi), pendidikan dan pengeluaran kesehatan. Selain itu, ditemukan bahwa ada; hubungan kausal dari pengeluaran infrastruktur untuk produk domestik bruto, suatu sebab-akibat langsung antara pengeluaran pendidikan dan produk domestik bruto, dan tidak ada hubungan kausal antara pengeluaran kesehatan dan produk domestik bruto⁸⁰.

3. Pendidikan dan Kesehatan

Tang dan Lai dalam studinya menyebutkan bahwa kebijakan makroekonomi utama dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi adalah mendorong investasi pada sumber daya manusia seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini karena baik kesehatan dan pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas angkatan kerja yang pada akhirnya memberikan efek positif pada peningkatan tingkat output. Pertanyaan yang muncul adalah apakah investasi pada kesehatan dan pendidikan memiliki hubungan kausal dan jika demikian, apa hubungan kausalitasnya? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan kausal antara pengeluaran kesehatan dan pendidikan di Malaysia. Penelitian ini meliputi data tahunan dari tahun 1970 hingga 2007. Dengan menggunakan kausalitas Granger serta pendekatan kausalitas Toda dan Yamamoto MWALD, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Granger-menyebabkan pengeluaran kesehatan baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Temuan penelitian ini menyiratkan bahwa masyarakat Malaysia menempatkan preferensi pada pengeluaran pendidikan daripada kesehatan. Preferensi ini tidak terduga seperti umumnya, masyarakat yang terdidik dan berpendidikan mendahului yang sehat. Sebelum masyarakat telah mencapai tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, kurang

⁸⁰ Bilge Köksel Tan; Merter Mert; Zeynel Abidin Özdemir, A Look At On The Relationship Between The Public Investments And Economic Growth: Turkey, 1969-2003, *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Vol. 25(1), 2013.

menyadari pentingnya kesehatan. Dengan demikian, pengeluaran untuk pendidikan harus menyebabkan pengeluaran untuk kesehatan⁸¹.

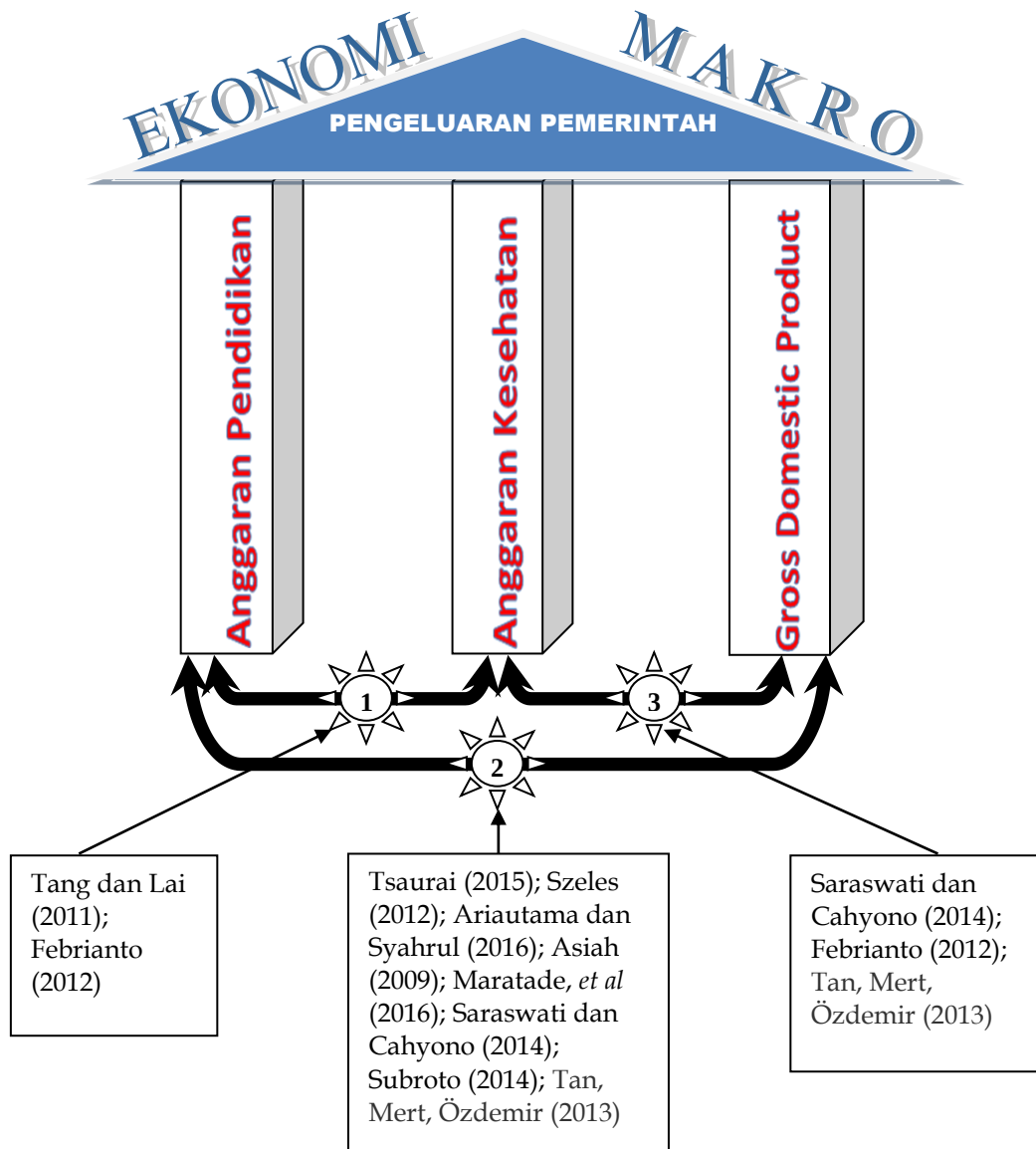
Studi Febrianto yang bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan orang tua tentang makanan yang memiliki kualitas yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan subyek penelitian yaitu orang tua dan siswa. Instrumen penelitian untuk mengukur tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan orang tua tentang makanan bergizi menggunakan angket, sedangkan status gizi siswa menggunakan perhitungan BMI. Teknik analisis data menggunakan korelasi *product moment* dan analisis regresi tiga prediktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna tingkat pendidikan orang tua dengan status gizi siswa. Disamping itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna tingkat pengetahuan orang tua dengan status gizi siswa⁸².

Perbedaan utama dengan penelitian ini, menurut Febrianto untuk menguji hubungan variabel penelitian yaitu tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan orang tua menggunakan korelasi *product moment* dan analisis regresi tiga prediktor. Pendekatan ini berbeda jauh dengan penelitian ini yang menggunakan uji Kausalitas Toda-Yamamoto untuk menguji hubungan kausalitas variabel-variabel penelitian yaitu anggaran pendidikan dengan anggaran kesehatan di Indonesia.

⁸¹ Chor Foon Tang and Yew Wah Lai, *The Causal Relationship between Health and Education Expenditures in Malaysia, Theoretical and Applied Economics*, Volume XVIII (2011), No. 8(561), pp. 61-74.

⁸² Irwan Dwi Febrianto, *Hubungan Tingkat Penghasilan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang Makanan Bergizi dengan Status Gizi Siswa TK Islam Zahrotul Ulum Karangampel Indramayu*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

C. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN



D. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan pernyataan empiris yang berusaha menguji hubungan antara setidaknya dua variabel. Menurut Hilborn dan Mangel, hipotesis adalah penjelasan yang diajukan untuk suatu fenomena. Untuk hipotesis menjadi hipotesis ilmiah, metode ilmiah mengharuskan seseorang untuk mengujinya. Para ilmuwan umumnya mendasarkan hipotesis ilmiah pada pengamatan sebelumnya yang tidak dapat dijelaskan secara memuaskan dengan teori-teori ilmiah yang

tersedia. Meskipun kata-kata "hipotesis" dan "teori" sering digunakan secara sinonim, hipotesis ilmiah tidak sama dengan teori ilmiah. Hipotesis kerja adalah hipotesis yang diterima sementara yang diusulkan untuk penelitian lebih lanjut⁸³.

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban terhadap rumusan atau pertanyaan penelitian⁸⁴. Menurut hemat peneliti ciri-ciri hipotesis yaitu: (1) merupakan pernyataan konjungtif tentang hubungan antara dua atau lebih variabel; (2) merupakan pernyataan formal yang menyajikan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan dependen; (3) merupakan penjelasan sementara dari masalah penelitian, kemungkinan hasil dari penelitian, atau kemungkinan tentang hasil penelitian; (4) disusun dalam bentuk kalimat deklaratif, yang mereka kaitkan, baik secara umum atau khusus, variabel terhadap variabel, (5) didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu yang relevan serta (6) merupakan pernyataan atau penjelasan yang disarankan oleh pengetahuan atau observasi tetapi belum teruji atau tidak teruji.

Berdasar rumusan masalah, landasan teori dan landasan empiris dapat dikemukakan hipotesis penelitian yaitu:

1. Ada hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan anggaran kesehatan di Indonesia;
2. Ada hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan GDP di Indonesia;
3. Ada hubungan kausalitas anggaran kesehatan dengan GDP di Indonesia.

⁸³ Ray Hilborn and Marc Mangel, *The Ecological Detective: Confronting Models With Data*, New Jersey: Princeton University Press, 1997, pp. 24.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: ALFABETA, 2014, pp. 99.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Sebelum membahas mengenai pendekatan penelitian secara lebih teknis, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai unit analisis. Unit analisis (juga disebut sebagai unit kasus penelitian) merupakan bagian paling mendasar dari apa-apa yang sedang dipelajari atau diamati. Beberapa contoh dari unit analisis penelitian yaitu individu, rumah tangga, kasus pengadilan, negara, perusahaan, industri, dan lain sebagainya. Oleh karena studi kasus dan penelitian ini dilaksanakan di Indonesia, maka unit analisis penelitian ini yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum metode penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dibedakan menjadi dua jenis utama yaitu: metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pemilihan pendekatan penelitian secara pragmatis dan metodologis didasarkan pada pertanyaan penelitian, dengan demikian jika didasarkan pada pertanyaan penelitian maka penelitian ini hanya membahas salah satu dari dua alur utama metode penelitian yaitu metode kuantitatif. Muijs menjelaskan bahwa metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif seringkali dikaitkan dengan hal-hal spesifik dan khusus dalam pikiran, misalnya statistika dan angka (numeric) yang beberapa banyak orang merasa agak khawatir karena berpikir bahwa metode penelitian kuantitatif sulit. Terlepas dari aspek bahwa penelitian kuantitatif sulit atau mudah, semua pemikiran ini menangkap beberapa esensi dasar dari metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi dengan mengumpulkan data numerik atau unnumerik yang

dinumerikkan kemudian dianalisis menggunakan metode berbasis statistika⁸⁵.

Pemilihan pendekatan kuantitatif berbasis data numeric ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu: (1) bila permasalahan yang merupakan pusat kajian penelitian sudah jelas. Masalah biasanya dideskripsikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya (biasanya terdapat pilihan-pilihan) dengan yang terjadi, antara peraturan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapang, antara teoretik dengan praktik yang terjadi dan antara rencana yang terlebih dahulu disusun dengan pelaksanaan. Dalam menyusun proposal penelitian, masalah ini harus diperkuat dengan data hasil dari pengamatan, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokumentasi. Sebagai contoh meneliti untuk menemukan strategi untuk mengurangi kemiskinan, maka data tentang orang-orang miskin sebagai masalah harus dipaparkan; (2) bila peneliti ingin memperoleh informasi yang luas dari suatu populasi. Metode penelitian kuantitatif sangat relevan jika digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih luas tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas dan bahkan tidak terhingga, maka penelitian dapat menggunakan sampel penelitian yang diambil dari suatu populasi; (3) bila ingin mengetahui potensi pengaruh perlakuan/*treatment* tertentu terhadap perlakuan lainnya. Untuk kepentingan ini metode penelitian eksperimen paling cocok dan relevan untuk digunakan. Misalnya pengaruh jamu tradisional tertentu terhadap kesehatan; tubuh (4) bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif dan terakhir hipotesis asosiatif; (5) bila peneliti ingin memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara statistik, berdasarkan fenomena yang empiris dan tentunya terukur. Misalnya suatu penelitian yang ingin menguji IQ anak-anak pada suatu masyarakat tertentu, maka perlu dilakukan pengukuran dengan test IQ serta (6) bila ingin menguji ketidakpastian tentang validitas pengetahuan, pengalaman, teori dan produk tertentu⁸⁶.

Berdasar pemikiran tersebut dapat dikemukakan bahwa pertimbangan memilih pendekatan kuantitatif dalam suatu penelitian yaitu: (1) ketika suatu penelitian menginginkan jawaban secara kuantitatif; (2) ingin menganalisis mengenai suatu keadaan atau menjelaskan suatu fenomena serta (3) pertimbangan penting lainnya

⁸⁵ Daniel Muijs, *Doing Quantitative Research in Education with SPSS*, Thousand Oaks • New Delhi • London: Sage Publications, 2004.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2014.

yang sangat cocok untuk penelitian pendekatan kuantitatif yaitu menguji hipotesis. Biasanya seseorang ingin menjelaskan mengenai suatu hal, misalnya apakah ada hubungan kecerdasan atau hubungan pengaruh antara prestasi karyawan, loyalitas, latar belakang sosial dan latar belakang budaya mereka. Suatu penelitian menguji teori dan menguji hipotesis bahwa latar belakang sosial yang lebih rendah mengarah pada loyalitas karyawan yang rendah, kemudian jika dikaitkan dengan prestasi karyawan mengalami penurunan. Dengan memilih untuk menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dapat menguji dan menganalisis model-model demikian ini.

Sugiyono mendefinisikan bahwa pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian atau pendekatan penelitian yang didasarkan pada aspek filsafat positivism, relevan digunakan untuk meneliti pada populasi penelitian atau sampel penelitian tertentu, data dikumpulkan menggunakan instrumen atau angket penelitian, analisis data penelitian bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan berdasar teori dan penelitian terdahulu yang relevan⁸⁷.

Pemikiran lainnya yang melatarbelakangi pemilihan pendekatan penelitian kuantitatif, bahwa metode penelitian kuantitatif mengintegrasikan data dengan angka dan apa saja yang dapat diekspresikan atau diukur dengan cara sistematis terhadap penyelidikan fenomena dan hubungan variabel-variabel penelitian. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan tentang hubungan antar variabel penelitian yang bersifat terukur dengan variabel-variabel lainnya, memprediksi dan mengendalikan suatu fenomena dan lain sebagainya.

Seluruh studi kuantitatif biasanya berakhir dengan konfirmasi atau diskonfirmasi terhadap hipotesis penelitian yang diuji. Peneliti menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif mengidentifikasi satu atau beberapa variabel yang digunakan dalam pekerjaan penelitian dan melanjutkan dengan pengumpulan data yang terkait dengan variabel-variabel tersebut untuk selanjutnya dilakukan analisis data penelitian menggunakan alat-alat uji statistika yang relevan.

2. Jenis Penelitian

Untuk memutuskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa rumusan

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2014.

masalah dikelompokkan menjadi tiga bentuk yaitu: rumusan masalah deskriptif, komparatif, asosiatif dan komparatif asosiatif. Untuk rumusan masalah asosiatif ini dibedakan menjadi tiga yaitu: hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif/resiprokal/timbal balik. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat, jadi ada variabel independen dan dependennya. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi, jadi tidak diketahui mana variabel independen dan dependennya. Rumusan masalah komparatif-asosiatif merupakan bentuk rumusan atau pertanyaan penelitian yang durumuskan dalam bentuk pertanyaan perbandingan korelasi antara dua atau lebih variabel penelitian pada sampel atau populasi yang berbeda⁸⁸.

Berdasar teori di atas dan jika dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian maka jenis penelitian ini yaitu asosiatif dengan pola hubungan interaktif/resiprokal/timbal balik, karena diasumsikan belum diketahui variabel independen dan dependennya. Variabel independen dan dependen akan diketahui ketika telah dilakukan analisis data sebagaimana dalam Bab IV (analisis data).

B. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi merupakan semua individu atau unit yang menjadi subyek dan atau obyek penelitian. Populasi dapat berarti agregat atau totalitas semua objek penelitian, subjek atau anggota penelitian yang sesuai dengan sekumpulan spesifikasi. Populasi juga merupakan semua anggota penelitian yang memenuhi sebuah spesifikasi atau suatu kriteria tertentu. Sebagai contoh, populasi Indonesia berarti sebagai semua orang warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia. Populasi Kabupaten Tulungagung berarti semua orang warga yang tinggal di dalam batas wilayah Kabupaten Tulungagung. Populasi juga dapat diartikan sebagai benda mati, seperti semua kendaraan yang diproduksi di negara tertentu pada suatu tahun tertentu.

Sedangkan populasi penelitian ini yaitu data tentang variabel-variabel penelitian yaitu anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan Gross Domestic Product Indonesia yang dipublikasikan oleh Asian Development Bank dalam kurun waktu mulai tahun 1981 sampai dengan 2016.

Sampel merupakan bagian dari individu dalam suatu populasi. Sampel berarti bagian dari populasi yang dipilih untuk berpartisipasi

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2014.

dalam penelitian, itu adalah sebagian kecil dari keseluruhan, dipilih untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian. Semakin besar sampel semakin representatif, sampel yang lebih kecil menghasilkan hasil yang kurang akurat karena mereka cenderung kurang mewakili populasi. Seorang anggota tunggal dari populasi tertentu disebut sebagai elemen. Ketika hanya beberapa elemen yang dipilih dari suatu populasi, kami menyebut itu sebagai sampel; ketika semua elemen dimasukkan, kami menyebutnya sensus.

Ketika kita tertarik untuk mempelajari suatu populasi, seringkali tidak layak atau mungkin untuk mempelajari seluruh populasi, terutama jika itu besar atau sulit untuk diakses. Oleh karena itu, kita dapat memilih untuk mempelajari sampel dari populasi. Sampel terdiri dari sejumlah "unit" yang lebih kecil dan terbatas (misalnya, orang, kasus, peristiwa, situs, organisasi, kabupaten, dan lain-lain) yang diekstraksi dari populasi yang lebih besar yang diminati (misalnya populasi atau sekelompok peserta program, peristiwa, kasus, agensi, kabupaten, atau penduduk negara bagian).

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*, sehingga sampel penelitian ini diambil dari data-data variabel penelitian yang tersedia dari tahun 1981 sampai dengan 2016.

C. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL DAN SKALA PENGUKURAN

Variabel adalah atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu dan ada variasinya⁸⁹. Variabel merupakan konsep, karakteristik, atau properti yang dapat bervariasi, atau berubah, dari satu unit analisis ke yang lain dan semua variabel harus bervariasi, jika tidak ada variasi di antara kasus yang berbeda maka itu bukan variabel. Variabel penelitian yang dikaji dalam studi ini yaitu: anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan GDP. Anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan merupakan contoh

1. Anggaran pendidikan merupakan salah satu belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah khususnya pada sektor pendidikan dan diukur dalam satuan unit uang serta menggunakan skala pengukuran rasio;
2. Anggaran kesehatan merupakan salah satu belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah khususnya pada sektor kesehatan dan diukur dalam satuan unit uang serta menggunakan skala pengukuran rasio;

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 2014.

3. GDP disebut juga pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan perekonomian negara dalam periode tertentu yang dihitung dalam berdasarkan nilai pasar⁹⁰ dan diukur dalam satuan unit uang serta menggunakan skala pengukuran rasio.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pendekatan dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud yaitu variabel-variabel penelitian yang didokumentasikan oleh lembaga yang kredibel yaitu *Asian Development Bank*, sebuah otoritas bank sentral di tingkat Asia yang menyajikan data tentang komponen-komponen ekonomi misalnya jumlah penduduk, angkatan kerja, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks harga konsumen, tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor, neraca perdagangan, nilai tukar dan lain sebagainya. Tidak semua indikator makro ekonomi dikaji dalam penelitian ini, dengan kata lain penelitian ini hanya menguji variabel-variabel terpilih yaitu anggaran pendidikan, kesehatan dan Gross Domestic Product Indonesia dalam kurun waktu tahun 1981 sampai dengan 2016.

E. ANALISIS DATA

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan salah satu analisis data statistic yang paling mendasar yang mendeskripsikan tentang variabel penelitian ditinjau dari aspek rata-rata atau *mean*, penyimpangan atau *standar deviation*, dan lain sebagainya yang biasanya dilakukan pada-awal-awal analisis data statistic. Statistic deskriptif ini juga merupakan pendeskripsian atas variabel-variabel penelitian dan menggambarkan variabel penelitian khususnya dalam kurun waktu yang terbatas, yang terkait periode penelitian yang dalam penelitian ini terbatas pada data variabel anggaran pendidikan, kesehatan dan Gross Domestic Product mulai tahun 1981 sampai dengan 2016 atau sebanyak 36 tahun atau 36 pengamatan.

2. Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas data merupakan langkah awal sebelum dilakukan pengujian statistika lebih lanjut. Sebagian besar metode peramalan

⁹⁰ N. Suparno dan T.D. Haryo Tamtomo, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi untuk SMP/MTs Kelas VIII*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.

mengasumsikan bahwa distribusi memiliki stasioneritas, khususnya terhadap data-data yang sifatnya *time series*. Hal ini sejalan dengan Horváth, *et al* yang menjelaskan bahwa pengujian stasioneritas data penelitian mendapat perhatian setelah munculnya prinsip-prinsip pemodelan pada data penelitian yang bersifat *time series*⁹¹. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa stasioneritas data adalah asumsi umum dalam kasus-kasus yang memiliki sifat *time series*. Rangkaian waktu penelitian yang diamati terkadang menunjukkan hasil yang tidak stasioner, sehingga data ini harus dirubah ke beberapa seri waktu stasioner, hal ini sangat lazim dan sangat memungkinkan, dan kemudian baru dilakukan analisis data penelitian.

Di dalam analisis runtun waktu, asumsi stasioneritas dari data merupakan syarat utama dan merupakan sifat yang penting. Pada model-model data yang stasioner, sifat-sifat statistic di masa yang akan datang dapat diprediksikan dan diramalkan berdasarkan data historis atau data yang telah terjadi di masa lalu⁹². Teori yang lainnya, suatu data runtun waktu disebut memiliki stasioneritas jika data tidak memuat adanya akar-akar unit⁹³.

Menurut Winarno, ada beberapa cara untuk mengetahui stasioneritas data, diantaranya adalah dengan menggunakan metode grafik dan metode akar unit⁹⁴. Kemudian Rosadi mengemukakan, pengujian stasioneritas dari suatu data runtun waktu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut: (1) untuk mendeteksi ketidak-stasioneran data dalam *mean* (rata-rata) dapat digunakan plot dari data dalam urutan waktu, plot fungsi autokorelasi (*Autocorrelation function/AFC*) dan plot plot fungsi autokorelasi parsial (*Partial ACF/PACF*). Jika data mengandung komponen *trend* maka plot ACF/PACF akan meluruh secara perlahan dan data non-stasioner dalam *mean*; (2) untuk mendeteksi ketidakstasioneran dalam variasi dapat digunakan plot ACF/PACF dari residual kuadrat dan (3) uji unit root. Stasioneritas data juga dapat diperiksa dengan mengamati apakah

⁹¹ Lajos Horváth, Piotr Kokoszka, Gregory Rice, Testing stationarity of functional time series, *Journal of Econometrics*, Vol. 179(1), pages 66-82.

⁹² Dedi Rosadi, *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2012, pp. 38.

⁹³ Rusdi, Uji Akar-Akar Unit dalam Model Runtun Waktu Autoregresif, *Statistika*, Vol. 11 No. 2, 67 – 78 Nopember 2011.

⁹⁴ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*, Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta, 2011.

data runtun waktu mengandung akar unit (*unit root*), yakni apakah terdapat komponen trend yang berupa *random walk* dalam data⁹⁵.

Uji akar-akar unit ini dapat pula dipandang sebagai uji stasioneritas. Hal ini karena pada prinsipnya uji tersebut dimaksudkan untuk menguji apakah koefisien tertentu dalam model autoregresif yang ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Berkenaan dengan itu banyak pelaku ekonometrika telah dan sedang mengembangkan suatu prosedur untuk uji akar-akar unit⁹⁶. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan uji Dickey-Fuller atau uji Augmented Dickey-Fuller yang dikombinasikan dengan metode grafik.

Rosadi juga merekomendasikan untuk menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller, karena uji ini merupakan salah satu uji yang paling sering digunakan dalam pengujian stasioneritas dari data, yakni dengan melihat apakah terdapat *unit root* di dalam model (disebut data *integrated*) atau tidak. Pengujian dilakukan dengan hipotesis $H_0 : \rho = 0$ (terdapat *unit root*) dalam persamaan regresi.

$$\Delta Y_t = a + \delta_t + \rho Y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \phi_j \Delta Y_{t-1} + e_t$$

dengan $\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ dan $\rho = a-1$

Hipotesis nol ditolak jika nilai statistic uji ADF memiliki nilai kurang (lebih negatif) dibandingkan nilai daerah kritik. Jika hipotesis nol ditolak, maka data tidak stasioner⁹⁷.

3. Pemilihan Lag Optimal

Setelah data penelitian diputuskan stasioner, langkah berikutnya yaitu melakukan pemilihan lag optimal. Untuk memutuskan untuk memilih panjang lag yang optimal, suatu penelitian biasanya menggunakan beberapa pengujian yaitu: *Hannan-Quinn information criterion* (HQ), *sequential modified LR test statistic* (LR), *Schwarz information criterion* (SC), *Akaike information criterion* (AIC) dan *Final prediction error* (FPE). Dasar pertimbangan untuk menentukan uji lag optimal ini yaitu dengan mendasarkan pada hasil uji yang terdapat tanda bintang (*) menurut uji LR, FPE, AIC, SC dan HQ yang paling banyak, dengan demikian bahwa lag yang digunakan untuk pengolahan data selanjutnya menggunakan Lag tertentu yang banyak bintangnya tadi.

⁹⁵ Dedi Rosadi, *Ekonometrika & Analisis*, 2012, pp.38.

⁹⁶ Rusdi, Uji Akar-Akar, 2011.

⁹⁷ Dedi Rosadi, *Ekonometrika & Analisis*, 2012, pp. 41.

4. Uji Kointegrasi

Makna ekonomi dari uji kointegrasi adalah bahwa jika dua seri dapat membentuk ekuilibrium dalam jangka panjang, maka mereka akan bergerak bersama-sama dari waktu ke waktu dan perbedaan antara keduanya akan stabil atau ajeg bahkan jika keduanya mengandung tren stokastik sekalipun. Adanya ekuilibrium jangka panjang ini dapat memungkinkan untuk melakukan analisis regresi pada variabel yang non-stasioner.

Winarno mengemukakan, dua variabel yang tidak stasioner sebelum dideferensiasi namun stasioner pada tingkat diferensi pertama, besar kemungkinan akan terjadi kointegrasi, yang berarti terdapat hubungan jangka panjang diantara keduanya. Ada tiga cara untuk menguji kointegrasi yaitu: (1) uji kointegrasi Engle-Granger (EG); (2) uji *Cointegrating Regression Durbin Watson (CRDW)* dan (3) uji Johansen⁹⁸. Rosadi menjelaskan, untuk menguji adanya kointegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji Engle-Granger dua langkah dan uji Johansen⁹⁹.

Kriteria umum dan syahih yang diperlukan untuk uji stasioneritas di antara variabel non-stasioner disebut kointegrasi. Pengujian untuk kointegrasi data penelitian merupakan langkah yang perlu untuk memeriksa apakah pemodelan secara empiris memiliki hubungan statistik yang bermakna atau tidak. Jika variabel memiliki proses tren yang berbeda, maka dapat dikatakan bahwa data tidak memiliki hubungan jangka panjang satu sama lain, yang menyiratkan bahwa tidak terdapat pemodelan jangka panjang, dan biasanya tidak terdapat dasar yang valid untuk penyimpulan berdasarkan distribusi standar yang dinyatakan dalam angka standar deviasi.

Alat analisis yang umum digunakan untuk uji kointegrasi ini yaitu statistik Johansen, yang bermanfaat untuk melihat jumlah kointegrasi (disebut rank kointegrasi antar variabel). Apabila dalam analisis data kointegrasi terdapat M variabel dengan *unit root*, maka mungkin terdapat maksimum $(M-1)$ bentuk kointegrasi antar variabel penelitian tersebut, sehingga dimungkinkan terdapat sebanyak $(M-1)$ residual di dalam persamaan VECM¹⁰⁰.

Kemudian Alimi dan Ofonyelu mendefinisikan bahwa kointegrasi menggambarkan hubungan jangka panjang atau ekuilibrium, antara dua seri variabel. Hal ini menjadikan kointegrasi sebagai teknik analisis ideal

⁹⁸ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika*, 2011, pp. 11.7

⁹⁹ Dedi Rosadi, *Ekonometrika & Analisis*, 2012, pp. 201.

¹⁰⁰ Dedi Rosadi, *Ekonometrika & Analisis*, 2012, pp. 217.

untuk memastikan adanya hubungan jangka panjang, contohnya antara variabel inflasi yang diharapkan dan suku bunga nominal pada periode waktu tertentu¹⁰¹. Jadi, kointegrasi dapat didefinisikan sebagai hubungan jangka panjang atau ekuilibrium, antara dua seri variabel misalnya variabel anggaran pendidikan dengan anggaran kesehatan, dan dengan Gross Domestic Product. Uji kointegrasi ini merupakan teknik analisis ideal untuk memastikan adanya hubungan jangka panjang atau tidak variabel-variabel penelitian yaitu variabel anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan Gross Domestic Product.

5. Uji Kausalitas Toda-Yamamoto

Toda dan Yamamoto pada tahun 1995 mengusulkan prosedur yang menarik namun sederhana yang membutuhkan estimasi VAR yang diperbesar yang menjamin distribusi asimtotik statistik Wald (asymptotic χ^2 -distribution), karena prosedur pengujian kuat terhadap integrasi dan sifat kointegrasi dari proses. Kami menggunakan VAR bivariat¹⁰².

Salah satu kelebihan model VAR adalah kita dapat mendeteksi arah kausalitas. Arah ini sangat penting bagi bank sentral di seluruh dunia karena mereka menyesuaikan kebijakan moneter mereka. Dalam penelitian ini mengadopsi pengujian kausalitas Toda dan Yamamoto (1995) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengujian Granger dapat memberikan regresi palsu pada fungsi dengan kelambatan waktu pada variabel terintegrasi.
2. Statistik F hanya dapat digunakan ketika variabel dikointegrasi.
3. Model koreksi kesalahan yang dikemukakan oleh Engle dan Granger (1987) dan model VAR yang dinyatakan oleh Johansen dan Juselius (1990) dan Johansen (1991) sebagai cara alternatif untuk menguji kausalitas adalah tidak praktis.
4. Toda dan Phillips (1993) pada paper mereka menyatakan bahwa kausalitas Granger dengan model koreksi kesalahan dapat menyebabkan kesimpulan yang salah karena ketergantungan parameter yang mungkin asymptotic dalam beberapa kasus.

¹⁰¹ Santos R. Alimi and Chris C. Ofonyelu, Toda-Yamamoto Causality Test Between Money Market Interest Rate And Expected Inflation: The Fisher Hypothesis Revisited, *European Scientific Journal*, March 2013 edition vol.9, No.7, pp. 129.

¹⁰² Santos R. Alimi and Chris C. Ofonyelu, Toda-Yamamoto, pp. 131.

5. Akhirnya, menurut Rambaldi dan Doran (1996), uji Toda dan Yamamoto dilakukan dari uji Wald dimodifikasi (MWald) dan Seemingly Tidak Terkait Model regresi (model SUR)¹⁰³.

Dritsaki menambahkan, Toda dan Yamamoto (1995) mengembangkan metode berdasarkan estimasi model VAR ditambah ($k + dmax$) di mana k adalah jarak waktu optimal pada model VAR pertama dan $dmax$ adalah maksimum keteraturan terintegrasi pada variabel sistem (model VAR). Pendekatan Toda dan Yamamoto mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Tentukan urutan integrasi untuk setiap seri. Jika urutan integrasi berbeda, kita mendapatkan maksimum ($dmax$).
2. Membuat model VAR pada tingkat seri terlepas dari urutan integrasi yang kami temukan.
3. Mendefinisikan urutan model VAR (k) dari panjang lag diambil dari LR, kesalahan prediksi akhir (FPE), AIC, SC, kriteria HQ.
4. Menguji apakah VAR ($k + dmax$) (model VAR yang disesuaikan) ditentukan dengan benar.
5. Jika seri memiliki urutan integrasi yang sama maka kita melanjutkan uji kointegrasi menggunakan metodologi Johansen. Jika tidak, maka menggunakan pendekatan Pesaran.
6. Tidak peduli apa hasilnya pada kointegrasi, kita lanjutkan dengan uji kausalitas.
7. Untuk mendapatkan model VAR ($k + dmax$) menggunakan kelambatan yang sesuai untuk setiap persamaan sistem.
8. Menerapkan uji kausalitas Granger untuk non-kausalitas menggunakan persamaan pairwise dan uji Wald dimodifikasi (MWald) untuk signifikansi parameter pada persamaan yang diperiksa pada nomor waktu kelambatan ($k + dmax$).
9. Uji Wald yang dimodifikasi (MWald) mengikuti distribusi Chi-square (χ^2) secara asimtotik dan derajat kebebasannya sama dengan jumlah jeda waktu ($k + dmax$).
10. Penolakan hipotesis nol mencakup penolakan kausalitas Granger.
11. Akhirnya, kami memeriksa apakah ada kointegrasi pada model VAR.
12. Jika dua atau lebih seri dikointegrasi, maka ada satu hubungan kausal (unidirectional atau bilateral) tetapi tidak sebaliknya¹⁰⁴.

¹⁰³ Chaido Dritsaki, Toda-Yamamoto Causality Test between Inflation and Nominal Interest Rates: Evidence from Three Countries of Europe, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2017, 7(6), pp. 122.

¹⁰⁴ Chaido Dritsaki, Toda-Yamamoto Causality, pp. 123.

Model VAR dari kausalitas Toda dan Yamamoto diatur sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 y_t &= \mu_0 + \left[\sum_{i=1}^k \alpha_{1t} y_{t-i} + \sum_{i=k+1}^{d_{\max}} \alpha_{2t} y_{t-i} \right] + \\
 &\quad \left[\sum_{i=1}^k \beta_{1t} x_{t-i} + \sum_{i=k+1}^{d_{\max}} \beta_{2t} y_{t-i} \right] + \varepsilon_{1t} \\
 x_t &= \phi_0 + \left[\sum_{i=1}^k \gamma_{1t} y_{t-i} + \sum_{i=k+1}^{d_{\max}} \gamma_{2t} x_{t-i} \right] + \\
 &\quad \left[\sum_{i=1}^k \delta_{1t} y_{t-i} + \sum_{i=k+1}^{d_{\max}} \delta_{2t} y_{t-i} \right] + \varepsilon_{2t}
 \end{aligned}$$

Dimana k adalah jarak waktu optimal pada model VAR awal dan $d_{\max}$ adalah urutan integrasi maksimum pada sistem variabel (model VAR).

Berdasar tujuan penelitian, maka untuk pengolahan data penelitian tentang anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan Gross Domestic Product dalam kurun waktu tahun 1981 sampai dengan tahun 2016 ini menggunakan software EViews 8.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL PENELITIAN

Statistika deskriptif menyajikan tentang variabel-variabel penelitian jika ditinjau dari aspek rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai maximum data yang diamati, nilai minimum data yang diamati, ukuran penyimpangan (standar deviasi), skewnes, kurtosis, Jarque-Bera, Probabilitas, Sum, Sum Sq. Dev. dan Observations.

Tabel 4.1: Uji Statistik Deskriptif

	GDP (Trillion Rp)	KESEHATAN (Milliar_Rp)	PENDIDIKAN (Milliar Rp)
Mean	2190.346	7888.111	33688.08
Median	423.5220	3040.000	6882.500
Maximum	9433.000	67214.00	150090.0
Minimum	12.05500	225.0000	704.0000
Std. Dev.	3066.424	12259.59	47563.22
Skewness	1.429731	3.298850	1.292186
Kurtosis	3.383121	16.28080	3.211664
Jarque-Bera	12.48495	329.8640	10.08567
Probability	0.001945	0.000000	0.006455
Sum	78852.47	283972.0	1212771.
Sum Sq. Dev.	3.29E+08	5.26E+09	7.92E+10
Observations	36	36	36

Sumber: Data Sekunder, Diolah dengan Eviews 8 (2018)

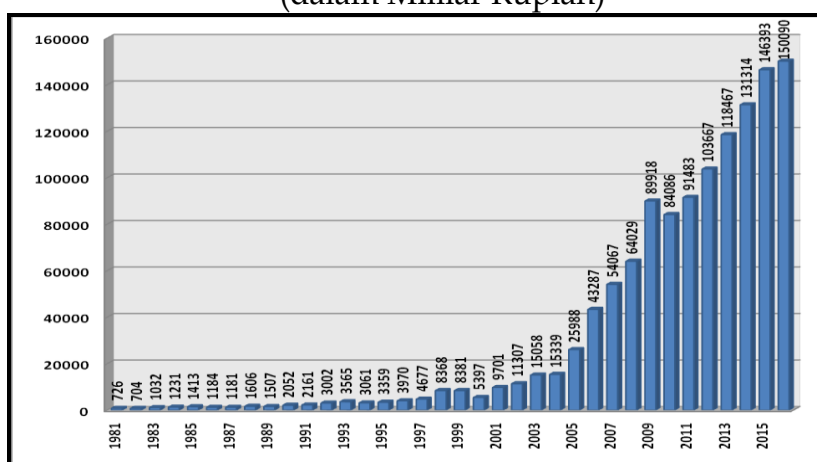
Berdasar tabel di atas dapat dikemukakan secara ringkas bahwa terkait variabel GDP: rata-rata GDP Indonesia dalam kurun waktu penelitian sebesar Rp 2190.346 Trillion, GDP maksimum pada angka Rp

9433 Trillion, nilai minimum pada GDP sebesar Rp 12.05500 Trillion. Demikian halnya dengan indikator lainnya terhadap anggaran kesehatan dan anggaran pendidikan dapat diketahui nilai mean, median, maksimum, minimum, probability dan sebagainya.

B. ASPEK PENDIDIKAN INDONESIA

Gambar di bawah ini menunjukkan progres porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang dialokasikan untuk sector pendidikan.

Gambar 4.1: Nilai Anggaran Pendidikan Indonesia pada tahun 1981-2016 (dalam Milliar Rupiah)



Sumber: Asian Development Bank, Diolah

Berdasar gambar di atas, bahwa anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk sector pendidikan mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 1981 - 2016. Peningkatan ini tidak dapat dilepaskan dari kapabilitas dasar penduduk Indonesia di bidang pendidikan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan upaya. Pemerintah Indonesia saat ini berkonsentrasi penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan warga negaranya. Pemerintah juga serius memberikan perhatian secara khusus terhadap sector pendidikan di Indonesia lewat komitmennya dalam slogan Nawacita. Untuk merealisasikan Nawacita ini pemerintah menyusun beberapa program misalnya Program Indonesia Pintar (PIP) yang secara yuridis dapat diakses melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2015-2019.

Melalui program PIP ini pemerintah sangat serius untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar Sembilan tahun dan

menengah tiga tahun. Disamping itu pemerintah juga berupaya menurunkan kesejangan pendidikan antar kelompok masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi sasaran khusus program pemerintah Indonesia. Dengan program PIP ini, pemerintah Republik Indonesia berharap bahwa seluruh warga negara yang berpendidikan dapat terealisasi mengingat pemerintah bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sementara sasaran khusus yang ingin dicapai dalam program PIP ini yaitu melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun pada RPJMN 2015-2019 yang meliputi tingkat pendidikan dasar (9 tahun) dan menengah (3 tahun untuk SMP dan 3 tahun untuk SMA) yang secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

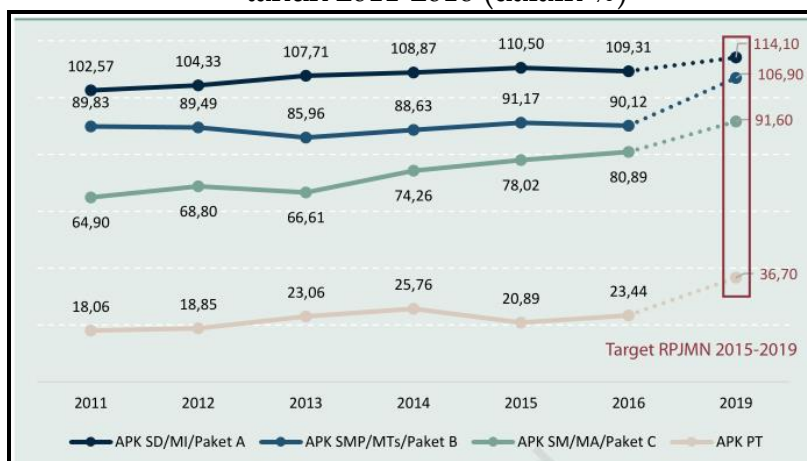
1. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar (9 tahun) dan pendidikan menengah (6 tahun);
2. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan warga negara yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah serta meningkatnya angka melanjutkan sekolah;
3. Menurunnya gaps atau kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk jawa non jawa, penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan bahkan antar daerah (misalnya provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan lain sebagainya);
4. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah (SMA) untuk memasuki pasar tenaga kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi);
5. Meningkatnya aspek jaminan kualitas pelayanan pendidikan bagi warga negara, tersedianya kurikulum yang kompatibel, dan tersedianya sistem penilaian pelaksanaan pendidikan yang komprehensif;
6. Meningkatnya persentase jumlah siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri-industri untuk memperkuat kacakapannya¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, *Buku I: Agenda Pembangunan Nasional*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014, Pp. 134-135.

Berdasar RPJMN 2015-2019, partisipasi pendidikan menjadi target utama dalam Program Indonesia Pintar. Sedangkan untuk mengevaluasi perkembangan partisipasi pendidikan dalam Program Indonesia Pintar ini, pemerintah Indonesia menggunakan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang selalu dievaluasi dalam setiap tahunnya.

Secara umum, APK Indonesia mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2011-2016. Sampai dengan tahun 2016, APK pada jenjang SD/Sederajat menunjukkan hasil yang cukup tinggi. APK pada jenjang SD/Sederajat di angka 109,31% walaupun demikian, APK pada jenjang lain masih di bawah 100%. Dimana pada jenjang SMP/Sederajat, APK telah mencapai 90,12%. Pada level SMA/ sederajat persentasenya lebih rendah yaitu sebesar 80,89%. Sedangkan pada jenjang perguruan tinggi APK jauh lebih rendah lagi yaitu sebesar 23,44%.

Gambar 4.2: Nilai atau Angka Partisipasi Kasar (APK) di Indonesia, tahun 2011-2016 (dalam %)



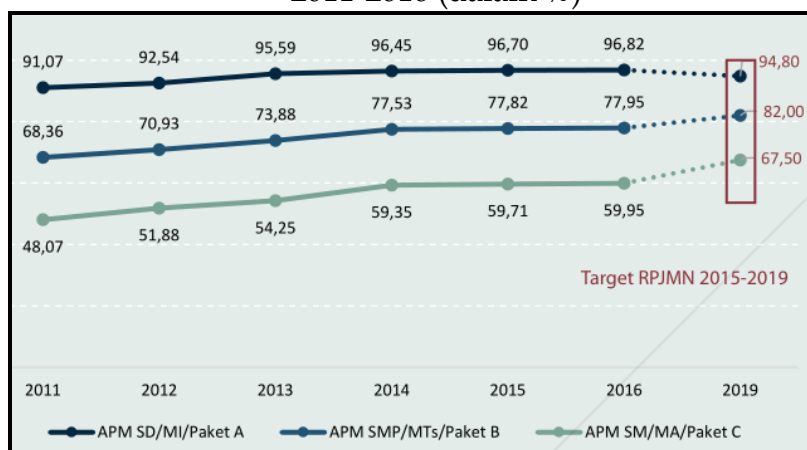
Sumber: BPS, Diolah

Selain indikator APK, indikator pendidikan lainnya yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Untuk mendapatkan gambaran spesifik tentang partisipasi murni sesuai dengan jejang pendidikan SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi, indicator ini memang sangat relevan dalam menjelaskan fenomena pendidikan masyarakat. Secara menyeluruh APM di Indonesia untuk semua tingkat jenjang pendidikan mengalami perbaikan dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Hingga pada tahun 2016, tingkat capaian APM SD atau sederajat berhasil mencapai 96,82%. Sementara itu, APM SMP atau sederajat pada tingkat 77,95% yang

memberikan penjelasan bahwa di Indonesia lebih dari seperlima anak pada range usia 13-15 tahun tidak bersekolah terutama pada jenjang SMP. Sedangkan nilai APM SMA atau sederajat tercatat masih kurang optimal, yaitu sebesar 59,95% khususnya pada tahun 2016.

Perkembangan nilai APM SD atau yang sederajat terus mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga pada tahun 2016 tercatat sangat memuaskan. Pada tahun 2016 saja tingkat capaian APM SD atau yang sederajat di Indonesia telah mencapai target yang ditetapkan pada RPJMN di tahun 2019. Hal ini dapat dikatakan bahwa pekerjaan pemerintah pada masa yang akan datang terus mengupayakan agar nilai target APK dan APM SMP dan SMA dapat segera diwujudkan terutama pada tahun 2019.

Gambar 4.3: Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia pada 2011-2016 (dalam %)



Sumber: BPS, Diolah

Pencapaian target RPJMN pada tahun 2019 terutama pada indikator partisipasi sekolah bukanlah pekerjaan yang ringan. Jika didasarkan nilai capaian pada tahun 2016, pekerjaan berat yang menanti pemerintah adalah meningkatkan nilai APK SMP atau sederajat, meningkatkan nilai APK perguruan tinggi, serta meningkatkan nilai APM SMA atau sederajat. Paling tidak dalam tiga tahun ke depan, nilai APK SMP atau sederajat harus mengalami peningkatan pada kisaran 17%. Menurut data historis dalam 6 (enam) tahun terakhir nilai APK SMP atau sederajat relatif stagnan yaitu pada kisaran 90%. Sementara itu didasarkan pada nilai APK perguruan tinggi harus mencapai target sekitar 36,70% di tahun 2019. Sedangkan pada tiga tahun terakhir nilai APK perguruan tinggi pada kisaran di angka 23%. Terakhir mengenai target angka APM SMA atau sederajat pada tahun 2019 diperlukan

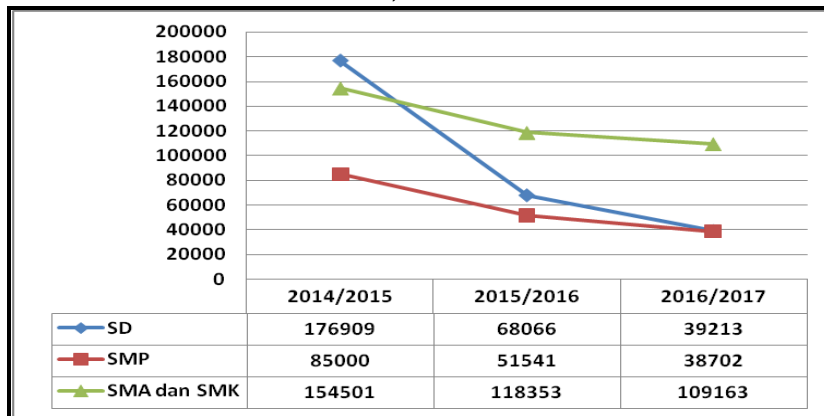
usaha yang serius. Selama sekitar dua tahun ini, angka APM SMA atau sederajat tercatat dalam kisaran angka 59%. Padahal jika melihat target di tahun 2019 diharuskan mencapai 67,50%.

Keberhasilan sektor pendidikan di Indonesia juga turut ditunjang oleh partisipasi peserta didik setiap jenjang pendidikan formal. Di Indonesia angka putus sekolah baik SD, SMP maupun SMA masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan nasional. Pemerintah sekarang ini memiliki komitmen untuk menurunkan angka putus sekolah secara nasional sehingga komitmen tersebut menjadi sasaran penting khususnya dalam program nasional yaitu Program Indonesia Pintar. Jumlah peserta didik yang putus sekolah pada periode 2014 hingga 2016 terus mengalami penurunan. Situasi angka putus sekolah di Indonesia ini terjadi pada semua jenjang pendidikan dari SD atau sederajat hingga SMA atau sederajat.

Sepertinya upaya serius yang dilakukan pemerintah Indonesia menunjukka perkembangan positif dan signifikan. Angka putus sekolah yang mengalami penurunan pada tahun 2014/2015 pada tingkat SD mencapai 176.909 orang peserta didik. Angka tersebut terus berkurang secara drastis pada 2016/2017 yaitu menjadi 39.213 orang peserta didik. Meskipun jumlah peserta didik putus sekolah terus mengalami penurunan, tetapi masih terdapat permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian serius. Di tingkat SMP dan SMA atau yang sederajat, penurunan jumlah peserta didik yang putus sekolah kecenderungannya tidak secepat di tingkat SD. Hal ini sangat umum terjadi di Indonesia dimana angka putus sekolah biasanya semakin tinggi khususnya pada jenjang-jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Fenomena ini menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mengurangi angka pustus sekolah.

Selain permasalahan putus sekolah, pemerintah juga menghadapi permasalahan minat siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Tingginya minat siswa dalam melanjutkan studi ini harus direspon positif oleh pemerintah, mengingat investasi di sector pendidikan merupakan asset negara yang secara tidak langsung ikut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya insane menuju negara yang memiliki kemandirian baik secara ekonomi maupun non ekonomi.

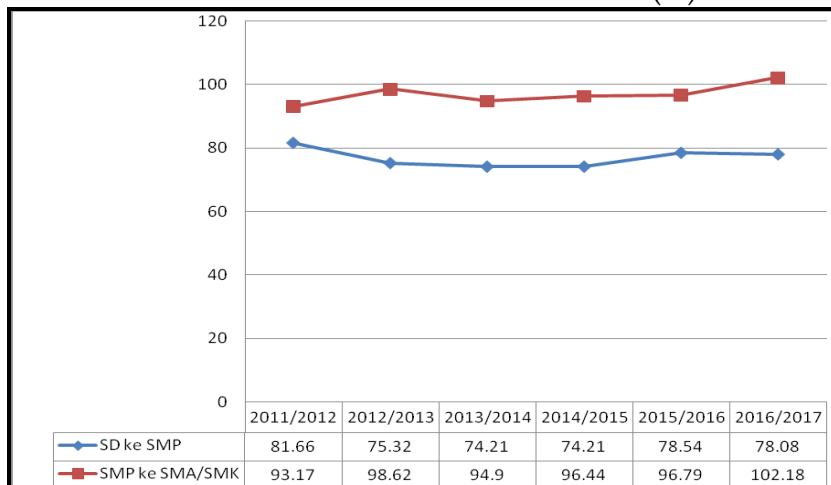
Gambar 4.4: Progres Jumlah Peserta Didik yang Putus Sekolah di Indonesia, tahun 2014-2016



Sumber: BPS, Diolah

Perkembangan minat siswa ini dapat dipantau melalui indikator angka dalam melanjutkan pendidikan. Indikator ini bermanfaat untuk mengevaluasi persentase peserta didik yang melanjutkan studi dari SD ke tingkat SMP dan dari SMP ke SMA/SMK. Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat tercermin dalam indikator berikut ini.

Gambar 4.5: Progres Angka Melanjutkan Pendidikan di Indonesia, Kurun Waktu Tahun 2011-2016 (%)



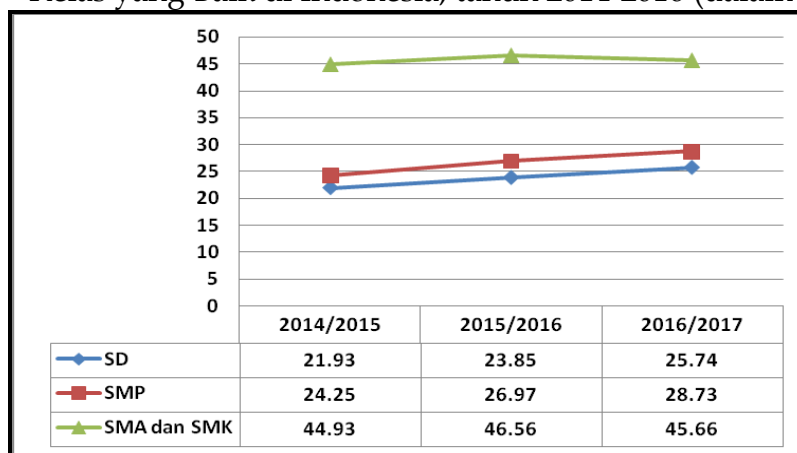
Sumber: Dihimpun dari Rangkuman Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 2016/2017, Kemendikbud RI

Indikator angka studi lanjut juga menjadi salah satu target pemerintah Indonesia dalam merealisasikan Program Indonesia Pintar

yang dicanangkan presiden. Secara umum angka tingkat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkat dalam kurun waktu tahun 2014-2016. Pada periode tahun 2016/2017 tingkat melanjutkan studi dari SMP ke SMA/SMK sederajat mencapai 102,18%. Sementara tingkat melanjutkan studi dari SD ke SMP pada tahun yang sama hanya pada angka 78,08%. Sementara tingkat melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP dan juga dari SMP ke SMA/SMK sederajat lazim harus terus ditingkatkan terutama pada masa mendatang sehingga cita-cita untuk mewujudkan wajib belajar 9 tahun dapat terealisasi.

Sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu menjadi aset penting dalam menunjang berlangsungnya aktivitas belajar mengajar pada lembaga pendidikan. Salah satu sarana prasarana pendidikan tersebut yang paling penting yaitu ruang kelas. Ketersediaan sarana prasarana dalam bentuk ruang kelas ini menjadi salah satu kunci faktor penting menuju keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya demikian, sarana prasarana dalam bentuk ruang kelas yang baik ini juga akan mendukung berhasilnya kegiatan belajar mengajar yang berkualitas karena suasana dan lingkungan belajar yang kondusif.

Gambar 4.6: Progres Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana Ruang Kelas yang Baik di Indonesia, tahun 2014-2016 (dalam %)



Sumber: Rangkuman Data Statistik Pendidikan Dasar dan Menengah 206/2017, Kemendikbud RI

Secara umum jumlah sarana prasarana ruang kelas yang berstatus baik semakin meningkat dalam dua tahun terakhir. Peningkatan kualitas terjadi pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Sudah barang tentu, hal ini berdampak positif terhadap aktivitas dan kualitas belajar mengajar di sekolah. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA dan SMK sederajat

terjadi penurunan khususnya pada tahun 2016/2017. Tren ruang kelas yang memiliki status baik dalam dua tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif terhadap kegiatan atau program pendidikan yang saat ini digulirkan oleh pemerintah.

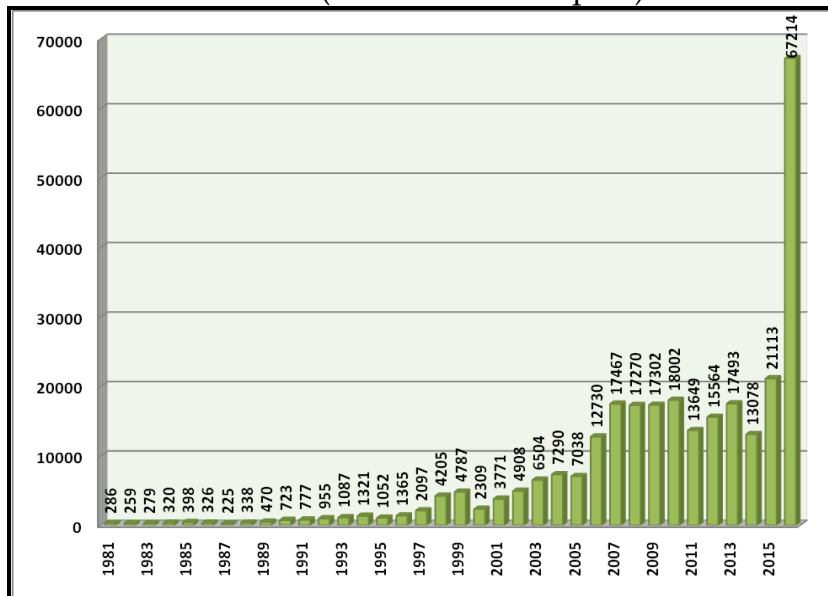
Persoalan lainnya yang juga perlu mendapat perhatian serius dan secara terus menerus yaitu jumlah ruang kelas yang berstatus baik ternyata masih minim secara kuantitatis. Pada tahun 2016/2017 saja jumlah ruang kelas yang berstatus baik di tingkat satuan pendidikan SD hanya 25,74% saja. Artinya hampir tiga per empat sarana prasarana dalam bentuk ruang kelas di SD masih kurang baik dan tidak layak digunakan dalam proses belajar mengajar.

Demikian halnya pada jenjang satuan pendidikan SMP. Sedangkan pada jenjang SMA dan SMK, jumlah ruang kelas layak dan yang berstatus baik pada tahun-tahun terakhir hanya 45,66%. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kecenderungannya lebih dari separuh ruang kelas di satuan pendidikan SMA dan SMK secara nasional kurang baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas.

C. ASPEK KESEHATAN INDONESIA

Aspek penting lainnya selain aspek anggaran untuk sektor pendidikan yaitu anggaran untuk sektor kesehatan. Sektor kesehatan merupakan sektor penting dalam hidup dan kehidupan. Dengan badan yang sehat, manusia bisa berkarya dan beraktivitas. Kinerja manusia juga ditentukan oleh aspek ini, sehingga pemerintah secara lebih khusus mengalokasikan dana lebih untuk sektor kesehatan. Beberapa tabel berikut ini menjelaskan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sektor kesehatan yaitu: besarnya anggaran kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk warga.

Gambar 4.7: Progres Anggaran Kesehatan Indonesia pada tahun 1981-2016 (dalam Milliar Rupiah)



Sumber: Asian Development Bank (Diolah)

Salah satu komponen paling penting dalam penentuan tingkat kualitas hidup manusia selain aspek pendidikan yaitu aspek kesehatan. Kualitas hidup seorang manusia sangat ditentukan oleh derajat kesehatannya. Untuk mewujudkan tingkat derajat kesehatan warga negara, pemerintah Indonesia menyusun program nasional tentang kesehatan sebagaimana direncanakan dalam Nawacita. Termaktub dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah Indonesia mengusung tema program nasional yang sarat dengan cita-cita luhur yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas dalam bentuk Program Indonesia Sehat.

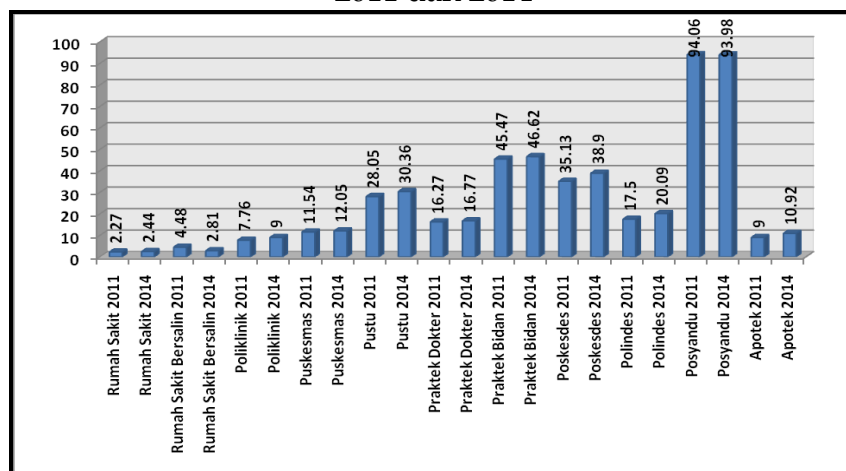
Sasaran utama yang ingin dicapai dalam Program Nasional Indonesia Sehat sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan asupan gizi masyarakat melalui serangkaian upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat luas yang didukung oleh perlindungan keuangan yang layak dan pelayanan kesehatan yang merata. Sasaran utama naskah RPJMN 2015-2019 yitu:

1. Meningkatnya status ibu dan anak yang memiliki tingkat kesehatan dan tingkat gizi yang bagus;
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit;

3. Meningkatnya akses kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat serta rujukan terutama pada daerah-daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
4. Meningkatnya wilayah dan cakupan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat secara universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas manajemen Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan,
5. Terpenuhinya jumlah kebutuhan tenaga kesehatan, obat-obatan dan vaksin; serta
6. Meningkatkan responsivitas masyarakat terhadap sistem kesehatan pribadi.

Sementara itu morbiditas dalam hal ini penduduk yang mengeluh tentang kesehatan sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan hidup sehari-hari. Semakin meningkat morbiditas maka dapat diartikan bahwa tingkat kesehatan seorang penduduk semakin rendah, sehingga semakin banyak penduduk yang bermasalah dengan kesehatannya. Tingginya tingkat morbiditas ini menunjukkan bahwa masyarakat suatu negara sangat rentan terhadap kualitas kesehatan

Gambar 4.8: Angka Persentase Desa Menurut Fasilitas Kesehatan pada 2011 dan 2014



Sumber: BPS, Diolah

Asupan gizi sangat menentukan dan sangat penting dalam masalah kesehatan. Sementara kualitas pertumbuhan penduduk sangat didorong oleh gizi yang seimbang, maka pada RPJMN 2015-2019, pemerintah menaruh perhatian yang khusus untuk meningkatkan gizi terhadap ibu dan balita. Sebagaimana diketahui bahwa ibu merupakan sosok yang sangat penting dalam membentuk generasi penerus bangsa

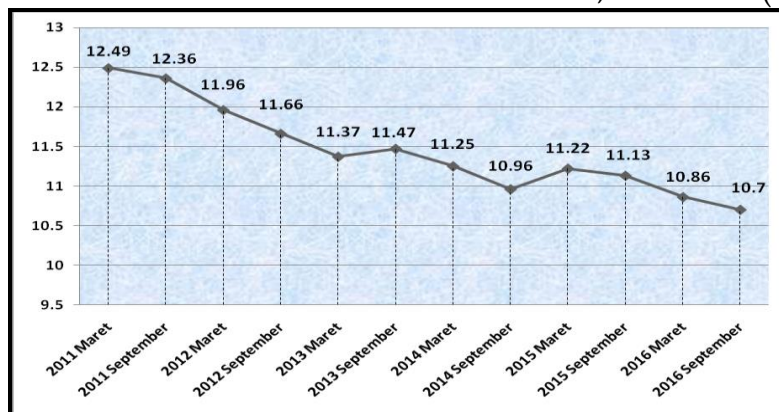
yang berkualitas. Perhatian terhadap seorang ibu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, dengan kata lain untuk melahirkan seorang bayi yang berkualitas maka faktor kesehatan dan gizi ibu haruslah diperbaiki. Sementara perhatian terhadap balita juga tidak kalah pentingnya, hal ini ditunjukkan oleh upaya serius pemerintah dalam meningkatkan gizi balita. Pemerintah sejak zaman orde baru memiliki kebijakan yang diwujudkan sampai di tingkat desa atau kelurahan untuk memonitor dan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak melalui program pos pelayanan terpadu disingkat POSYANDU.

Berdasar pengamatan bahwa angka prevalensi atau gizi buruk di Indonesia di angka 17,8%. Angka ini dapat dijelaskan bahwa balita yang memiliki gizi yang cukup mencapai 82,2%. Sehingga dapat dikemukakan bahwa target angka prevalensi di angka 17% di tahun 2019 sangat mudah untuk diwujudkan. Sedangkan tingkat stunting atau tingkat kekurangan gizi yang kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang sangat kurang sejak di dalam kandungan tersisa 21,7%.

D. ASPEK EKONOMI DAN GDP INDONESIA

Aspek mendasar lainnya selain pendidikan dan kesehatan yaitu aspek ekonomi yang diukur oleh tingkat kemiskinan, GINI rasio dan tentunya pengangguran. Gambar-gambar di bawah ini memaparkan tentang ketiga indikator tersebut dengan menggunakan data pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

Gambar 4.9: Tren Kemiskinan di Indonesia, 2011-2016 (%)

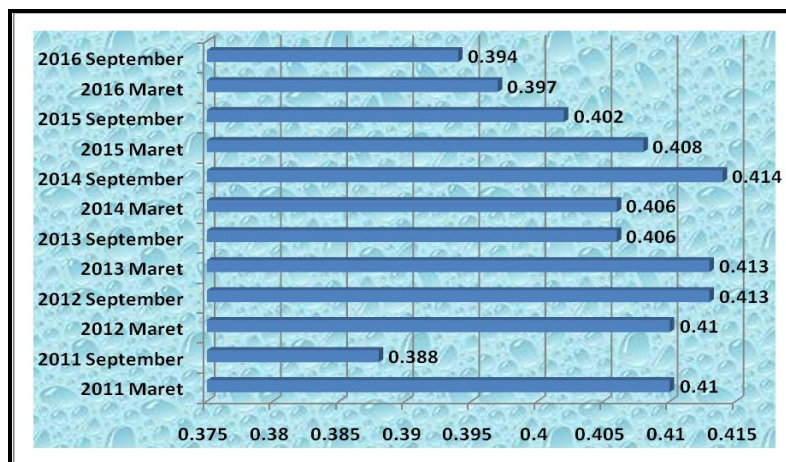


Sumber: BPS, Diolah

Gambar di atas memberikan pemetaan yang jelas bahwa kemiskinan dapat ditekan oleh pemerintah dengan program-program yang mengarah pada upaya penurunan tingkat kemiskinan. Kemiskinan

masyarakat sering kali menjadi salah satu sumber terjadinya permasalahan-permasalahan sosial, bahkan dapat mengancam integritas suatu bangsa. Menyadari dampak negatif dari kemiskinan ini sehingga Indonesia secara serius dan berusaha secara maksimal untuk mengurangi angka kemiskinan.

Gambar 4.10: Tren Gini Rasio Pengeluaran di Indonesia pada tahun 2011-2016

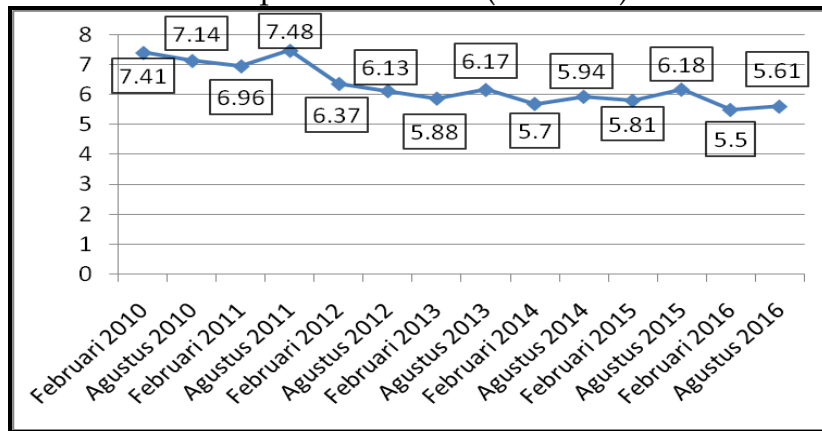


Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Rasio GINI menggambarkan tentang ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi yang diukur oleh pendapatan penduduk. Nilai rasio GINI ini berkisar pada nilai 0 - 1. Pemerintah memberikan payung hukum terkait rasio GINI ini yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.25/MEN/IX/2009 Tentang Tingkat Pengembangan Pemukiman Transmigrasi. Menurut peraturan menteri tersebut dapat dijelaskan bahwa rasio GINI menjadi ukuran yang eksak tentang pemerataan pendapatan masyarakat yang dihitung menurut kelas pendapatan.

Nilai rasio GINI ini jika mendekati angka 0 maka dapat diterjemahkan bahwa tidak terjadi ketimpangan ekonomi masyarakat. Dan jika mendekati angka 1 maka tingkat ketimpangan atau pemerataan pendapatan masyarakat tinggi. Sebagai patokan, range nilai rasio GINI ini yaitu: jika nilai koefisien lebih kecil dari 0,4 maka distribusi pendapatan atau tingkat ketimpangannya rendah, 0,4 sampai dengan 0,5 berarti tingkat ketimpangannya sedang, dan jika lebih besar dari 0,5 maka tingkat ketimpangannya tinggi.

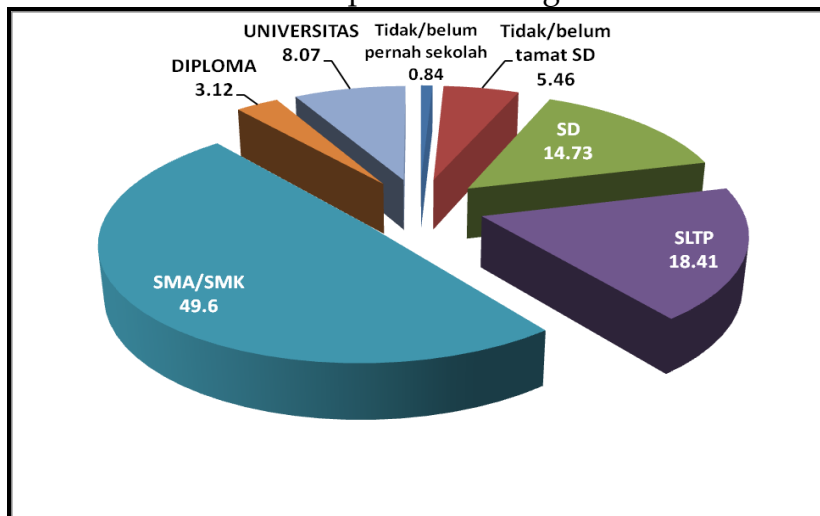
Gambar 4.11: Angka Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia pada 2011-2016 (dalam %)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Gambar 4.11 memaparkan tentang tingkat pengangguran terbuka Indonesia, dimana berdasar pengamatan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka kecenderungannya mengalami penurunan pada Februari 2010 sampai dengan Agustus 2016.

Gambar 4.12: Angka Pengangguran Terbuka Indonesia Menurut Pendidikan pada Bulan Agustus 2016

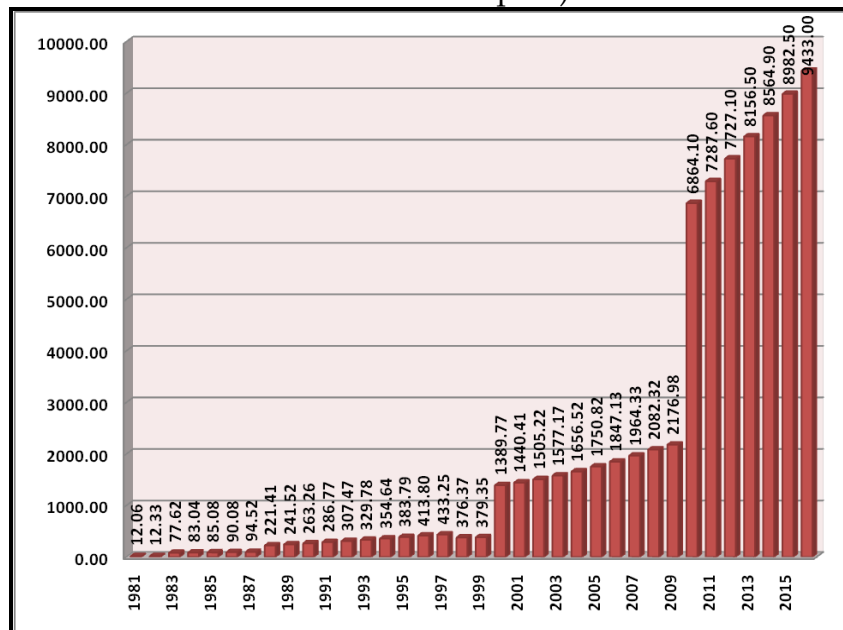


Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah

Berdasar data dari Badan Pusat Statistik di atas dapat dijelaskan bahwa memang benar, pengangguran merupakan permasalahan pada setian negara. Menurut pendidikannya, pengangguran ini digolongkan menjadi 7 (tujuh) yaitu: pengangguran lulusan universitas (sarjana dan

pascasarjana), diploma, SMA/SMK, SLTP, SD, belum tamat SD dan belum pernah sekolah. Pengangguran yang berasal dari lulusan SMA/SMK menduduki rangking terbanyak yaitu sebesar 49,6%, berikutnya lulusan SLTP 18,41%, lulusan SD sebesar 14,73%, tamatan universitas sebanyak 8,07%, belum tamat SD sebanyak 5,46%, diploma 3,12% dan pengangguran yang berasal dari masyarakat yang belum pernah sekolah sebanyak 0,84%.

Gambar 4.13: Nilai GDP Indonesia pada tahun 1981 – 2016 (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Data Sekunder, Diolah (2018)

Berdasar gambar di atas nilai Gross Domestic Product Indonesia pada kurun waktu tahun 1981 – 2016 mengalami peningkatan. Peningkatan yang drastis terjadi pada tahun 2000 dan 2010. Peningkatan pada tahun-tahun tersebut secara murni tidak disebabkan oleh peningkatan nilai Gross Domestic Product ini, tetapi disebabkan oleh adanya perubahan tahun dasar. Dimana pemerintah pada tahun 2000 dan tahun 2010 melakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan indikator-indikator makro ekonomi.

E. UJI STASIONERITAS

Uji stasioneritas data merupakan persyaratan utama dalam melakukan analisis data ketika data bersifat runtut waktu atau *time series*. Uji stasioneritas data ini bahkan menjadi syarat wajib untuk kasus-

kasus ekonomi yang melibatkan data numeric yang bersifat *series*. Pendekatan yang digunakan untuk menguji stasioneritas data biasanya menggunakan teknik grafik, correlogram dan unit root test. Namun karena metode grafik memiliki kelemahan dan sering kali memiliki multi tafsir dan tidak secara eksak memberikan informasi yang akurat, maka untuk menguji stasioneritas data dalam penelitian ini tidak menggunakan pendekatan grafik, namun lebih difokuskan menggunakan pendekatan correlogram dan unit root test.

1. Uji Correlogram

Date: 05/06/18 Time: 20:42

Sample: 1 36

Included observations: 36

Auto correlation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
. *****	. *****	1	0.876	0.876	30.017	0.000
. *****	. *	2	0.752	-0.069	52.774	0.000
. *****	. *	3	0.627	-0.075	69.068	0.000
. ****	. *	4	0.501	-0.082	79.784	0.000
. ***	. *	5	0.375	-0.083	85.978	0.000
. **	. *	6	0.249	-0.088	88.814	0.000
. *	. *	7	0.125	-0.097	89.549	0.000
. *	. **	8	0.102	0.346	90.057	0.000
. *	.	9	0.079	-0.050	90.375	0.000
. .	.	10	0.057	-0.049	90.548	0.000
. .	. *	11	0.023	-0.121	90.578	0.000
. .	.	12	-0.011	-0.063	90.584	0.000
. .	.	13	-0.044	-0.062	90.697	0.000
. *	. *	14	-0.076	-0.068	91.060	0.000
. *	. *	15	-0.109	0.142	91.841	0.000
. *	.	16	-0.143	-0.057	93.233	0.000

Uji correlogram sama dengan uji *autocorrelation function*, dimana untuk data yang memiliki stasioneritas maka nilai correlogram mengalami penurunan dengan sangat cepat, dan sebaliknya jika data tidak stasioner maka nilai correlogram cenderung tidak memiliki nilai menuju angka nol tetapi menjauhi nilai nol. Cara untuk mendeteksi secara mudah terkait stasioneritas data menggunakan pendekatan correlogram yaitu dengan melihat nilai Prob pada tabel di atas. Berdasar tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa nilai Prob sebesar 0,000 maka data penelitian dalam kondisi yang stasioner.

2. Uji Unit Root Test

Untuk melakukan deteksi terhadap stasioneritas data menggunakan pendekatan uni root test yaitu dengan membandingkan nilai statistik t dengan nilai kritis pada tabel MacKinnon. Ketentuan yang digunakan, apabila nilai absolute statistic $t <$ dibandingkan dengan nilai kritis absolutnya maka data tidak stasioner, begitu juga juga sebaliknya. Teknik lainnya yaitu dengan membandingkan nilai Prob dengan $\alpha = 0,05$. Ketentuan yang digunakan, ketika nilai Prob $>$ dari $\alpha = 0,05$ maka data dalam posisi tidak stasioner, begitu juga sebaliknya, yaitu ketika nilai Prob $<$ dari $\alpha = 0,05$ maka data dalam posisi yang stasioner.

Null Hypothesis: D(GDP__TRILLION_RP_) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-5.410285	0.0001
Test critical values:		
1% level	-3.639407	
5% level	-2.951125	
10% level	-2.614300	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
 Phillips-Perron dengan 1st difference

Berdasar hasil olah data tentang uji stasioneritas data untuk variabel GDP dapat dikemukakan bahwa variabel ini dalam posisi stasioner, yang dibuktikan oleh nilai Prob.* = 0,0001 $<$ dari $\alpha = 0,05$.

Hasil uji stasioneritas data untuk variabel anggaran kesehatan yaitu: nilai Prob.* = 0,0000. Nilai Prob.* ini lebih rendah dari $\alpha = 0,05$, sehingga keputusan statistiknya bahwa anggaran kesehatan stasioner. Sementara uji stasioneritas data variabel anggaran pendidikan ditunjukkan oleh nilai Prob.* = 0,0045. Variabel anggaran pendidikan dalam posisi yang stasioner karena nilai Prob.* $<$ $\alpha = 0,05$.

F. PEMILIHAN LAG OPTIMAL

Untuk memilih panjang lag optimal, penelitian ini menggunakan pengujian *sequential modified LR test statistic* (LR), *Hannan-Quinn information criterion* (HQ), *Final prediction error* (FPE), *Schwarz information criterion* (SC) dan *Akaike information criterion* (AIC). Tabel di bawah ini merupakan rangkuman hasil pengujian lag optimal, dan secara statistik dapat direkomendasikan bahwa lag 2 merupakan lag optimal yang

didasarkan pada tanda bintang (*) paling banyak, maka artinya lag yang kita gunakan untuk pengolahan data selanjutnya menggunakan Lag 2.

Tabel 4.1: Uji Panjang Lag Optimal

Lag	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	NA	1.19e+23	61.64876	61.78344	61.69469
1	188.2668	3.82e+20	55.90261	56.44133	56.08633
2	49.96447*	1.03e+20*	54.58149*	55.52424*	54.90300*

** indicates lag order selected by the criterion*

Sumber: Data Sekunder, Diolah dengan Eviews 8 (2018)

Berdasar tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa panjang lag optimal pada lag 2.

G. UJI KOINTEGRASI

Uji kointegrasi sangat bermanfaat untuk melakukan analisis data penelitian yang menggunakan data bersifat series atau runtun waktu. Pengujian kointegrasi merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk memeriksa apakah suatu model yang ditawarkan secara empiris memiliki hubungan jangka panjang yang bermakna.

Berdasar hasil analisis data dapat dijelaskan bahwa nilai trace statistic (63,13578) lebih besar dari critical value (29,79707). Sedangkan nilai max eige stat (34,48754) lebih besar dari critical value (21,13162). Hasil olah data ini berarti bahwa dalam jangka panjang variabel-variabel penelitian yaitu anggaran pendidikan, kesehatan dan Gross Domestic Product memiliki kointegrasi pada model persamaan yang dihasilkan.

H. UJI KAUSALITAS TODA-YAMAMOTO

Tabel di bawah ini (tabel 4.2) merupakan ringkasan hasil uji kausalitas Toda-Yamamoto atas variabel-variabel penelitian yaitu anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan Gross Domestic Product Indonesia pada tahun 1981 sampai dengan tahun 2016. Kausalitas Toda-Yamamoto dipilih untuk menguji hubungan timbal balik variabel-variabel penelitian mengingat uji ini lebih fleksibel jika dibandingkan dengan uji kausalitas granger.

Tabel 4.2: Hasil Uji Kausalitas Toda-Yamamoto

Keterangan	Chi-sq	Prob	Hasil
GDP → KES	7.574179	0.0227	<i>Unidirectional Causality / One way causality / Kausalitas satu arah</i>
KES → GDP	2.316162	0.3141	

			GDP → KES
GDP → PEND	23.16803	0.0000	<i>Bidirectional causality /</i>
PEND → GDP	8.736641	0.0127	<i>Two way causality /</i> Kausalitas dua arah
			GDP ↔ PEND
KES → PEND	7.052999	0.0294	<i>Bidirectional causality /</i>
PEND → KES	17.64311	0.0001	<i>Two way causality /</i> Kausalitas dua arah
			KES ↔ PEND

Sumber: Lampiran 5, Disederhanakan

Berdasar tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan mengenai pola hubungan variabel-variabel penelitian yaitu: anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan Gross Domestic Product Indonesia dalam kurun waktu tahun 1981-2016. Penjelasan lebih rinci terkait hubungan ini yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran kesehatan mendorong anggaran pendidikan, dan anggaran pendidikan mendorong anggaran kesehatan. Meningkatnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk fasilitas kesehatan maka akan mendorong peningkatan anggaran untuk pendidikan. Demikian halnya dengan peningkatan dalam hal anggaran untuk pendidikan akan mendorong anggaran untuk kesehatan. Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi: “Ada hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan anggaran kesehatan di Indonesia” adalah teruji.
2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa anggaran pendidikan dapat mendorong Gross Domestic Product, dan Gross Domestic Product mendorong anggaran pendidikan. Hubungan kausalitas ini mengisyaratkan bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi: “Ada hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan GDP di Indonesia” adalah teruji.
3. Sedangkan hasil penelitian terkait hubungan kausalitas anggaran kesehatan dengan Gross Domestic Product menunjukkan bahwa, terdapat hubungan satu arah Gross Domestic Product dengan anggaran kesehatan. Hasil yang berbeda bahwa anggaran kesehatan tidak mendorong peningkatan dalam hal Gross Domestic Product. Dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi: “Ada hubungan kausalitas anggaran kesehatan dengan GDP di Indonesia” adalah tidak teruji.

BAB V

PEMBAHASAN

A. HUBUNGAN KAUSALITAS ANGGARAN PENDIDIKAN DENGAN ANGGARAN KESEHATAN DI INDONESIA

Sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa hipotesis yang berbunyi: “Ada hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan anggaran kesehatan di Indonesia” adalah teruji. Hasil ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan kausalitas atau ada hubungan dua arah anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan di Indonesia. hal ini berarti bahwa anggaran pendidikan mendorong anggaran kesehatan dan anggaran kesehatan mendorong anggaran pendidikan.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tang dan Lai. Dimana Tang dan Lai menemukan kebijakan ekonomi makro utama dalam di Indonesia dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan GDP yang ekonomi adalah diukur oleh pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong besarnya investasi pada sumber daya insani seperti pendidikan dan kesehatan. Pentingnya anggaran untuk pendidikan dan kesehatan ini karena kedua faktor tersebut dapat berimplikasi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap meningkatnya tingkat produktivitas angkatan kerja Indonesia yang sangat diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan output nasional. Studi Tang dan Lai ini menggunakan uji kausalitas Granger serta pendekatan uji kausalitas dari Toda dan Yamamoto. Temuan penelitian Tang dan Lai juga menjelaskan bahwa masyarakat di Malaysia lebih berorientasi pada pengeluaran pendidikan dibandingkan dengan pengeluaran kesehatan. Masyarakat di Malaysia lebih mementingkan pendidikan atau lebih mengedepankan pengetahuan, baru berikutnya memperhatikan aspek-aspek kesehatan. Disamping itu, pengeluaran

untuk pendidikan di Malaysia lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran untuk kesehatan¹⁰⁶.

Hasil studi ini juga relevan dengan penelitian Febrianto yang menguji hubungan tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan. Hasil studi Febrianto ini secara eksplisit menjelaskan mengenai pentingnya hubungan tingkat pendidikan keluarga dengan tingkat kesehatan keluarga¹⁰⁷. Demikian juga sebaliknya, tingkat kesehatan keluarga akan mendorong dalam hal peningkatan tingkat pendidikan. Dalam konteks ekonomi makro, peningkatan anggaran kesehatan ini diyakini dapat meningkatkan anggaran pendidikan secara nasional. Dan sebaliknya, bahwa peningkatan anggaran pendidikan dapat mendorong peningkatan anggaran kesehatan masyarakat secara nasional.

B. HUBUNGAN KAUSALITAS ANGGARAN PENDIDIKAN DENGAN GDP DI INDONESIA

Berdasar bab IV atau hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa hipotesis penelitian yaitu “Ada hubungan kausalitas anggaran pendidikan dengan GDP di Indonesia” adalah teruji. Hasil penelitian ini relevan dengan studi Tsaurai yang menemukan bahwa pengeluaran pendidikan di Austria mendorong pertumbuhan ekonomi¹⁰⁸. Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya insani. Pengeluaran di sektor pendidikan sekaligus merupakan investasi jangka panjang yang dapat dinikmati setelah lulus dari lembaga pendidikan.

Sumberdaya insani juga merupakan pelaku utama pembangunan nasional, dimana keberadaan sumberdaya insani ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan baik ekonomi maupun non ekonomi pada suatu bangsa. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa kualitas sumberdaya insani ini menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bangsa, dimana semakin berkualitas sumberdaya insani yang sekaligus sebagai operator-operator pelaku ekonomi maka diharapkan dapat meningkatkan prestasi ekonomi di kemudian hari.

Hasil studi ini juga mendukung penelitian Szeles yang menguji progres ekonomi makro di Rumania. Dalam studinya, Szeles menguji tentang pembangunan ekonomi di Rumania yang menggunakan beberapa dimensi yaitu GDP, kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan pendapatan, dengan penekanan besar pada dinamika GDP per kapita.

¹⁰⁶ Chor Foon Tang and Yew Wah Lai, *The Causal Relationship*, 2011.

¹⁰⁷ Irwan Dwi Febrianto, *Hubungan Tingkat*, 2012.

¹⁰⁸ Kunofiwa Tsaurai, *Education-Growth*, 2015.

Penguatan terhadap dimensi-dimensi di atas memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan ekonomi, tidak hanya di Rumania tetapi juga berlaku di Uni Eropa¹⁰⁹.

Jadi meskipun Rumania tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diantara beberapa negara di Uni Eropa, namun karena dalam dekade terakhir terdapat indikasi lemahnya kebijakan ekonomi dan sosial di Rumania maka terdapat kesenjangan antar komponen-komponen indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagaimana diketahui bahwa komponen IPM terdiri dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pendidikan diukur oleh lamanya masyarakat dalam menempuh pendidikan, artinya semakin lama pendidikan maka semakin tinggi jenjang pendidikan masyarakat sehingga masyarakat semakin sejahtera. Di sektor kesehatan, semakin banyak masyarakat mampu dalam mengakses kesehatan maka semakin banyak pula masyarakat Indonesia yang berumur panjang. Sedangkan di sektor ekonomi ditentukan oleh *income per capita* yang dihasilkan oleh penduduk.

Studi Ariautama dan Syahrul juga relevan dengan studi ini. Ariautama dan Syahrul yang melakukan penelitian mengenai efek timbal balik tingkat kesehatan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pendidikan di Indonesia. Hasil studi di Indonesia bahwa tingkat pendidikan, ketimpangan pendapatan dan kesehatan mempunyai hubungan kausalitas dengan satu lag pada penelitian ini¹¹⁰. Walaupun menggunakan alat analisis yang berbeda dimana Ariautama dan Syahrul menggunakan Kausalitas Granger dan penelitian ini menggunakan Toda-Yamamoto namun demikian hasil penelitian ini sama.

Disamping itu studi ini mendukung penelitian Asiah bahwa tingkat pendidikan masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat pengetahuan tentang kesehatan di Banda Aceh. Semakin meningkat tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi tingkat pengetahuan serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan pribadinya¹¹¹. Penelitian ini juga mendukung penelitian Maratade, *et al* di Provinsi Sulawesi Utara bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan dua arah dengan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan sebaliknya, Indeks Pembangunan Manusia mempunyai hubungan kausalitas dengan Pertumbuhan Ekonomi¹¹².

¹⁰⁹ Monica Răileanu Szeles, What Lies, 2012.

¹¹⁰ I Gede Agus Ariautama dan Syahrul, Analisis Panel, 2016.

¹¹¹ Asiah M.D., Hubungan Tingkat Pendidikan, 2009.

¹¹² Siske Yanti Maratade, Debby Ch. Rotinsulu, Audie O. Niode, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, 2016.

Studi Saraswati dan Cahyono juga relevan penelitian ini, bahwa dengan model ekonometrika dengan metode Vector Auto Regression (VAR) tingkat pendidikan akan mengalami penurunan, sedangkan tingkat kesehatan dan PDRB per kapita akan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya¹¹³. Penelitian ini juga mendukung studi Subroto bahwa terdapat hubungan dua arah atau kausalitas peran pendidikan dengan pertumbuhan output ekonomi serta relevan dengan penelitian Tan, et al dalam studinya yang menemukan bahwa ada hubungan kausal pengeluaran pendidikan dan produk domestik bruto, dan tidak ada hubungan kausal antara pengeluaran kesehatan dan produk domestik bruto¹¹⁴.

C. HUBUNGAN KAUSALITAS ANGGARAN KESEHATAN DENGAN GDP DI INDONESIA

Hipotesis penelitian yang berbunyi: “Ada hubungan kausalitas anggaran kesehatan dengan GDP di Indonesia” sebagaimana dikemukakan dalam bab hasil penelitian adalah tidak teruji. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Saraswati dan Cahyono, karena dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat kesehatan berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Kota Surabaya¹¹⁵.

Penelitian ini juga menolak studi Febrianto bahwa dalam studinya menemukan terdapat hubungan bermakna tingkat penghasilan orang tua dengan status gizi siswa¹¹⁶. Perbedaan yang paling utama dengan studi ini, bahwa menurut Febrianto dalam menguji hubungan tingkat penghasilan dan tingkat pengetahuan orang tua menggunakan korelasi *product moment* dan analisis regresi tiga prediktor. Pendekatan ini berbeda jauh dengan penelitian ini yang menggunakan uji Kausalitas Toda-Yamamoto untuk menguji hubungan kausalitas variabel penelitian yaitu anggaran kesehatan dan GDP.

Demikian halnya dengan studi Tan, et al, bahwa ada hubungan dua arah atau hubungan kausalitas produk domestik bruto (GDP) dengan pengeluaran pendidikan, serta tidak ada hubungan dua arah atau kausalitas produk domestik bruto (GDP) dengan pengeluaran kesehatan¹¹⁷.

¹¹³ Sulistyaningrum Werdi Saraswati dan Hendry Cahyono, Pengaruh Tingkat Pendidikan, 2014.

¹¹⁴ Bilge Köksel Tan; Merter Mert; Zeynel Abidin Özdemir, A Look, 2013.

¹¹⁵ Sulistyaningrum Werdi Saraswati dan Hendry Cahyono, Pengaruh Tingkat Pendidikan, 2014.

¹¹⁶ Irwan Dwi Febrianto, *Hubungan Tingkat Penghasilan*, 2012.

¹¹⁷ Bilge Köksel Tan; Merter Mert; Zeynel Abidin Özdemir, A Look, 2013.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu komponen penting dalam setiap organisasi, lembaga, institusi bahkan negara sekalipun, anggaran menjadi aspek penting untuk mendukung kegiatan dan program-program yang telah direncanakan. Oleh karenanya dalam konteks kenegaraan, anggaran menjadi suatu keniscayaan dan harus dipenuhi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan jika suatu negara tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka berarti negara tersebut tidak memiliki anggaran, atau barangkali tidak memiliki sumber-sumber ekonomi yang bisa mendatangkan pendapatan. Pendapatan inilah yang nantinya digunakan untuk membiayai program-program pemerintah yaitu pendidikan dan kesehatan.

Sebagaimana hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan di Indonesia memiliki hubungan kausalitas. Anggaran pendidikan mendorong anggaran kesehatan dan sebaliknya anggaran kesehatan mendorong anggaran pendidikan. Dengan demikian nyatalah bahwa anggaran sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia, sehingga pemerintah perlu untuk mencari sumber-sumber pendapatan pemerintah yang baru untuk mewujudkan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat yang dicita-citakan oleh undang-undang.

Secara ekonomi makro, GDP merupakan output nasional kotor yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi pada satu tahun tertentu. GDP ini menggambarkan pendapatan nasional yang dialokasi untuk mendukung pengeluaran negara baik dalam hal kesehatan masyarakat maupun pendidikan. Peningkatan dalam hal GDP akan mendorong terjadinya peningkatan dalam hal anggaran untuk sector pendidikan, tetapi tidak demikian halnya dengan anggaran kesehatan di Indonesia.

B. SARAN

Sebagaimana diuraikan dalam manfaat penelitian, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi kepada beberapa pihak yaitu: bagi dunia teoretis, dunia praktik, pemerintah, maupun penelitian yang akan datang.

Pertama bagi dunia teoretis, dapat disarankan untuk melakukan bedah teori tentang pengeluaran pemerintah (*Government Expenditures*) serta pengalokasian GDP untuk aspek-aspek strategis yaitu sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Kedua bagi dunia praktik, dapat disarankan untuk melakukan perencanaan secara holistik, tidak saja terkait dengan pengalokasian anggaran untuk kesehatan dan pendidikan, tetapi juga terkait dengan pengoptimalan terhadap sumber-sumber penerimaan. Ketiga bagi pemerintah, disarankan untuk memiliki sifat *prudential* dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Yaitu dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana di sektor pendidikan dan kesehatan menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Disamping itu pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dalam kaitannya dengan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional. Keempat bagi peneliti yang akan datang, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih serius dengan cara melakukan perluasan kajian dan periodisasi yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Santos R. and Ofonyelu, Chris C., Toda-Yamamoto Causality Test Between Money Market Interest Rate And Expected Inflation: The Fisher Hypothesis Revisited, *European Scientific Journal*, March 2013 edition vol.9, No.7.
- Anonymous, *Anggaran Kesehatan Tetap 5 Persen di APBN 2017*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/10/31/anggaran-kesehatan-tetap-5-persen-di-apbn-2017>
- Anonymous, *Kajian Anggaran Pendidikan*, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, 28 November 2017.
- Anonymous, *Pengertian Pendapatan Nasional*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.
- Anonymous, *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*, Kementerian Keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Ariautama, I Gede Agus dan Syahrul, Analisis Panel Var: Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, *INFO ARTHA: Journal of Financial and Accounting Information*, Vol. 1 Edisi Januari 2016.
- Arifin, Ahmad, Anggaran Pendidikan dan Mutu Pendidikan (Respon Kebijakan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN Bagi Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.V No.1 2008.
- Asiah M.D., Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Ibu Rumah Tangga di Desa Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, *Jurnal Biologi Edukasi*, Vol 1, No 2, 2009.
- Assadzadeh, Ahmad; Pourqoly, Javad; Baboli, Amin Taslimi; Deljavan, Fahimeh Ahmadzadeh, Studying The Impact of Government Expenditures Shocks on Macroeconomic Variables of The Iranian Economy, *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 2013;5(2).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Barro, Roberto and Grilli, Vittorio, *European Macroeconomics*, Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1994.
- Brooks, Wyatt, *Lecture 1: Gross Domestic Product*, <https://www3.nd.edu/~wbrooks/SyllabusS14.pdf>, 2014.

- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Informasi APBN 2018 Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, Kementerian Keuangan RI, 2018, p. 16
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Informasi APBN 2018 Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018.
- Dritsaki, Chaido, Toda-Yamamoto Causality Test between Inflation and Nominal Interest Rates: Evidence from Three Countries of Europe, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2017.
- Febriana, Deri, Pengembangan Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia , *Jejaring Administrasi Publik*, Th VI. Nomor 1, Januari-Juni 2014.
- Febrianto, Irwan Dwi, *Hubungan Tingkat Penghasilan, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang Makanan Bergizi dengan Status Gizi Siswa TK Islam Zahrotul Ulum Karangampel Indramayu*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Hasan, Asyari; Seigniorage dalam Perspektif Moneter Islam, *JURIS*, Volume 14, Nomor 1, 2015.
- Hilborn, Ray and Marc Mangel, *The Ecological Detective: Confronting Models With Data*, New Jersey: Princeton University Press, 1997.
- Horváth, Lajos; Kokoszka, Piotr; Rice, Gregory, Testing stationarity of functional time series, *Journal of Econometrics*, Vol. 179(1).
- Huda, Samsul, Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kompeten sebagai Basis Pembangunan Daerah, *Media Akademika*, Vol. 26, No. 3, Juli 2011.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Kesekretariatan Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral.
- Kurniawan, Wawan, Pengaruh Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Dengan Kewilayahan Sebagai Variabel Moderasi),

http://bappeda.sragenkab.go.id/masuk/gambar/5._SDM_PERTUMBUHAN_EKONOMI_KEMISKINAN.PDF

- Leamer, Edward E., *Macroeconomic Patterns and Stories: a Guide for MBAs*, New York: Springer, 2009.
- Lojanica, Nemanja, Government Expenditure and Government Revenue – The Causality on the Example of the Republic of Serbia, *Management International Conference*, Portoroz, Slovenia, 28 – 30 May 2015.
- Mankiw, N. Gregory, *Principles of Microeconomics*, South-Western, a part of Cengage Learning, 2008.
- Maratade, Siske Yanti; Rotinsulu, Debby Ch.; Niode, Audie O., Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Tahun 2002-2013), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No. 01 Tahun 2016.
- Moyer, Brian C., *Measuring the Economy A Primer on GDP and the National Income and Product Accounts*, Bureau Of Economic Analysis U.S. Department Of Commerce, December 2015.
- Muijs, Daniel, *Doing Quantitative Research in Education with SPSS*, Thousand Oaks • New Delhi • London: Sage Publications, 2004.
- Notoatmodjo, Soekidjo, Kesehatan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 2, No. 5, April 2008.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, *Buku I: Agenda Pembangunan Nasional*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014.
- Rosadi, Dedi, *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2012.
- Rosidah, Dimensi Budaya dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Implementasi Total Quality, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2004.
- Rusdi, Uji Akar-Akar Unit dalam Model Runtun Waktu Autoregresif, *Statistika*, Vol. 11 No. 2, 67 – 78 Nopember 2011.
- Safe, Marziyeh Sadat; Barouni, Mohsen; Saif, Seyed Mojtaba; Branch, Safashar, Health impact on Economy by Artificial Neural Network and Dynamic Ordinary Least Squares, *Journal of Health Management & Informatics*, 4(4), 2017.
- Samuelson, Paul A. and Nordhaus, William D., *Economics*, The McGraw-Hill Irwin, 2010.
- Saraswati, Sulistyaningrum Werdi dan Cahyono, Hendry, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Kesehatan Terhadap PDRB Per Kapita Di

- Kota Surabaya, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/12588/53/article.pdf, 2014.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Sloman, John and Norris, Keith, *Principles of Economics*, Pearson Education Australia, 2005.
- Subroto, Gatot, Hubungan Pendidikan dan Ekonomi: Perspektif Teori dan Empiris, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 20, Nomor 3, September 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: ALFABETA, 2014, pp. 58.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Suparno, N. dan T.D. Haryo Tamtomo, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi untuk SMP/MTs Kelas VIII*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Szeles, Monica Răileanu, What Lies beyond the Romania's Economic Development, *Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution*, Volume 3, Issue 3, 2012.
- Tabar, Fozieh Jeyhoon; Najafi, Zahra; Badooei, Yaser Sistani, The Impact of Educational Expenditures of Government on Economic Growth of Iran, *AD-minister*, No.30 Medellín Jan./June 2017.
- Tan, Bilge Köksel; Merter Mert; Zeynel Abidin Özdemir, A Look At On The Relationship Between The Public Investments And Economic Growth: Turkey, 1969-2003, *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Vol. 25(1), 2013.
- Tang, Chor Foon and Lai, Yew Wah, The Causal Relationship between Health and Education Expenditures in Malaysia, *Theoretical and Applied Economics*, Volume XVIII (2011), No. 8(561).
- Teker, Dilek; Teker, Suat; Sönmez, Mine, The Effect of Economic Variables on Life Expectancy of Males and Females, *Journal of Business Research -Türk*, 4/3, 2012.
- Tsaurai, Kunofiwa, Education-Growth Dynamics For Austria: A Case Study Approach, *Journal of Governance and Regulation*, Volume 4, Issue 1, 2015.
- UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Waluyo, Dwi Eko, *Ekonomika Makro*, Malang: UMM Press, 2009.

Winarno, Wing Wahyu, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews*, Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta, 2011.